

● SUPRAPTO ● HERU SUNARDI ● NAZAR NA'AMI

CIVIC CULTURE & PERTARUNGAN IDENTITAS

EDITOR: SUPRAPTO

Sintesis



CIVIC CULTURE
&
PERTARUNGAN IDENTITAS

Suprpto
Heru Sunardi
Nazar Na'ami



CIVIC CULTURE & PERTARUNGAN IDENTITAS

Editor: Suprpto

Sintesis

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang HAK CIPTA:

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

CIVIC CULTURE
&
PERTARUNGAN IDENTITAS

Ditulis oleh:

Suprpto

Heru Sunardi

Nazar Na'ami

Editor: Suprpto

Setting/Layout: Abdul Hanan Al-Hasany

Desain Sampul: Abdul Hanan Al-Hasany

© 2013 Suprpto dkk.

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit Sintesis, Maret 2013

Sintesis Ilmu Indonesia Group - Tangerang Selatan

Jl. Jati No. 30, Rt. 01/ Rw. 09, Pisangan Barat, Cirendeu, Ciputat Timur,

Tangerang Selatan 15419

Mobile : 0813 9285 2626

e-mail: sintesisilmu@yahoo.com

INDONESIA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All rights reserved

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia 2013. Civic Culture & Pertarungan Identitas

Tangerang Selatan: Penerbit Sintesis, 2013

Cet. 1; x + 164 hlm.; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-602-17498-3-8

Kata Pengantar

Civic culture atau budaya kewargaan adalah unsur terpenting dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia. Civic culture yang merefleksikan kesadaran individu maupun masyarakat sebagai warga negara berperan penting bagi upaya menjaga kohesivitas di tingkat lokal sekaligus memupuk integrasi bangsa secara nasional. Menguatnya civic culture di suatu masyarakat memungkinkan berbagai pertentangan dan konflik dapat dikelola secara proporsional sehingga tidak meledak menjadi kerusuhan komunal.

Keberadaan civic culture semakin urgen terutama di daerah-daerah yang sangat plural baik dari sisi etnis maupun agama. Apalagi jika tata letak pemukiman warga tersebut tersegregasi secara etnis dan agama seperti di Kota Mataram, provinsi Nusa Tenggara Barat. Segregasi atau pengelompokan pemukiman berdasar etnis dan agama tersebut secara tidak langsung ternyata juga memberi pengaruh terhadap penguatan identitas masing-masing kelompok. Identitas kelompok bahkan semakin terlihat jelas ketika diekspresikan melalui kontestasi simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Menariknya, simbol-simbol keagamaan tersebut terlihat marak seiring berkembangnya demokrasi.

Buku ini merupakan pengembangan hasil penelitian tentang budaya kewargaan yang berlangsung pada komunitas Hindu dan Muslim di Kota Mataram Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, peneliti menemukan sejumlah temuan menarik seputar budaya kewargaan yang berlangsung pada komunitas beragama. Kami berharap, buku ini dapat memberi sumbangan bagi upaya-upaya memperkuat budaya kewargaan dan demokrasi di tingkat lokal sekaligus meningkatkan kualitas hubungan dan kerukunan antar umat beragama.

Dengan selesainya penelitian ini, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semua umat beragama. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mendanai riset ini. Rektor dan para dekan di IAIN Mataram yang telah memberi izin kepada kami untuk melakukan riset ini. Umat Muslim dan Hindu di Kota Mataram yang telah berkenan menjadi responden dan informan dalam riset ini. Para mahasiswa dari IAIN Mataram dan IKIP Mataram yang telah bersedia menjadi enumerator. Teman-teman dosen IAIN Mataram, para tokoh agama yang telah dengan sangat sabar terlibat dalam *Focus Group Discussion*. Penerbit Sintesis yang sangat antusias mempublikasikan karya ini. Dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan riset ini.

Dalam buku ini, tentu ada sejumlah kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif bagi penyempurnaan hasil penelitian ini, sangat kami harapkan.

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar, Grafik dan Tabel	viii
1. Prolog	1
2. Civic Culture, Pluralitas dan Demokrasi	17
3. Mataram: Kota Multikultur dan Arena Kontestasi	45
4. Benarkah Hindu Lebih Toleran?	71
5. Kontestasi Simbol dan Konsolidasi Demokrasi	115
6. Epilog	147
Daftar Pustaka	153
Indeks	161
Tentang Penulis	163

Daftar Gambar, Grafik, dan Tabel

Gambar

Gambar 3.1 : Peta Kota Mataram51

Grafik

Grafik 3.1 : Komposisi Penggunaan Lahan Tahun 2009 52

Grafik 3.2 : Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2006 s/d 200965

Grafik 3.3 : Hasil Pemilu 2009 Kota Mataram68

Grafik 4.1 : Partisipasi dalam Kegiatan Kebangsaan dan Sosial 75

Grafik 4.2 : Ikatan Kebangsaan78

Grafik 4.3 : Tingkat Solidaritas Sosial80

Grafik 4.4 : Sikap Saling Percaya Antar-Personal85

Grafik 4.5 : Inklusivitas dalam Beragama95

Grafik 4.6 : Sikap terhadap kelompok yang tak disukai 101

Grafik 4.7: Pandangan tentang Kesetaraan	104
Grafik 4.8: Keterlibatan Warga Muslim dalam Perhimpunan Keagamaan	109
Grafik 4.9: Keterlibatan warga Muslim dalam Organisasi Non-Keagamaan	110
Grafik 4.10: Keterlibatan Warga Hindu dalam Perhimpunan Keagamaan	111
Grafik 4.11: Keterlibatan Warga Hindu dalam Organisasi Non-Keagamaan	112
Grafik 5.1 : Bangunan Bernuansa Agama	123
Grafik 5.2 : PNS Sebaiknya Berasal dari Orang Asli Daerah	127
Grafik 5.3 : Pejabat Publik Sebaiknya Putra Asli Daerah	128
Grafik 5.4: Kontestasi di Ranah Pendidikan	132
Grafik 5.5: Pandangan mengenai Demokrasi merupakan Bentuk Pemerintahan Terbaik Dibanding Sistem lainnya	136
Grafik 5.6: Dalam Demokrasi, Sulit Mengambil Keputusan	138
Grafik 5.7: Kelompok Ekstrim Tetap Punya Hak untuk Berpendapat	139
Grafik 5.8: Minoritas Dilarang Menentang Pandangan Mayoritas	140
Grafik 5.9: Setiap Warga Negara Bebas dalam Berorganisasi Politik Apapun	141
Grafik 5.10: Tempat-tempat yang Diidentifikasi sebagai Kurang Aman	143

Grafik 5.11: Kerusuhan atau Konflik Sosial	144
--	-----

Tabel

Tabel 3.1 :Rasio Jumlah Penduduk	53
Tabel 3.2 : Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga Berdasar Kecamatan	54
Tabel 3.3 : Jumlah Pemeluk Agama di Kota Mataram Tahun 2010	56
Tabel 3.4: Data Sebaran Tempat Peribadatan	57
Tabel 3.5: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram Tahun 2008 - 2010	61
Tabel 3.6: Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Mataram	63
Tabel 3.7: Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2009	65
Tabel 3.8: Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Pendidikan	66
Tabel 3.9: Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kesehatan	67
Tabel 5.1: Persepsi Warga terhadap Kamtibmas	142

1

Prolog

Seangkaian konflik dan kerusuhan sosial yang marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini merupakan fakta sosial yang sangat mengkhawatirkan. Hampir semua media massa baik cetak maupun elektronik, dihiasi oleh beragam konflik sosial. Konflik bernuansa kekerasan tersebut berlangsung secara horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal mewujud dalam bentuk konflik komunal antar kelompok masyarakat, sedangkan konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau aparat keamanan. Konflik-konflik ini seolah membalikkan adagium lama yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun dan lebih mementingkan harmoni ketimbang kekerasan.

Sejumlah konflik komunal tersebut bahkan kental dengan aroma pertentangan yang melibatkan identitas suku, agama, ras dan adat istiadat (SARA). Banyak orang bertanya mengapa kondisi bangsa ini yang dulu dikenal toleran, ramah, dan lebih mementingkan harmoni, kini mudah sekali marah dan tak jarang menggunakan kekerasan

sebagai cara menyelesaikan perselisihan. Adakah fenomena ini terkait dengan persoalan yang boleh jadi menyangkut konstruksi kebangsaan kita.¹ Mengingat konflik-konflik sosial tersebut bukan hanya sangat mengganggu stabilitas nasional, tetapi juga berpotensi mengancam integrasi bangsa. Komunitas kebangsaan yang diangankan sebagai sebuah bangunan solid dapat saja berubah menjadi hanya sebatas komunitas imajiner.²

Melalui analisa yang lebih mendalam, munculnya berbagai konflik komunal di negeri ini di antaranya disebabkan oleh mulai melemahnya ikatan antar warga³ dan menguatnya politik identitas berbasis etnis dan agama.⁴ Salah satu indikator menguatnya identitas keagamaan adalah adanya fenomena kontestasi simbol agama di ruang publik. Dengan demikian, konflik-konflik sosial boleh jadi sangat terkait dengan rendahnya budaya kewargaan (*civic culture*).⁵

Civic culture atau budaya kewargaan adalah unsur terpenting dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia. *Civic culture* yang

¹ Jack Bertrand, dalam penelitiannya menyebut bahwa berbagai konflik yang muncul di Indonesia sangat terkait dengan konstruksi kebangsaan. Konflik-konflik tersebut bukan disebabkan oleh persoalan pembagian kekuasaan yang dianggap timpang, atau distribusi ekonomi yang diperebutkan tetapi sangat terkait dengan persoalan kebangsaan Indonesia yang menurutnya belum tuntas. Selengkapnya lihat, Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2004)

² Lihat Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London and New York: Verso, 1991), 5-7.

³ Dengan mengambil kasus di negara lain, salah satu penyebab mengapa sebuah wilayah mudah sekali terjadi konflik adalah akibat melemahnya ikatan antar warga baik yang bersifat formal asosiasional maupun ikatan informal yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya lihat Ashutosh Varshney, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India* (New Haven and London: Yale University Press, 2002).

⁴ Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat di Ashutosh Varshney at.al., "Pattern of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)", UNSFIR (United Nation Support Facility for Indonesian Recovery) Jakarta: Report UNSFIR, 2004; 25-27. CA., Coppel, , ed. *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*. (London: Routledge, 2005).

⁵ Hisyam, Muhammad dkk., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2007).

merefleksikan kesadaran individu maupun masyarakat sebagai warga negara berperan penting bagi upaya menjaga kohesivitas di tingkat lokal sekaligus memupuk integrasi bangsa secara nasional. Menguatnya *civic culture* di suatu masyarakat memungkinkan berbagai pertentangan dan konflik dapat dikelola secara proporsional sehingga tidak meledak menjadi kerusuhan komunal yang terus berulang. *Civic culture* yang berlangsung di masyarakat akan sangat menentukan tingkat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta kualitas demokrasi suatu daerah.⁶

Keberadaan *civic culture* semakin urgen terutama di daerah-daerah yang sangat plural baik dari sisi etnis maupun agama. Apalagi jika tata letak pemukiman warga tersebut tersegregasi secara etnis dan agama seperti di Kota Mataram Lombok NTB.⁷ Di Mataram, khususnya di wilayah kecamatan Cakranegara, memang terdapat sejumlah perkampungan yang tertata secara mengelompok berdasarkan etnis dan agama. Seperti di Lingkungan Sindu, Tohpati, Karang Lelede, Karang Jasi di mana mayoritas penduduknya berasal dari etnis Bali beragama Hindu yang berdampingan dengan pemukiman etnis Sasak yang Islam seperti Lingkungan Karang Taliwang, Nyangget dan Karang Tapen. Tata letak pemukiman tersebut tersusun secara rapi dalam blok-blok dengan jalan-jalan berpola bidak catur (*grid pattern*).

Pola pemukiman penduduk yang mengelompok berdasar etnis dan agama di wilayah Mataram dan sekitarnya merupakan peninggalan kerajaan Karang Asem Bali yang menguasai Lombok

⁶ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993); Francis Fukuyama, *Trust: The Social Capital and Civil Virtues and The Creation of Prosperity* (New York: The Free Press, 1995); Norman Uphoff, "Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation", *Paper* pada Staff seminar, Manholt Institute, Wageningen, 13 September 2000.

⁷ Lihat Handinoto, "Pola Spasial dan Sistem Jalan dari Kota Cakranegara dan Probolinggo, Sebuah Perbandingan", *Dimensi Teknik Arsitektur* vol. 27, no. 2, Desember 1999: 21 - 30.

selama kurang lebih satu setengah abad; 1740-1894.⁸ Dalam rentang cukup panjang relasi sosial yang terbangun antara komunitas Hindu Bali dan Muslim Lombok terkadang berlangsung secara harmonis, dan tak jarang berjalan dalam konflik penuh ketegangan.⁹

Konflik antar keduanya berlangsung dalam beberapa bentuk mulai dari berkembangnya *prejudice dan stereotyping*,¹⁰ menguatnya kontestasi simbol-simbol keagamaan di ruang publik hingga munculnya sejumlah kerusuhan. Beberapa kerusuhan yang pernah terjadi misalnya kasus kerusuhan antara warga muslim Karang Taliwang dengan warga Hindu dari Sindu (tahun 1996, 2001), Kampung Nyangget dengan Saksari (tahun 2000, 2002, 2008), Lingkungan Karang Tapen dengan Karang Jasi dan Karang Lelede (tahun 1996, 2003, 2004) hingga perusakan pura Sangkareang Narmada (tahun 2008) dan yang baru saja terjadi di tahun 2012 ketegangan antara warga di Gubug Mamben Sekarbela Mataram. Berbagai kontestasi, ketegangan dan kerusuhan ini jelas akan memengaruhi harmoni sosial secara umum dan memengaruhi kualitas hubungan antar umat beragama.

⁸ Lihat Fathurahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998). Alfons van der Kraan, *Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940* (Singapore: Heinemann Educational Books Asia, 1980).

⁹ Kari Telle, "Dharma Power: Searching for Security in Post-New Order Indonesia" dalam *Contemporary Religiosities: Emergent Socialites and the Post-Nation State* Bruce Kapferer, Kari Telle dan Annelin Eriksen (editor). New York: Bergham Books, 2010; 141-156; Sven Cederroth, *The Spell of The Ancestors and The Power of Mekkah: A Sasak Community on Lombok*. Goteborg Sweden: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981; Djalaluddin Arzaki dkk., *Nilai-nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak dalam Pluralisme Bermasyarakat*. (Mataram: Pokja Redam NTB, 2001); Fleur Fallon, "Conflict, Power and Tourism on Lombok", *Current Issues in Tourism*, Vol. 4, No. 6, (2001); 481-502.

¹⁰ Kajian mengenai stereotip dan prasangka, lihat Endang Kironosasi W, *Stereotipe dan Prasangka dalam Interaksi Antar Kelompok: Studi Komunikasi Antar Budaya Suku Bangsa Bali dan Suku Bangsa Sasak di Shindu, Kotamadya Mataram Lombok Barat*, Penelitian (Jakarta : Program Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial, 1996).

Oleh karena itu penting untuk dikaji berbagai hal yang berpengaruh terhadap munculnya kerawanan sosial dengan melihat ikatan kewargaan yang terbangun di Mataram khususnya pada komunitas Hindu dan Muslim. Ikatan kewargaan (*civic engagement*) sebagai bagian dari *civic culture* sebagaimana diungkap Varshney (2002) berperan signifikan dalam menjaga harmoni sosial masyarakat Hindu dan Muslim. Keberadaan komunitas Muslim dan Hindu sebagai kelompok mayoritas pertama dan kedua di Mataram ini sangat berpengaruh pada kehidupan sosial dan keagamaan secara umum di wilayah ini. Oleh karena itu, kajian yang mendalam tentang *civic culture* pada dua komunitas ini, bukan hanya merupakan kajian menarik tetapi juga sangat penting.

Berangkat dari paparan di atas ada beberapa hal penting yang layak untuk diangkat menjadi masalah penelitian, yaitu: a) Bagaimana *civic culture* berlangsung pada komunitas Hindu dan Muslim di Kota Mataram? b) Bagaimana potret kontestasi simbol keagamaan di ruang publik di Kota Mataram berlangsung? c) Apakah penguatan simbol-simbol keagamaan di ruang publik tersebut mengancam *civic culture* yang sedang berlangsung?

Penelitian ini difokuskan untuk mengelaborasi budaya kewargaan (*civic culture*) dan kontestasi simbol keagamaan pada komunitas Hindu dan Muslim di Kota Mataram. Unsur-unsur *civic culture* yang akan diungkap meliputi partisipasi aktif, solidaritas, sikap saling percaya, toleransi, terlembagakannya norma resiprositas, ekualitas, dan *social networking*. Khusus unsur yang terakhir, kajian akan difokuskan pada aspek asosiasi yang bersifat *bridging* (menjembatani) antar kelompok Hindu dan Muslim maupun asosiasi yang bersifat *bonding* (hanya mengikat) ke dalam internal kelompok.

Adapun kontestasi keagamaan dibatasi pada fenomena menguatnya simbol-simbol keagamaan di ruang publik di Mataram baik secara langsung seperti terlihat dari pembangunan fisik kota maupun melalui fenomena munculnya kebijakan daerah yang diduga kuat sarat dengan muatan ideologis agama. Termasuk dalam konteks ini adalah maraknya simbol keagamaan di jalan-jalan protokol, gedung pemerintah hingga area sekolah negeri di Kota Mataram.

Bentuk penguatan simbol keagamaan bermacam-macam mulai dari pemasangan kaligrafi Arab (merekpresentasikan simbol Islam) atau pembuatan ukiran atau bangunan khas Bali (merekpresentasikan Hindu) di jalan protokol, gedung pemerintah atau di sekolah umum negeri hingga pembangunan pura atau musala di sekolah-sekolah umum negeri maupun gedung-gedung pemerintah.

Secara **akademik**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama bidang; sosiologi agama, pendidikan kewargaan (*civic education*); agama dan studi perdamaian, serta *political science*. Sedangkan secara **praktis**, hasil penelitian dimaksudkan dapat memberi sumbangan bagi upaya-upaya memperkuat budaya kewargaan dan demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, karena basis penguatan budaya kewargaan ini adalah komunitas beragama, maka dengan sendirinya akan membantu meningkatkan kualitas hubungan dan kerukunan antar umat beragama.

Salah satu kajian mengenai budaya kewargaan adalah penelitian tim LIPI mengenai Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Wilayah Aman Konflik.¹¹ Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa di daerah-daerah aman konflik ditemukan derajat budaya kewargaan yang tinggi. Sebaliknya pada daerah-daerah yang rawan konflik, ditemukan budaya kewargaan yang berderajat rendah. Hanya saja, mengingat kajian ini hanya terfokus pada komunitas Islam, maka hasilnya belum bisa digunakan untuk melihat komunitas lain secara lebih luas.

Khusus relasi antara Hindu dan Muslim, Ashutosh Varshney (2002) mensurvei 6 kota di India; tiga kota tempat rawan konflik (Hyderabad, Ahmedabad, Aligarh) dan tiga kota aman konflik (Lucknow, Calicut, Surat). Varshney berkesimpulan bahwa kohesi atau integrasi antara Hindu dan Muslim dapat terjadi ketika ada keterlibatan warga (*civic engagement*) dalam organisasi kewargaan. Konflik jarang terjadi ketika orang-orang Hindu dan muslim terlibat

¹¹ Muhammad Hisyam, dkk., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2007).

dalam kerjasama di berbagai sektor dalam ikatan warga yang kuat.¹²

Lebih lanjut Varshney membedakan dua jaringan ikatan warga, yaitu ikatan warga "asosiasional" dan ikatan warga "kuosidian" (*quotidian*). Ikatan asosiasional adalah perkumpulan warga lintas etnis seperti asosiasi-asosiasi bisnis, kelompok-kelompok profesional, partai politik, klub olahraga dan lain-lain. Sedangkan ikatan kuosidian adalah ikatan sederhana yang bersifat rutin, tetapi tidak terkoordinasi secara organis. Kegiatan-kegiatan yang terkategori dalam ikatan jenis ini misalnya aktivitas saling mengunjungi antara satu warga dengan yang lain, sering makan bersama, pergi pesta bersama, serta membiarkan anak-anak bermain dengan tetangga dari etnis kelompok lain. Kedua ikatan ini jika kuat terpelihara akan mampu menjaga harmoni sosial, tetapi jika tidak berlangsung secara baik, maka akan berpotensi meyulut kekerasan komunal. Dari dua ikatan ini, lanjut Varshney, ikatan asosiasional terbukti lebih kuat dibanding ikatan kuosidian terutama ketika menghadapi polarisasi yang dilakukan politisi.

Mengingat perbedaan konteks penelitian yang dilakukan Varshney, tentu saja tidak semua metode dan hasil tersebut secara otomatis dapat digunakan untuk memotret kondisi Hindu dan Muslim di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan penelitian dengan obyek lokal. Penelitian yang secara khusus membahas hubungan Hindu-Muslim di Mataram dilakukan oleh Mustain dan Mukhlis (2003). Penelitian yang melihat pola integrasi sekaligus konflik antara dua komunitas keagamaan di Kota Mataram ini menyimpulkan bahwa secara teologis tidak ditemukan ajaran dalam agama Hindu yang mendorong pemeluknya melakukan konflik dengan penganut agama lain. Bahkan yang ada justru ajaran yang mendorong pemeluknya ke arah integrasi. Hal ini dapat dikenali lewat ungkapan "*tat twam asi*". Sebaliknya dalam ajaran agama Islam dijumpai banyak ayat yang -jika dipahami secara rigid dan tekstual- dapat memicu dan mendorong

¹² Ashutosh Varshney, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India* (New Haven and London: Yale University Press, 2002).

terjadinya ketegangan dan konflik dengan kelompok lain.¹³

Kritikan atas penelitian ini antara lain terlalu dominannya kajian pada aspek doktrin agama *ketimbang* realitas sosial yang melingkupi hubungan antar dua komunitas. Meskipun ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini (kajian teologis dan sosial budaya atas munculnya konflik dan integrasi), namun elaborasi secara lebih luas mengenai hubungan sosial budaya sangat kurang bila dibanding dengan kajian dari aspek normatif-teologis. Padahal dalam interaksi sosial yang kompleks faktor agama hanyalah salah satu di antara sekian banyak faktor yang memengaruhi proses interaksi sosial tersebut.

Terkait dengan penguatan simbol keagamaan di ruang publik, dua penelitian terbaru menarik untuk dibaca misalnya penelitian tim CSRC berjudul *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*.¹⁴ Ada tiga permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini; pertama, apa dan bagaimana konstruksi Islam di ruang publik di Indonesia? Kedua, seberapa dominankah Islamisme menguasai wacana dan simbol di ruang publik dan seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat yang terpapar olehnya? Ketiga, sejauh mana kehadiran Islam di ruang publik dewasa ini berpengaruh terhadap masa depan demokrasi di Indonesia?

Penelitian ini menemukan ada dua isu utama yang menonjol dalam penguatan agama di ruang publik yakni; (1) isu keyakinan mendasar yang meliputi aqidah, ibadah, akhlak, makanan halal dan hukum keluarga. (2) isu-isu sosial politik dan ekonomi Islam. Isu pertama pertama lebih dominan dibanding isu yang kedua. Media yang digunakan untuk pemaparan Islam di ruang publik meliputi pengeras suara di masjid, pengajian umum, media cetak maupun

¹³ Mustain dan Mukhlis. "Hubungan Hindu Muslim di Kota Mataram (Kajian Potensi Integrasi dan Konflik dalam Hubungan antar Agama)". Laporan Penelitian Lemlit STAIN Mataram, 2003

¹⁴ Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar, eds, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2011).

elektronik dan media lain seperti buku, pemasangan spanduk, *sticker*, baliho yang diletakkan di tempat-tempat publik.

Aktor yang terlibat dalam kontestasi simbol keagamaan di ruang publik terdiri dari dua kelompok besar yakni kelompok Islam kultural dan Islam politik (Islamisme). Sejauh ini, kelompok Islam kultural lebih dominan dan diminati oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Anggota masyarakat Muslim yang intens dalam menyokong Islamisme hanya sebesar 5%.¹⁵ Namun demikian, para peneliti ini juga menemukan bahwa agresivitas dan intensitas para pegiat Islam politik dalam mengusung Islam pada ranah publik menjadikan dukungan masyarakat Muslim terhadap kelompok ini ternyata terus mengalami peningkatan.

Sedangkan menyangkut persoalan ketiga tentang korelasi antara apakah ekspresi Islam di ruang publik mengancam demokrasi atau tidak, riset ini menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim Indonesia setuju dengan sistem demokrasi. Indikatornya antara lain tingginya partisipasi masyarakat muslim dalam pemilu, penerimaan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga menurut riset ini, penetrasi simbol-simbol Islam di ruang publik sejauh ini tidak menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia.

Pertanyaan yang dapat diajukan terhadap hasil penelitian di atas antara lain adalah demokrasi dalam bentuk apa yang tidak terpengaruh oleh penetrasi Islam di ruang publik? Demokrasi dalam pengertian prosedural atau demokrasi substansif? Jika ternyata demokrasi yang dimaksud masih sebatas demokrasi prosedural maka sebetulnya hal itu masih menyimpan sejumlah persoalan. Dukungan terhadap demokrasi prosedural sering terperangkap dalam jebakan demokrasi (*democracy trap*). Massa mayoritas menggunakan demokrasi untuk sebisa mungkin mendesakkan keinginannya. Demokrasi semacam ini selain mengancam esensi dan semangat

¹⁵ Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar, eds, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2011).

demokrasi itu sendiri juga akan menggiring aktor pendukungnya atau pemenang demokrasi untuk sebisa mungkin mengambil semuanya (*the winner takes all devices*). Inilah yang kemudian dikenal dengan tirani mayoritas. Sesuatu yang bukan menjadi unsur utama budaya kewargaan.

Salah satu unsur utama budaya kewargaan sebagaimana dipaparkan di awal tulisan ini adalah aspek kesetaraan (*equalitas*), kesamaan akses terhadap semua fasilitas publik. Karena itu diperlukan pengkajian lebih mendalam mengenai seberapa tinggi derajat budaya kewargaan di kalangan umat beragama. Faktor agama penting dilihat mengingat di masyarakat Indonesia, agama memainkan peran penting bagi warga negara dalam praksis kehidupan personal maupun sosial.

Penelitian ini sengaja memfokuskan pada aspek pengembangan budaya kewargaan yang berlangsung pada komunitas Hindu dan Muslim di kota Mataram. Pilihan kedua komunitas ini didasarkan pada kenyataan bahwa kedua komunitas ini merupakan dua kelompok etnis dan keagamaan terbesar di Kota Mataram (data BPS NTB 2010). Sehingga relasi antar keduanya (baik dalam bentuk kontestasi maupun integrasi) akan sangat berpengaruh pada pola relasi masyarakat multikultur secara umum di Kota Mataram bahkan di pulau Lombok. Selain itu, keberadaan komunitas Hindu Bali di Lombok memiliki sejarah yang unik. Perjumpaan (*encounter*) antara komunitas Hindu Bali dengan Sasak Islam yang diawali dengan peperangan dan penaklukan telah memengaruhi relasi sosial antar keduanya di masa kini. Latar historis ini juga berpengaruh pada pembentukan dan pengembangan budaya kewargaan di dua komunitas ini.

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan model ini lazim disebut *triangulation of research*, atau *blending or mixing qualitative and quantitative*.¹⁶

¹⁶ R. Murray Thomas, *Blending Qualitative & Quantitative Research Methods in Theses and Dissertations* (Thousand Oaks, California: Corwin Press, Inc., 2003) atau lihat juga, Julia Brannen, *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research* (Ver-
mont: Avebury, 1992).

Pendekatan campuran yang menjadi rujukan banyak ahli ini sengaja dipilih untuk melihat persoalan sosial secara lebih komprehensif.

Pendekatan *qualitative* digunakan untuk melihat *civic culture* pada komunitas Hindu Muslim secara holistik dan mendalam baik secara diakronik maupun sinkronik. Dengan pendekatan kualitatif, data digali melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi terlibat (*participant observation*), dan *Focus Group Discussion* (FGD). Melalui cara ini akan tergali pemahaman keagamaan baik pada komunitas Hindu maupun Muslim terutama terkait dengan budaya kewargaan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Informan kunci yang akan menjadi subyek penelitian di antaranya para Tuan Guru, Pedanda, Ustadz, Mangku, akademisi (dari STHN dan IAIN Mataram), pengurus MUI, pimpinan ormas keagamaan (NW, NU Muhammadiyah, PHDI) dan representasi pejabat pemerintah baik di tingkat Kota, kecamatan maupun kelurahan).

Adapun pendekatan kuantitatif dipakai untuk mengukur kadar budaya kewargaan. Indikator yang digunakan untuk menyusun kuisioner berpedoman pada tujuh unsur penting budaya kewargaan yang meliputi partisipasi aktif (*civic engagement*), solidaritas, *interpersonal trust*, toleransi, ekualitas, sosial *networking*, tradisi berasosiasi. Sebaran angket akan dilakukan secara acak dengan sampel yang merepresentasikan komunitas Hindu dan Muslim di Kota Mataram. Sebanyak 120 angket disebar di kota Mataram dengan teknik *multi stage random sampling*. Sejumlah enam kecamatan di kota Mataram selanjutnya dipilih enam desa. Enam desa tersebut selanjutnya dipilih responden yang mewakili kedua komunitas (responden Hindu seperempat dari responden Muslim).

Untuk kepentingan penyusunan kuisioner, penulis mengadopsi dan mengadaptasi jабaran variabel yang dikembangkan Saiful Mujani¹⁷

¹⁷ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat. Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 333 - 340.

dan tim LIPI.¹⁸ Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jabaran Variabel Dependen

No.	Variabel	Indikator
1	<i>Civic engagement</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ikut memikirkan dan aktif memantau kinerja pemerintah Partisipasi dalam pembuatan keputusan asosiasi Terlibat dalam proses konsultasi menyangkut kebijakan pemerintah Keterlibatan dalam mendiskusikan program dan keputusan asosiasi Keterlibatan dan partisipasi dalam perayaan hari besar nasional
2	Solidaritas	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perasaan senasib-sepenanggungan Membantu anggota masyarakat lain yang memerlukan pertolongan Mengembangkan konsep persaudaraan di antara anggota masyarakat Pemberdayaan program <i>charity</i> (ZIS dalam Islam, <i>yadnya</i> dalam Hindu)
3	<i>Interpersonal trust</i>	<ul style="list-style-type: none"> Rasa saling percaya terhadap anggota masyarakat lain Memberi kesempatan yang sama bagi orang lain untuk menjadi pemimpin tanpa memandang perbedaan agama Saling berkunjung, tukar makanan, dengan warga yang lain Beribadah dengan orang lain tanpa melihat perbedaan aliran dalam agama Bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban

¹⁸ Muhammad Hisyam, dkk., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2007).

4	Toleransi	<ul style="list-style-type: none"> Menghargai keberadaan kelompok yang berbeda Mengucapkan selamat pada hari-hari besar agama keagamaan Pengakuan dan penghormatan tradisi yang dimiliki dan dilakukan kelompok lain Menghormati dan menjaga tempat-tempat ibadah milik komunitas lain Tidak melaksanakan kegiatan keagamaan yang mengganggu kelompok lain
5	Ekualitas	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kesamaan dalam akses terhadap lembaga hukum, lembaga pendidikan, parlemen, kesempatan memperoleh pekerjaan dan akses terhadap fasilitas publik yang lain tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain yang berbeda agama
6	<i>Sosial Networking</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kesediaan menjalin hubungan dengan kelompok lain Sumber informasi atas aktivitas organisasi di luar kelompok sendiri Pengaruh organisasi terhadap kebijakan pemerintah Kaitan program organisasi dengan program pemerintah
7	Tradisi berasosiasi	<ul style="list-style-type: none"> Kesediaan mengembangkan asosiasi baik secara formal-asosiasional maupun informal/<i>quotidian</i> Organisasi ini bersifat menjembatani kebekuan hubungan antar kelompok Mengembangkan organisasi untuk penguatan dan pemberdayaan komunitas Keterlibatan dalam organisasi politik

Sedangkan variabel independen dalam survei ini sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Jabaran Variabel Independen

No	Variabel	Indikator
1	Teks; dalam survei ini dimaksudkan sebagai pemahaman keagamaan yang menjadi dasar bagi keyakinan, pengamalan ritual dan kehidupan sosial responden	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek keyakinan meliputi; Kepercayaan pada Tuhan, agama sebagai <i>world view</i>, agama memandu seseorang sebagai makhluk individu maupun sosial, keyakinan akan adanya <i>reward</i> dan <i>punishmen</i>, perasaan dekat dengan Tuhan • Aspek pengamalan ritual; Pelaksanaan rukun Islam bagi muslim dan pengamalan <i>tri sandya</i> dalam komunitas Hindu • Konsekuensi Sosial; Dukungan pada implementasi hukum-hukum agama dalam ranah publik, dukungan terhadap organisasi dan partai-partai berbasis agama, penerapan ajaran agama dalam praksis sosial
2	Kajian Konteks: dalam survei ini dimaksudkan sebagai kondisi atau keadaan demografi, sosial, politik, ekonomi responden	<ul style="list-style-type: none"> • Umur • Jenis kelamin • Jenjang pendidikan • Pekerjaan • Penghasilan • Afiliasi politik • Afiliasi pada ormas keagamaan

Adapun alur analisis data meliputi; reduksi data, penyajian (*display*) data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Moleong, 2000). Melalui pendekatan kualitatif, analisa data dilakukan sejak kali pertama data dikumpulkan dan memandu proses penggalian data berikutnya. Sementara data-data kuantitatif mengenai derajat budaya kewargaan dengan sendirinya digunakan untuk membantu mempertajam analisa.

Secara keseluruhan, laporan penelitian ini terdiri dari enam bab; bab satu (pendahuluan) hingga bab enam (penutup). Setelah paparan bab pertama ini, dilanjutkan bab kedua yang berisi tentang kajian teori. Sejumlah konsep kunci diulas di bagian ini seperti konsep *civic culture* beserta unsur-unsurnya. Kajian teori ini juga dilengkapi dengan bahasan mengenai budaya kewargaan pada komunitas beragama. Sejumlah perdebatan sarjana mengenai ada tidaknya pengaruh agama dalam pembentukan dan perkembangan budaya kewargaan didiskusikan di bagian ini. Bab dua ini diakhiri dengan tinjauan mengenai demokrasi dan kontestasi simbol agama di ruang publik.

Bab tiga berisi tentang profil Kota Mataram. Deskripsi ini penting disampaikan untuk melengkapi pembacaan yang komprehensif mengenai kondisi kota yang menjadi lokasi penelitian ini. Hal-hal penting yang dipaparkan di bab ketiga ini antara lain sekilas sejarah berdirinya kota Mataram, topografi dan kependudukan, sosial keagamaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik.

Bab keempat berisi temuan riset dan analisa mengenai potret budaya kewargaan pada komunitas Muslim dan Hindu. Tujuh unsur penting budaya kewargaan dijadikan indikator untuk menilai derajat budaya kewargaan pada dua komunitas beragama di Kota Mataram ini. Ketujuh unsur itu adalah partisipasi aktif, solidaritas, sikap saling percaya, toleransi, norma resiprositas, ekualitas, jaringan sosial dan tradisi berasosiasi.

Bab kelima menjelaskan sekaligus mendiskusikan hasil riset mengenai kontestasi simbol keagamaan di ruang publik. Bab kelima ini menarik karena di bagian ini dideskripsikan ragam bentuk kontestasi simbol keagamaan yang berlangsung antara komunitas Hindu dan Muslim. Kontestasi simbol keagamaan tersebut mewujud dalam bentuk fisik maupun kontestasi di ranah birokrasi pemerintahan. Dalam bab lima ini juga dipaparkan respons terhadap fenomena kontestasi simbol keagamaan tersebut. Kajian di bagian ini diakhiri dengan menampilkan temuan riset mengenai kaitan antara agama dan demokrasi. Hasil riset menunjukkan bahwa ada tidaknya dukungan terhadap demokrasi tidak hanya semata soal kompatibilitas antara

tradisi agama dengan demokrasi melainkan melibatkan banyak hal seperti tingkat keamanan warga, perbaikan ekonomi dan kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Bab terakhir merupakan penutup. Di bab ini dipaparkan hal-hal penting yang menjadi kesimpulan penelitian ini.

2

Civic Culture, Pluralitas dan Demokrasi

Civic culture sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya menjadi modal sosial penting bagi suatu masyarakat untuk meraih kebahagiaan bersama. Untuk menelaah secara lebih mendalam mengenai budaya kewargaan tersebut, pada bab ini akan dipaparkan konsepsi dan unsur-unsur penting budaya kewargaan serta keterkaitannya dengan demokrasi. Sebagian sarjana meyakini bahwa budaya kewargaan merupakan hasil dari sistem demokrasi yang stabil di suatu wilayah. Sementara sarjana yang lain meragukannya. Beberapa temuan terkini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bahwa stabilitas demokrasi dengan serta-merta memberi pengaruh positif bagi tumbuhnya budaya kewargaan. Dua wilayah yang nyata-nyata menerapkan sistem demokrasi yang sama, sistem pemilu yang sama ternyata bisa menghasilkan derajat kewargaan yang berbeda.

Sejumlah sarjana yang lain berpendapat bahwa budaya kewargaan sangat dipengaruhi oleh tradisi agama. Perbedaan

tradisi agama memberi pengaruh terhadap perbedaan kualitas budaya kewargaan. Pertanyaannya, manakah di antara faktor-faktor tersebut yang memberi pengaruh kuat terhadap berkembangnya budaya kewargaan. Apakah budaya kewargaan merupakan buah dari sistem demokrasi atau sebaliknya demokrasi justru stabil karena berkembangnya budaya kewargaan? Sebelum mengkaji berbagai persoalan ini, berikut dipaparkan penjelasan mengenai konsep dan unsur-unsur budaya kewargaan.

Civic Culture: Definisi dan Konsepsi

Civic culture atau budaya kewargaan didefinisikan sebagai seperangkat nilai dan tingkah laku yang mencerminkan kesadaran individu maupun masyarakat sebagai warga Negara yang baik. Konsep *civic culture* secara meluas sejak diperkenalkan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketika keduanya meneliti kaitan antara budaya kewargaan dan demokrasi di lima negara yaitu Amerika Serikat, Jerman, Meksiko, Italia dan Inggris. Budaya kewargaan menurut keduanya bersifat pluralistik, dan didasarkan pada komunikasi dan persuasi, sebuah budaya yang memungkinkan perubahan tetapi berlangsung secara moderat.¹ Lebih lanjut menurut keduanya, *civic culture* sebagai seperangkat nilai umum dan sikap yang dibagi di antara para warga, dapat diformulasikan sebagai hubungan antara politik di tingkat mikro dan makro.²

Karya Almond dan Verba ini lebih komprehensif dan sistematis dalam mengelaborasi *civil culture* dibanding karya kesarjana lain

¹ Selengkapnya lihat Gabriel Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton: Princeton University Press, 1963), 8.

² Dalam konsepsi kedua, *civic culture* biasa juga disebut sebagai *political civic culture* yang ditandai oleh dua hal utama yaitu "penerimaan atas otoritas negara" dan "partisipasi pada tugas-tugas warga". Selengkapnya lihat, Gabriel Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture* ..., 33.

semisal *The Third Wave*-nya Huntington atau *Islam dan Democracy*-nya Kedouri. Karya Almond dan Verba ini selanjutnya banyak menjadi rujukan bagi para peneliti tentang *civic culture* berikutnya terutama pada penelitian tentang tradisi demokrasi dengan pendekatan budaya politik.³

Civic culture atau *culture citizenship* sepadan dengan istilah *civic community*⁴, merupakan budaya yang merujuk pada kesadaran setiap warga negara untuk bersedia mengembangkan sikap dan perilaku penuh keadaban yang ditandai oleh *trust* di antara warga dan *civic engagement* atau kesediaan melakukan kerjasama kolektif.⁵ Budaya kewargaan merupakan modal sosial (*sosial capital*) yang berkontribusi bagi berlangsungnya kemajuan suatu masyarakat. Semakin kuat budaya kewargaan suatu masyarakat berarti semakin kuat modal sosial yang dimilikinya. Semakin kuat modal sosial berarti semakin potensial suatu masyarakat meraih kesuksesan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Budaya kewargaan merupakan prasyarat bagi terbangunnya harmoni sosial.

Konsep budaya kewargaan biasanya dihadapkan dengan masyarakat yang tidak berbudaya kewargaan (*uncivic culture*). Mengenai hal ini Putnam menyebut ada dua jenis lingkaran yakni lingkaran kebajikan (*virtues circle*) dan lingkaran setan (*vicious circle*). Lingkaran kebajikan ditandai oleh adanya kerjasama sosial yang tinggi, saling percaya, resiprositas, partisipasi dan keterlibatan warga untuk meraih kebaikan bersama. Sementara lingkaran yang disebut kedua adalah kebalikan dari lingkaran pertama. Lingkaran ini ditandai oleh rendahnya kesediaan untuk melakukan kerjasama, pengkhianatan, saling curiga, menutup diri, eksploitasi dan berbagai

³ Saiful Mujani *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 3.

⁴ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993).

⁵ Muhammad Hisyam, dkk., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2007).

tindakan saling mendominasi. Berbagai sikap dan perilaku negatif inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut *uncivic culture*. Kondisi seperti ini pada gilirannya akan menghambat perkembangan demokrasi sekaligus kemajuan ekonomi suatu masyarakat.

Kualitas demokrasi dan kemajuan ekonomi di suatu daerah sangat terkait dengan tinggi atau rendahnya budaya kewargaan yang berlangsung di masyarakat. Semakin tinggi derajat budaya kewargaan, akan semakin baik kualitas kehidupan sosial di masyarakat tersebut.⁶ Budaya kewargaan juga menyumbang terbentuknya harmoni sosial di antara warga. Survei yang dilakukan tim LIPI menunjukkan adanya kaitan antara tingginya budaya kewargaan dengan kondisi damai di suatu masyarakat. Di daerah-daerah aman ditemukan derajat kewargaan yang tinggi. Sebaliknya, di daerah-daerah yang tergolong rawan konflik ditemukan derajat budaya kewargaan yang rendah.⁷

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa budaya kewargaan merupakan kesadaran setiap individu warga negara yang bersedia mengembangkan sikap dan perilaku penuh keadaban. Perilaku penuh keadaban ini ditandai dengan sikap saling percaya antar warga, keterlibatan sosial, toleransi, solidaritas dan kesediaan melakukan kerjasama kolektif.

Ragam Unsur Civic Culture

Untuk melihat tinggi dan rendahnya budaya kewargaan dapat dilakukan dengan mengkaji sikap dan perilaku warga atas sejumlah unsur penting budaya kewargaan. Setidaknya ada tujuh unsur penting budaya kewargaan yaitu, partisipasi aktif, solidaritas, sikap

⁶ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993); Norman Uphoff, "Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation", *Paper* pada Staff seminar, Manholt Institute, Wageningen, 13 September 2000.

⁷ Muhammad Hisyam, dkk., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2007).

saling percaya, toleransi, terlembagakannya norma resiprositas dan ekuualitas, *social networking* dan tradisi berasosiasi untuk meraih kebaikan bersama.⁸

Ketujuh unsur budaya kewargaan ini sangat terkait dengan tingkah laku demokratis. Saiful Mujani menyebut budaya dan tingkah laku demokratis dipahami sebagai bergabungnya sejumlah unsur: yaitu keterlibatan kewargaan yang bersifat sekuler (*secular civic engagement*), sikap saling percaya sesama warga (*interpersonal trust*), toleransi, keterlibatan politis (*political engagement*), dukungan terhadap sistem demokrasi dan partisipasi politik (*political participation*).⁹ Berikut dipaparkan penjelasan mengenai ketujuh unsur budaya kewargaan dengan berbagai indikator pengukurannya.¹⁰

Partisipasi aktif merupakan kesediaan warga untuk terlibat dalam proses politik dan secara aktif memberikan kontrol bagi pelaksanaan pemerintahan yang sedang berlangsung. Mekanisme kontrol dapat diberikan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga demokratis yang telah disepakati bersama. Dalam bentuknya yang sederhana partisipasi warga dapat dilihat misalnya dari partisipasi mereka dalam pemberian suara saat pemilihan umum, pemilihan pemimpin baik lokal maupun nasional, memberikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Partisipasi warga merupakan elemen penting bagi berlangsungnya sebuah proses demokrasi. Sebaliknya ketiadaan partisipasi warga atau biasa disebut apatisme warga berakibat kurang atau hilangnya dukungan warga terhadap demokrasi. Rendahnya dukungan warga pada gilirannya sangat membahayakan keberlangsungan sebuah pemerintahan.

⁸ Hisyam, dkk., *Budaya Kewargaan ...*, 21.

⁹ Saiful Mujani *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 5.

¹⁰ Perlu disebutkan bahwa indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan perpaduan atau lebih tepatnya modifikasi dari peneliti sebelumnya seperti penelitian Saiful Mujani dalam bukunya yang berjudul *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* dan hasil penelitian tim LIPI yang terdapat dalam buku *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik*. Alasan utama modifikasi atas kedua sumber ini didasarkan adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat Hindu dan Muslim di kota Mataram.

Partisipasi aktif merupakan bagian dari budaya politik partisipan yang dapat dipahami sebagai seberapa jauh seorang warga negara secara psikologis terlibat dalam politik.¹¹ Partisipasi secara sederhana dapat dilihat dari kepedulian warga terhadap urusan atau persoalan publik. Kepedulian warga atas berbagai persoalan publik merupakan sesuatu yang urgen karena ia akan menjadi modal bagi munculnya kontrol terhadap para penyelenggara pemerintahan. Almond dan Verba juga berargumentasi bahwa jika sebuah sistem politik demokrasi yang memberikan kebebasan partisipasi politik bagi warga negaranya, maka budaya politik demokrasi harus terdiri dari kepercayaan, perilaku, norma, persepsi dan partisipasi dukungan.

Secara lebih rinci Mujani (2007) memberi penjelasan mengenai indikator keterlibatan atau partisipasi aktif, yaitu; *pertama*, minat atau ketertarikan pada politik. Termasuk dalam minat tersebut adalah keingintahuan warga terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Hasil survei tahun 2001 dan 2002 yang dilaporkan Mujani menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan warga negara Indonesia terhadap urusan politik hanya sekitar 25%. Angka ini jauh lebih rendah dari laporan *World Value Survei* tahun 1990-an yang mencapai 36%.¹²

Kedua, Kedekatan dengan partai politik tertentu. Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi modern mutlak adanya. Sangat sulit dibayangkan sebuah sistem demokrasi dapat berlangsung secara baik tanpa adanya keterlibatan partai politik. Indonesia, terutama sejak masa reformasi, telah memiliki banyak sekali partai politik. Kran keterbukaan sebagai buah reformasi telah memungkinkan semua warga secara bebas terlibat dalam berbagai asosiasi termasuk mendirikan, menjadi anggota atau sekedar simpatisan sebuah partai politik. Kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia ini, meskipun kerap menimbulkan gesekan dan konflik di kalangan

¹¹ Mujani *Muslim Demokrat...*, 189-190.

¹² Mujani *Muslim Demokrat...*, 191.

warga, tetapi sebagaimana dicatat banyak ahli partai politik telah berperan penting dalam mengintegrasikan warga.¹³

Ketiga, memiliki informasi politik atau "keterlibatan kognitif". Informasi politik adalah pengetahuan individu mengenai politik. Informasi politik diukur dari sejauh mana individu memiliki pengetahuan mengenai isu-isu politik yang sedang berlangsung.

Keempat, diskusi politik. Melalui diskusi politik, seorang warga dapat terlibat membicarakan atau mengkritisi berbagai isu politik yang sedang berlangsung. Diskusi politik hanya dapat berlangsung ketika kran keterbukaan telah benar-benar tersedia. Suasana diskusi politik selama satu dekade terakhir sangat lumrah terlihat di mana-mana. Namun, kondisi ini tampaknya bukan hal mudah terutama di era orde baru. Kuatnya sistem keamanan negara pada masa itu, tidak memungkinkan setiap warga negara dapat mengadakan atau terlibat dalam diskusi politik secara bebas.

Kelima, efikasi politik. Yang dimaksud dengan efikasi politik adalah persepsi tentang kemampuan seseorang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Efikasi politik merupakan kebalikan dari adanya perasaan terasing dari urusan politik (alienasi politik). Sebuah perasaan ketidakmampuan (*powerless*) dalam upaya mengubah atau ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung. Pada kondisi tertentu jika alienasi politik ini meninggi maka yang bakal muncul adalah apatisisme politik yang meluas.

Apatisme yang meluas akan berakibat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Bangunan demokrasi dalam kondisi yang terancam. Kondisi ini tentu kurang kondusif bagi berkembangnya dukungan masyarakat terhadap sistem pemerintahan suatu negara. Apabila kondisinya berlarut-larut bisa jadi berakibat pada bangkrutnya sebuah rezim pemerintahan.

¹³ Giovanni Sartori, *Parties and Party System: A Framework for Analysis* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).

Unsur budaya kewargaan kedua adalah solidaritas. Solidaritas dimaknai sebagai perasaan penuh empati atas apa yang terjadi pada warga lain tanpa mempertimbangkan asal suku atau agama yang dipeluk. Perasaan solidaritas muncul manakala seseorang memiliki kepedulian yang tinggi sesama warga komunitas. Solidaritas menjadi bagian penting dalam *civic culture*, karena dari sini akan muncul perasaan senasib sepenanggungan.¹⁴

Dalam komunitas beragama, solidaritas biasanya muncul pada kelompok di tingkat internal. Perasaan senasib karena adanya kesamaan keyakinan atau keimanan akan lebih kuat dibanding dengan mereka yang berada di luar kelompok. Banyak contoh mengenai hal ini, di antaranya solidaritas atas apa yang diderita saudara seiman yang dizalimi sebuah rezim, solidaritas terhadap kelompok minoritas yang terancam oleh kelompok mayoritas. Solidaritas terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina yang muncul menguat dari kalangan umat Islam dalam beberapa tahun terakhir merupakan contoh bentuk solidaritas internasional masyarakat Muslim.

Munculnya solidaritas yang didasarkan atas kesamaan nasib saudara seiman merupakan isu yang sangat sensitif. Di Mataram pernah muncul tragedi kerusuhan bernuansa agama pada tahun 2000 sebagai bentuk solidaritas atas penderitaan warga muslim yang ada di Ambon. Solidaritas di tingkat internal sangat mudah dibangkitkan dengan alasan teologis. Sementara solidaritas antar kelompok agama sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk mengungkap sejumlah faktor tersebut, penelitian ini diarahkan terutama pada solidaritas antar kelompok yaitu kelompok Islam dengan Hindu. Beberapa indikator untuk mengukur solidaritas misalnya adanya perasaan senasib sepenanggungan, kesediaan membantu anggota komunitas dan kelompok lain ketika kelompok tersebut membutuhkan pertolongan, memiliki empati terhadap anggota komunitas dan kelompok lain.

¹⁴ Muhammad Hisyam, dkk., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2007)

Tekanan utama dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana anggota masyarakat memiliki solidaritas terhadap orang lain di luar kelompok atau agama yang dianut warga.

Unsur budaya kewargaan selanjutnya adalah rasa saling percaya (*interpersonal trust*). Perasaan saling percaya dimaksudkan sebagai satu sikap yang kemudian ditunjukkan dalam perilaku saling mempercayai antar anggota masyarakat. Sikap saling percaya juga dapat dimengerti sebagai sebuah sikap bahwa orang lain tidak akan mengkhianati hubungan yang dibangun. Dari kepercayaan perorangan kemudian berkembang ke arah kepercayaan antar komunal, kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara. Sikap saling percaya merupakan unsur modal sosial yang paling penting.¹⁵ Tanpa adanya sikap saling percaya sulit dibayangkan munculnya unsur modal sosial berikutnya yakni norma-norma resiprositas dan keterlibatan antar warga (*civic engagement*).

Dalam iklim demokrasi, sikap saling percaya adalah mutlak adanya. Meskipun sering kali dikatakan bahwa dalam dunia politik, kepercayaan merupakan satu kemewahan, tetapi tanpa kepercayaan, yang bakal terjadi adalah politik buruk yang berisi sikap saling curiga dan tindakan saling menjegal. Kajian empiris mengenai hubungan antara *trust* dan demokrasi menunjukkan bahwa ketiadaan *trust* di antara para politisi berakibat melemahnya atau memburuknya kualitas demokrasi. Marvin G. Weinbaum (1996), sebagaimana dikutip oleh Hisyam (2007), memperlihatkan sebuah contoh kasus kegagalan demokrasi di Pakistan. Menurutnya kegagalan demokrasi di negara tersebut diakibatkan salah satunya oleh tidak adanya rasa saling percaya antar berbagi pemimpin faksi politik.¹⁶ Padahal sebagaimana diketahui pemerintahan dan demokrasi di negara itu dibangun atas sendi-sendi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan

¹⁵ Penjelasan lebih lengkap lihat Putnam, *Making Democracy...* 170.

¹⁶ Muhammad Hisyam, dkk., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2007)

sikap saling percaya. Akan tetapi ketika para pemimpin politik telah dipenuhi rasa saling curiga dan pengkhianatan maka yang terjadi adalah ambruknya sistem negara.

Dalam hal pemerintahan, kepercayaan warga terhadap penyelenggara negara juga merupakan poin krusial. Dukungan masyarakat terhadap pemerintahan akan menguat manakala masyarakat memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap *state* aparatus. Persoalannya ketika banyak aparat negara mengidap *moral hazard*, maka dengan sendirinya *trust* akan melemah. Sebagai contoh kongkrit, terbongkarnya kasus-kasus korupsi di kalangan pegawai pajak akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat membayar pajak.

Di samping sikap saling percaya antar para elit partai, sikap saling percaya warga dengan negara, unsur saling percaya yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sikap saling percaya antara penganut Islam dan Hindu. Sebagaimana dipaparkan di awal kajian ini bahwa komunitas Hindu dan Muslim telah hidup di Lombok selama ratusan tahun. Hubungan yang terjalin antar kedua komunitas ini berlangsung penuh dinamika. Dinamika hubungan terkadang membaik sehingga menghasilkan harmoni sosial. Tetapi pada saat tertentu ketika sikap saling percaya melemah maka kedua kelompok terlibat dalam konflik. Konflik yang berlangsung secara personal antar warga kerap diikuti oleh massa pendukung masing-masing kelompok sehingga memicu konflik komunal. Untuk itu, penelitian ini diupayakan untuk menggali sebanyak mungkin *trust* yang terbangun antar warga Hindu dan Muslim di Kota Mataram. Orientasi kepada kelompok agama ini penting dikaji mengingat sebelumnya banyak temuan yang menyatakan bahwa tradisi agama yang berbeda mempengaruhi *trust* yang juga berbeda.

Tingkat interpersonal *trust* dengan demikian juga sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas demokrasi. Putnam (1993) menemukan kualitas demokrasi di Italia Utara lebih maju dibanding di Italia Selatan. Padahal kedua wilayah ini mengembangkan sistem demokrasi yang sama, sistem pemilu yang sama, sistem kepartaian yang sama, sistem pemerintahan yang sama. Salah satu penyebabnya

adalah karena adanya keragaman modal sosial. Keragaman modal sosial itu terletak pada unsur *interpersonal trust*.

Unsur *civic culture* berikutnya adalah toleransi. Toleransi dipahami sebagai kesediaan menenggang perbedaan. Perbedaan pendapat atau pandangan, perbedaan agama dan keyakinan, perbedaan aliran agama, hingga perbedaan afiliasi politik. Sikap toleransi menjadi bagian penting dari *civic culture*, mengingat toleransi merupakan cerminan sikap dari warga untuk saling menghormati, dan menghargai dan memberi kesempatan umat lain beribadah sesuai agama masing-masing. Secara lebih konkret, toleransi antar umat Hindu dan Muslim yang menjadi fokus penelitian ini dilihat dari pandangan dan perilaku masing-masing komunitas terhadap aktivitas keagamaan kelompok lain.

Ada banyak ajaran agama baik dalam Hindu maupun Islam yang secara tegas menganjurkan dan memerintahkan umat untuk saling mengembangkan sikap toleran. Hanya saja karena perbedaan cara memahami teks-teks suci, sering kali ayat-ayat toleransi terkubur oleh fanatisme kelompok dan primordialisme. Untuk menggali tingkat toleransi pada komunitas beragama ada beberapa indikator di antaranya; kesediaan menenggang perbedaan, pengakuan keberadaan yang (kelompok, agama) lain, memberi izin bagi berlangsungnya peribadatan agama lain termasuk memberi izin atau membiarkan umat lain membangun tempat peribadatan seperti masjid, pura atau gereja. Hal penting lainnya adalah kesediaan untuk tidak mencemooh peribadatan agama lain.

Masih termasuk unsur toleransi adalah tidak adanya diskriminasi terhadap penganut agama yang berbeda. Aspek ini penting dilihat mengingat di sebagian masyarakat, karena tingginya komunalisme, masih muncul stigma negatif atas kepercayaan atau agama orang lain. Hal ini berakibat pada keluhan sejumlah penganut agama yang kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah. Di beberapa tempat masih sering dijumpai adanya keluhan kelompok minoritas yang kesulitan membangun tempat ibadah.

Norma resiprositas (*reciprocity*) dan ekualitas adalah unsur berikutnya dalam *civic culture*. Resiprositas dimaknai sebagai norma-

norma saling berbagi, saling menghargai dan saling membantu. Norma-norma ini muncul manakala di antara warga berkembang satu pandangan bahwa semua orang memiliki kesederajatan atau ekualitas. Tidak ada satu strata sosial yang lebih tinggi dari yang lain. Tidak muncul perasaan sebagai kelompok minoritas yang tertindas dan mayoritas yang terancam. Kesamaan atau kesederajatan mencakup kesamaan di depan hukum, kesamaan memperoleh akses pendidikan, akses politik, akses budaya, akses untuk memperoleh pekerjaan atau sumber-sumber ekonomi lainnya, dan akses menikmati dan memanfaatkan seluruh layanan publik yang disediakan negara.

Dalam prakteknya yang lebih sederhana indikator resiprositas dapat dilihat misalnya dari kesediaan masing-masing kelompok untuk saling berkunjung, saling berbagi atau antar makanan saat hari merayakan besar besar keagamaan atau di saat sedang menggelar hajatan keluarga, kesediaan saling mengundang, dan membiarkan anak-anak mereka bermain dengan tetangga yang berlainan agama. Praktek-praktek saling berkunjung terhadap warga yang berbeda agamanya juga termasuk wujud nyata resiprositas. Sedangkan perilaku ekualitas dapat dilihat misalnya pada sikap komunitas beragama dalam memandang agama lain bahwa mereka sederajat dan mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara. Seseorang tidak melarang tetangganya yang berlainan keyakinan atau agama untuk menjadi guru, membuka praktek jasa lainnya bagi masyarakat adalah sebagian contoh berkembangnya ekualitas terutama pada kesamaan akses ekonomi. Akses yang sama menjadi pegawai pemerintahan, memiliki peluang yang sama dalam menembangkan karir serta kesempatan yang sama dalam berorganisasi juga dapat dipandang sebagai indikator berkembangnya ekualitas. Intinya sikap ekualitas warga dapat dikenali dari tiadanya diskriminasi satu kelompok atas kelompok lain.

Adapun unsur *civil culture* berikutnya adalah *social networking*. Ia dimaknai sebagai kesediaan warga terlibat dan berperan dalam membangun jaringan antar warga. Jaringan antar warga tersebut bersifat tidak hanya intra agama tetapi juga lintas agama. Jaringan ini tidak hanya bersifat mengikat di intra komunal (*bonding*) tetapi juga

menjembatani berbagai kelompok yang berbeda (*bridging*). Kesediaan warga dalam pengembangan jaringan antar warga akan memberikan dampak positif berupa mencairnya sekat-sekat primordialisme kesukuan dan keagamaan. Tidak hanya itu, jaringan antar warga juga akan mampu menepis berbagai isu atau rumor negatif yang kerap muncul karena berbagai provokasi. Sebagai tambahan jaringan antar warga juga memungkinkan berkembangnya ikatan-ikatan dalam bentuk bisnis yang pada gilirannya akan menambah perbaikan kualitas ekonomi warga.

Jaringan antar warga sebagaimana dipaparkan di atas sangat terkait dengan unsur *civic culture* yang terakhir yaitu tradisi berasosiasi. Tradisi berasosiasi dalam komunitas beragama bukan hanya akan memungkinkan berkembangnya ikatan soliditas di internal agama tetapi lebih jauh lagi menunjukkan adanya kesediaan seseorang terlibat dan peduli terhadap urusan publik. Tradisi berasosiasi juga merupakan manifestasi dari kesediaan bekerja sama dan berkompromi dengan orang lain. Dalam komunitas beragama tradisi berasosiasi terbukti juga mampu meredam konflik. Penelitian Varshnay (2007) membuktikan bahwa di daerah-daerah aman konflik di India terbangun tradisi berasosiasi yang kuat. Sementara di daerah-daerah rawan konflik, tradisi asosiasi warga sangat lemah.

Tradisi berasosiasi di kalangan komunitas beragama di Indonesia berlangsung secara dinamis. Sejumlah organisasi berbasis keagamaan telah ada lama bahkan sejak sebelum republik ini merdeka di tahun 1945. Di kalangan umat Islam misalnya dikenal organisasi Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama yang berdiri tahun 1926. Asosiasi berbasis keagamaan berperan penting dalam memajukan umat sekaligus memberi sumbangan yang berarti bagi kemajuan bangsa.

Adanya tradisi berasosiasi yang telah lama terbangun di kalangan umat Islam Indonesia ditambah kuatnya dukungan masyarakat Islam Indonesia terhadap terhadap sistem demokrasi menjadi bukti bahwa umat Islam di Indonesia sangat kompatibel dengan demokrasi. Hal ini juga menjadi bukti bahwa tuduhan atau tesis para ahli seperti Huntington yang menyatakan bahwa budaya Islam tidak mendukung

demokrasi sangatlah tidak tepat. Penjelasan ada tidaknya dukungan terhadap sistem demokrasi akan lebih baik apabila dijelaskan dengan kondisi politik dan ekonomi yang berlangsung di suatu negara. Bukan semata-mata faktor Islam. Dalam kaitannya dengan demokrasi, akan lebih menarik jika penyelidikan dilanjutkan tentang bagaimana komunitas beragama mengembangkan relasi dan membentuk ikatan-ikatan sosial di antara mereka baik intra maupun antar umat beragama.

Civic Culture, Komunitas Beragama dan Kultur Demokrasi

Berbagai karya kesarjanaan yang membahas hubungan antara budaya politik dan demokrasi memberi penekanan adanya pengaruh agama terhadap kedua hal ini. Pengaruh itu ada yang bersifat positif, ada pula pengaruh negatif.¹⁷ Adalah Tocqueville yang secara ekstensif mengungkapkan adanya peran positif yang dimainkan agama dalam pertumbuhan demokrasi di Amerika. Peran penting agama di suatu Negara tergantung sejauh mana masyarakat merasa penting dalam meyakini dan mengamalkan ajaran agama mereka. Suatu masyarakat yang mengklaim diri sebagai masyarakat yang religius akan menempatkan agama sebagai panduan dan pedoman dalam tingkah laku sehari-hari baik yang berhubungan dengan persoalan di ranah personal maupun sosial, di ranah domestik ataupun publik. Keyakinan yang kuat pada nilai-nilai agama ini pada gilirannya akan mempengaruhi pandangan warga Negara dalam kehidupan sosial mereka termasuk urusan pemerintahan dan sistem demokrasi.

Agama secara normatif memberi dorongan yang positif kepada pemeluknya untuk mengembangkan sikap-sikap penuh keadaban. Sikap saling menghormati, solidaritas, kejujuran, kerjasama dan lain-lain adalah ajaran agama yang selalu ditekankan pada pemeluknya.

¹⁷ Mujani *Muslim Demokrat...*, 6.

Pada titik ini agama sejatinya menjadi pendorong menguatnya budaya kewargaan di kalangan warga. Anjuran setiap pemeluk agama untuk tidak hanya saleh secara personal tetapi juga saleh secara sosial merupakan sumber norma yang melandasi tata pergaulan sosial antar maupun intra umat beragama. Setiap pemeluk agama dituntut untuk tidak hanya kuat dalam mengembangkan laku spiritualitasnya, tetapi juga hendaknya diimbangi dengan kepekaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat sekitarnya.

Dengan perspektif yang berbeda, Saiful Mujani, dengan mengutip pendapat Jagodzinski dan Dobbelaere (1996: 76) menyebutkan bahwa agama berperan menciptakan kegairahan dan motivasi yang abadi karena agama merupakan sebuah sistem nilai.¹⁸ Jauh sebelumnya Clifford Geerts, menyebut agama sebagai sebuah sistem simbol yang membentuk kegairahan dan motivasi yang kuat, dan berjangka panjang pada kehidupan manusia.¹⁹ Oleh karenanya agama menjadi *way of life* bagi para penganutnya. Agama berkait dengan politik mengingat politik juga berkaitan dengan kegairahan, motivasi dan kepentingan manusia.²⁰

Memahami budaya kewargaan sangat sangat terkait dengan upaya memahami partisipasi masyarakat dalam pengembangan demokrasi. Saat ini demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh hampir semua negara di dunia. Tentu saja bentuk dan mekanismenya berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lain. Demokrasi telah dianggap terbaik dibanding sistem pemerintahan lainnya.

Indonesia sendiri telah memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan sejak negara ini memproklamirkan diri lebih dari setengah abad silam. Kenyataan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang memilih demokrasi

¹⁸ Mujani *Muslim Demokrat...*, 7.

¹⁹ Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture* (New York: Basic Book, 1973). 30.

²⁰ Mujani *Muslim Demokrat...*, 6.

merupakan kenyataan yang patut mendapat perhatian. Hal ini karena menurut amatan sejumlah ahli, tak banyak negara Islam yang sukses mengembangkan demokrasi. Menurut catatan Saiful Mujani, hanya negara Mali di Afrika Selatan yang mampu mengembangkan demokrasi di negaranya setidaknya lebih dari lima tahun terakhir.

Sejumlah ahli bahkan meragukan Islam dapat tampil mendorong terlembagakannya demokrasi. Sebaliknya Islam menjadi batu sandungan akan hadirnya sistem demokratis. Menurut mereka ada banyak sistem nilai dalam Islam yang tidak *compatible* dengan demokrasi yang bertradisikan barat. Sejumlah pakar tentang masyarakat muslim seperti Kedourie (1994), Lipset (1994), Huntington (1997) yang menyebut bahwa Islam kurang menyokong sistem dan kultur demokrasi. Dengan kata lain menurut para pengamat politik ini, Islam bertanggung jawab bagi langkanya iklim demokratis. Secara umum alasan yang dimajukan para pakar ini adalah bahwa masyarakat muslim yang sangat mengagungkan warisan sejarah masa lalunya. Muslim tidak bisa menerima alternatif baru pengelolaan negara berbasis demokrasi.²¹

Sebenarnya tidak hanya Islam, beberapa tradisi agama di luar Islam juga dinilai kurang memberi dukungan yang penuh terhadap sistem demokrasi. Robert D. Putnam (1997 dan 1998) dalam berbagai risetnya menyatakan bahwa ada beberapa agama yang berkontribusi negatif bagi berkembangnya demokrasi. Putnam secara jelas menunjuk agama Katolik di Italia sebagai salah satu agama yang kurang kompatibel dengan iklim demokrasi. Dalam survei di beberapa Negara, lebih lanjut Putnam menyatakan bahwa adanya perbedaan dalam tradisi agama menyebabkan perbedaan dalam sikap saling percaya antar sesama warga.²²

²¹ Seymour Martin Lipset, "The Social Requisites of Democracy Revisited," dalam *American Sociological Review* 59 (1994): 1-22; Elie Kedourie, *Democracy and Arab Political Culture* (Portland: Frank Cass, 1994); dan Samuel P Huntington, *The Clash of Civilization: Remarking of The World Order* (New York: Simon and Schuster, 1997).

²² Mujani *Muslim Demokrat...*, 6.

Senada dengan temuan di atas, Inglehart mengemukakan bahwa masyarakat yang dipengaruhi oleh agama Protestan dan Konghucu memiliki tingkat saling percaya antar warga (*interpersonal trust*) lebih tinggi dibanding komunitas Muslim atau komunitas Katolik.²³ Apa yang dikemukakan Inglehart ini cukup menarik sekaligus mengejutkan. Ia menemukan perbedaan dalam tradisi agama berkontribusi signifikan terhadap *interpersonal trust*. Salah satu faktor yang menyebabkan tradisi agama Katolik kurang mendukung *interpersonal trust* di antaranya karena adanya sistem hierarki atau hubungan vertikal antara pusat otoritas agama dan para pengikut. Sistem keberagamaan yang hierarkis dan rigid seperti itu menghambat berkembangnya hubungan yang wajar dan sejajar antar warga.

Lebih lanjut, jika logika di atas dikembangkan untuk menilai sistem atau tradisi agama lain bisa jadi hasil yang diperoleh akan sama. Semakin kuat otoritas pemimpin agama yang terbangun karena struktur hierarkisnya, maka semakin kecil tingkat kepercayaan antara warga. Inglehart sendiri sebagaimana dicatat oleh Mujani (2009) menyamakan keberadaan sistem hierarkis yang tertutup dalam agama Katolik ini sama dengan tradisi atau sistem komunis. Dalam komunisme dan banyak rezim totalitarianisme banyak gejala yang menghambat terbangunnya *interpersonal trust*. Hubungan yang dibangun adalah hubungan yang tertekan dan kurang wajar. Padahal, seperti kita tahu bahwa *interpersonal trust* adalah modal penting bagi berkembangnya demokrasi dan budaya kewargaan. Jika tradisi agama telah gagal mendorong umat mempercayai orang lain (biasanya orang di luar agamanya) maka dapat dipastikan demokrasi akan terhambat pertumbuhannya.

Bagaimana dengan Islam? Seperti yang telah dikemukakan oleh sejumlah sarjana di atas, Islam tampaknya dinilai kurang menyokong berkembangnya struktur dan sistem demokrasi. Huntington misalnya

²³ Ronald Inglehart, "Trust, Well-Being, and Democracy" dalam *Democracy and Trust*. Editor Mark E. Warren (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 92.

mengemukakan "merupakan sebuah kesulitan untuk menggabungkan konsep negara bangsa dengan sentimen Islam". Adanya kepercayaan yang tinggi terhadap sistem *ummah* di kalangan umat Islam telah mengalahkan sistem *nation state* yang bertradisikan barat. Solidaritas *ummah* -termasuk sistem kesukuan- yang berakar kuat di kalangan umat Islam telah mengalahkan sistem negara bangsa.²⁴

Dalam penjelasannya, Huntington lebih lanjut berpendapat bahwa demokrasi merupakan produk peradaban barat yang sangat mungkin kurang mendapat apresiasi dan dukungan dari peradaban lain termasuk peradaban Islam.

"Demokrasi modern merupakan produk peradaban Barat. Dasarnya terletak pada pluralisme sosial, sistem kelas, *civil society*, kepercayaan pada aturan hukum, pengalaman dengan lembaga representatif, pemisahan antara otoritas spiritual dan otoritas temporal, dan komitmen pada individualisme yang mulai berkembang di Eropa Barat pada satu milenium yang lalu".²⁵ Dengan pengalaman kesejarahan seperti ini tak pelak lagi demokrasi adalah sistem Barat yang susah dapat diterima oleh masyarakat muslim.

Dengan konseptualisasi yang berbeda, Mujani berpendapat bahwa bagi Huntington, masalah pokok yang dihadapi Barat bukanlah fundamentalisme Islam. Masalahnya terletak pada Islam itu sendiri, sebuah peradaban yang berbeda, yang masyarakatnya meyakini superioritas budaya mereka. Keyakinan terhadap sistem syariah yang dianggap sangat komprehensif juga merupakan salah satu alasan mengapa demokrasi sulit berkembang di dunia muslim.²⁶ Bernard Lewis sebagaimana dikutip oleh Mujani menyatakan:

Gagasan bahwa setiap komunitas setiap bentuk aktivitas, dan setiap aspek kehidupan berada di luar cakupan hukum dan yurisdiksi

²⁴ Samuel P Huntington, *The Clash of Civilization: Remarking of The World Order* (New York: Simon and Schuster, 1997), 174.

²⁵ Huntington, *The Clash of Civilization ...*, 6.

²⁶ Mujani *Muslim Demokrat...*, 224.

agama tampak asing dalam pemikiran Islam. Tidak ada perbedaan misalnya, antara hukum agama dan hukum sipil, antara aturan gereja dengan aturan Negara - yang sangat krusial dalam sejarah Kristen. Hanya ada satu sistem hukum, yakni syariah, yang diterima sebagai sesuatu yang suci dan mengatur semua aspek kehidupan; kemsayarakatan, perdagangan, kriminalitas, konstitusi, juga masalah-masalah yang secara khusus terkait dengan agama dalam pengertian yang terbatas, seperti ditemukan dalam tradisi Kristen.²⁷

Apa yang disampaikan Lewis di atas memang bukan tanpa alasan. Keyakinan yang kuat di antara politisi muslim tentang kesempurnaan ajaran agama Islam telah mendorong mereka mengembangkan sistem penyelenggaraan Negara berbasis Islam. Konsep penyatuan antara *al-din wa al-daulah* telah lama menjadi diskursus politik penting di kalangan elit-elit Muslim. Keyakinan terhadap syariah sebagai sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan menjadi alasan utama mengapa syariah berbeda dengan demokrasi. Demokrasi yang merupakan produk dan kreasi manusia dengan sendirinya sangat tidak cocok jika dibandingkan dengan produk Tuhan. Inilah salah satu alasan yang mendasari sebagian kelompok dalam Islam yang getol mengusung konsep syariah dalam mengatur tidak hanya urusan privat tetapi juga urusan publik. Untuk konteks ini beberapa ormas Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI) adalah sebagian contoh organisasi Islam yang sangat bersemangat memperjuangkan implementasi syariat Islam di Republik ini.

Survei yang dilakukan PPIM di tahun 2001 hingga 2006 menunjukkan data yang sangat menarik untuk dikutip. Salah satunya menyangkut isu negara Islam. Survei tahun 2001 misalnya, tercatat 57,8% responden menyatakan dukungannya terhadap gagasan perlunya Negara Indonesia mengembangkan pemerintahan

²⁷ Bernard Lewis, *What Went Wrong? Western Impact and Middle eastern Response* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 100. Terjemahan bahasa Indonesia tentang tesis Lewis ini dikutip dari Mujani, *Muslim Demokrat...*, 225.

berdasar prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Hadis. Persentase ini terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2002 persentase responden yang setuju dengan hal itu meningkat menjadi 67,1% dan meningkat lagi menjadi 72,2% di tahun 2004 dan 2006. Demikian pula dengan pernyataan "Negara harus mewajibkan pelaksanaan syariat bagi semua Muslim dan Muslimah" sebanyak 61,4% responden muslim menyatakan persetujuannya. Persentase ini terus mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Pada tahun 2001 responden yang menyetujui pernyataan tersebut bertambah menjadi 70,6% dan di tahun 2004 menguat lagi mencapai 75%. Persentase ini kembali naik di tahun 2006 menjadi 82,8%.

Tingginya dukungan warga Muslim terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis syariah memang satu fakta yang tampaknya kurang kondusif bagi berkembangnya sistem demokrasi di Negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Namun demikian, beberapa catatan perlu disampaikan. Pertama, pernyataan bahwa setiap muslim mendukung pemberlakuan hukum yang berlandaskan syariah adalah pernyataan yang masih bersifat umum. Saya kira tidak ada seorang pun penganut agama yang tidak mempunyai dukungan atas pemberlakuan kebijakan yang didasarkan atas prinsip agamanya. Apalagi prinsip dasar tersebut berasal dari sumber utama agama, kitab suci. Kedua, pemaknaan istilah syariah sendiri dalam masyarakat sifatnya tidaklah tunggal. Ada banyak pengertian atas konsep syariah. Persetujuan terhadap implementasi hukum syariah tidak serta-merta mengindikasikan adanya dukungan terhadap Negara Islam. Syariah dalam pandangan umat Islam Indonesia tampaknya lebih mengacu pada implementasi hukum-hukum fikih ibadah. *Ketiga*, perbedaan konseptualisasi syariah di kalangan umat Islam dengan demikian juga berimplikasi pada perbedaan implementasi syariah. Sebagai prinsip dasar, rujukan atas al-Qur'an dan al-Hadis merupakan keniscayaan bagi umat Islam, tetapi untuk hal-hal yang bersifat politik kenegaraan sebagian besar umat Islam masih memilih menggunakan hukum positif.

Memperhatikan sejumlah alasan di atas, beberapa pernyataan yang menyangkut isu "Negara Islam", "kewajiban Negara untuk

memberlakukan syariat Islam terhadap muslim dan Muslimah" tidak lagi diajukan dalam penelitian ini. Selain itu, fakta rendahnya dukungan umat Islam atas ormas-ormas semisal HTI, MMI dan FPI yang terlihat rendah juga menjadi alasan mengapa pernyataan yang menyangkut isu negara Islam tidak diajukan.

Sesuai hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2005, dukungan terhadap organisasi HTI, FPI dan MMI tergolong rendah. Dalam survei tersebut, beberapa agenda perjuangan HTI, MMI, dan FPI hanya memperoleh dukungan masyarakat berturut-turut sebesar 3,3%, 11% dan 16,9%. Sementara dukungan terhadap organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah tercatat lebih tinggi. Masing-masing memperoleh 71,7% dan 54,1%. Dengan persentase ini dapat dinyatakan bahwa kedua organisasi yang terkenal moderat ini masih menjadi organisasi yang memperoleh dukungan paling luas di kalangan masyarakat Islam Indonesia.

Dukungan yang tinggi masyarakat muslim Indonesia terhadap organisasi yang moderat semisal NU dan Muhammadiyah serta apresiasi positif atas sistem demokrasi, merupakan salah satu indikasi bahwa Islam Indonesia menampilkan wajah yang berbeda dengan apa yang disangsikan oleh sejumlah pengamat di atas. Selain itu dukungan terhadap ormas Islam juga merupakan indikasi adanya tradisi berasosiasi yang baik di kalangan muslim Indonesia. Tradisi berasosiasi inilah yang merupakan salah satu dari unsur budaya kewargaan terpenting yang dikembangkan oleh komunitas beragama.

Muncul dan berkembangnya budaya kewargaan komunitas beragama jelas dipengaruhi oleh sejumlah hal salah satunya oleh kemampuan memahami ajaran agama. Pada komunitas keagamaan, budaya kewargaan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman umat beragama atas ajaran agama mereka dan respons umat beragama atas kondisi sosio-politik yang mengitarinya. Bentuk pemahaman yang inklusif akan mempercepat proses penguatan budaya kewargaan, sebaliknya model pemahaman yang eksklusif akan menghambat terbangunnya budaya kewargaan dan pada gilirannya akan mengganggu hubungan antar umat beragama.

Tradisi berasosiasi merupakan sikap yang telah lama melembaga pada komunitas beragama. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi berbasis keagamaan yang ada di negeri ini seperti NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan dan lain-lain. Keberadaan organisasi NU maupun Muhammadiyah sebagai organisasi besar Islam telah berperan penting dalam menampilkan wajah Islam yang damai sekaligus mempromosikan pluralitas dan demokrasi di negeri ini.²⁸ Kedua organisasi ini, meskipun dalam bahasa Putnam terkategori *bonding* (mengikat ke dalam) atau bersifat *intra-komunal* dalam bahasa Varshney,²⁹ tetapi memiliki kemampuan *bridging* (menjembatani) integrasi sosial secara lebih luas.

Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, banyak organisasi keagamaan yang tampaknya kontra produktif bagi terlembagakannya budaya kewargaan secara utuh. *Alih-alih* membangun kohesivitas sosial antar kelompok agama, organisasi-organisasi ini *malah* menjadi penghambat berkembangnya ikatan antar kelompok dan terjebak pada fanatisme internal.³⁰ Bahkan kecenderungan yang terjadi kemudian adalah kelompok keagamaan ini semakin mendukung menguatnya politik identitas yang terlihat dari adanya kontestasi simbol-simbol agama di ruang publik.

²⁸ Penjelasan lebih detil mengenai temuan ini silakan lihat Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).

²⁹ Ashutosh Varshney, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India* (New Haven and London: Yale University Press, 2002).

³⁰ Roger V. Patulny, dan Gunnar Lind Haase Swendsen, "Exploring The Social Capital Grid: bonding, bridging, qualitative, quantitative", *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol.27, No.1/2 (2007): 32-57.

Kontestasi Simbol Agama

Penguatan politik identitas dapat dilihat salah satunya dari maraknya kontestasi simbol-simbol keagamaan di ranah publik.³¹ Pemberlakuan produk hukum berbasis keagamaan seperti peraturan daerah bernuansa syariah, politisasi identitas keagamaan untuk kepentingan politik hingga pengembangan tata ruang kota yang lebih menonjolkan simbol-simbol agama tertentu dan meminggirkan simbol agama lain adalah sebagian contoh penguatan politik identitas berbasis keagamaan. Tren menguatnya kontestasi simbol agama di ruang publik ini berlangsung mulai dari skala lokal hingga nasional.

Dalam konteks yang lebih luas, perdebatan tentang perlu tidaknya agama tampil di ruang publik telah berlangsung lama. Perdebatan tersebut dapat dilacak dan bersumber pada perdebatan mengenai format hubungan antara negara dan agama. Sebagian negara memilih pemisahan yang tegas antara urusan agama dengan urusan negara. Inilah yang kemudian mengilhami munculnya negara sekuler. Sebagian Negara yang lain memilih sebaliknya dengan memasukkan agama dalam seluruh aspek penyelenggaraan sistem Negara. Pilihan bentuk kedua ini kemudian menghadirkan Negara teokratis. Penyusunan kebijakan, peraturan atau regulasi publik didasarkan dan bersumber pada ajaran agama tertentu. Di antara dua kutub ini, sebagian Negara memilih jalan tengah dengan mengakomodasi nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum-hukum yang bersumber dari agama disandingkan dengan produk hukum positif negara. Indonesia tampaknya memilih bentuk yang ketiga ini. Indonesia bukan Negara sekuler, juga bukan Negara teokratis.

³¹ Sri Endras Iswarini, Ulfa Hidayati, dan Yanti Muchtar, *Kebijakan Berbasis Syariah di NTB: Keadilan Gender dan Pluralisme di Persimpangan*, Laporan Penelitian (Jakarta: KAPAL Perempuan, 2010); Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar, eds, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2011); Khoirunnisa, *Multikulturalisme dan Politik Identitas: Kontestasi simbol-simbol Islam pada Ruang Publik di Kota Tangerang* (Jakarta: Young Progressive Muslim, 2012).

Terkait dengan mencari formulasi yang tepat tentang hubungan antara agama, Negara dan demokrasi, menarik untuk ditelaah kembali pendapat Jurgen Habermas mengenai hal ini. Habermas, berbeda dengan kalangan sekuler yang menghendaki keluarnya agama dari urusan publik dan meletakkannya sebatas urusan privat, mengusulkan model ruang publik yang pluralistik. Sebuah ruang publik yang menampung aspirasi atau keinginan semua elemen masyarakat termasuk kelompok agamawan dan sekuler.

Dalam iklim demokrasi, agama dapat hadir dan menyumbangkan memperkaya kebijakan negara. Bagi Habermas, agama dapat hadir dan terlibat dalam ruang publik dengan sejumlah catatan. *Pertama*, aspirasi-aspirasi religius dapat menjadi bagian dari kebijakan publik asalkan dapat dijelaskan secara rasional dan diperlakukan dalam wilayah rasional pula. Dengan cara ini tidak ada aspek-aspek yang bersifat sakral yang imun dari pertanyaan publik. Agama dapat menjadi sumber hukum kebijakan publik asalkan telah melalui uji publik. Setiap elemen masyarakat diperbolehkan untuk mempertanyakan dan mengkritisi sumber agama tadi. Dengan demikian yang akan hadir bukan lagi hukum agama melainkan hukum publik yang telah melalui diskursus yang melibatkan semua elemen masyarakat termasuk kelompok sekuler.

Kedua, warga sekuler (warga yang berkeyakinan lain) hendaknya bias mendengar atau belajar dari aspirasi-aspirasi religius. Semua warga Negara harus membuka diri dari kemungkinan munculnya diskursus baru. Tidak diperkenankan satu pihak memutlakkan pandangannya dan menegasikan pandangan kelompok lain. Hasil dari kebijakan yang bakal diberlakukan dengan demikian merupakan hasil negosiasi dan kontribusi dari berbagai komponen masyarakat. Ini merupakan seni dari demokrasi yang boleh disimpulkan sebagai kompromi-kompromi atas berbagai aspirasi yang muncul di masyarakat.

Ketiga, Negara harus bersikap netral dan menjalankan fungsi deliberatif. Netralitas Negara dibutuhkan untuk menjaga tidak adanya satu agama yang diperlakukan secara istimewa mengalahkan yang lain. Negara yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga peradilan, parlemen dan partai politik, menurut Habermas akan berfungsi

sebagai wadah yang menampung semua aspirasi. Tugas deliberatif Negara akan tercapai manakala ia mampu mendorong terjadinya diskursus nasional yang sehat dan adil. Di sinilah netralitas Negara hendaknya disandingkan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam mengawal lalu-lintas diskursus yang berkembang di masyarakat, Negara tidak boleh terjebak atau terpasung oleh kepentingan kelompok mayoritas. Karena jika Negara terjebak dalam kungkungan dan kehendak mayoritas maka yang lahir adalah tirani mayoritas.

Keempat, kelompok agama mayoritas tidak menghalangi kontribusi-kontribusi kelompok agama lain (kelompok minoritas) maupun dari kelompok sekuler. Syarat keempat ini berbeda dengan syarat ketiga. Jika aktor utama untuk menjaga netralitas dan mengayomi kelompok minoritas adalah Negara, sementara di sini yang dituntut adalah kesadaran kelompok agama terutama kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas, dengan mengatas-namakan demokrasi, akan menentukan kebijakan publik secara seenaknya tanpa mendengar aspirasi minoritas.³²

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah sudah siapkah komunitas agama mampu dan mau memenuhi prasyarat di atas. Bisakah kelompok mayoritas agama menghormati kelompok minoritas baik minoritas agama maupun kelompok sekuler. Bersediakah komunitas agama memberi kesempatan kelompok lain untuk ikut mempertanyakan, mengkritisi atau mendialogkan sejumlah aturan agama yang hendak dijadikan kebijakan publik? Apabila semua prasyarat ini dapat terpenuhi, maka menghadirkan agama di ruang publik menjadi sesuatu yang absah adanya. Dengan sendirinya kontestasi simbol-simbol keagamaan dapat diterima mengingat semua pihak memiliki semangat toleransi yang tinggi.

Fenomena kontestasi simbol keagamaan di ruang publik mulai merambah kota Mataram. Perkembangan kota Mataram dalam dua

³² Lihat F. Budhi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 140-162.

dasa warsa terakhir memperlihatkan adanya penguatan simbol-simbol keislaman di ruang publik. Kecenderungan ini menguat seiring keinginan elit kota yang ingin meneguhkan citra Lombok sebagai pulau seribu masjid. Penguatan simbol keagamaan dengan kasat mata dapat dilihat dari rencana strategis pembangunan kota, penyusunan rancangan peraturan daerah dan berbagai regulasi lain yang melibatkan partisipasi publik. Dalam rencana strategis (Renstra) pembangunan kota Mataram disebutkan bahwa visi pembangunan kota adalah maju dan religius. Belakangan ditambahkan kata berbudaya. Dalam memaknai kata religius, orientasi pembangunan kota sebisa mungkin diarahkan pada penguatan simbol-simbol keislaman di ruang publik.

Terdapat asumsi bahwa penguatan simbol Islam di ruang publik didorong antara lain oleh adanya keinginan untuk mengurangi simbol-simbol keagamaan Hindu di Kota Mataram. Keinginan kuat untuk menampilkan citra *Islami* semacam ini diduga diakibatkan oleh latar sejarah perjumpaan antara Hindu dan Muslim di Lombok yang berlangsung dalam moda penguasaan atau kolonisasi. Sebagaimana terekam dalam sejarah, kerajaan Hindu dari Bali tepatnya kerajaan Karang Asem pernah cukup lama menjajah Lombok.³³ Rekaman sejarah masa silam menyisakan pengalaman pahit di sebagian masyarakat Lombok. Maka dapat dimaklumi ketika sebagian masyarakat menginginkan tampilnya simbol keislaman di ruang publik dengan sendirinya akan menghapus kenangan pahit masa lalu tersebut.

Dari fenomena di atas, muncul sejumlah pertanyaan, misalnya: apakah munculnya penguatan simbol keagamaan di ruang publik dapat diklaim sebagai gejala melemahnya budaya kewargaan? Mungkinkah dikembangkan asumsi atau proposisi; semakin tinggi derajat budaya kewargaan, maka semakin lemah penguatan simbol

³³ Alfons van der Kraan, *Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940* (Singapore: Heinemann Educational Books Asia, 1980). Lihat juga Fathurahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998).

keagamaan di ruang publik? Apakah keinginan masing-masing kelompok agama untuk mendesakkan simbol-simbol agama dapat dipandang sebagai berkurangnya *interpersonal trust* di antara kelompok umat beragama. Atau sebetulnya munculnya kontestasi simbol keagamaan di ruang publik hanyalah konsekuensi logis dari terbukanya kebebasan di era demokrasi, karenanya tidak perlu dirisaukan. Inilah beberapa pertanyaan penting yang menarik untuk dielaborasi secara lebih dalam dalam penelitian ini. Namun sebelum sampai ke pada permasalahan ini, lebih dahulu akan dipaparkan secara sekilas mengenai kondisi kota Mataram.

3

***Mataram; Kota Multikultur dan
Arena Kontestasi***

Deskripsi tentang kondisi kota Mataram masa kini menarik untuk dicermati. Selain menjadi kota destinasi wisata di wilayah bagian Tenggara Indonesia, Mataram saat ini juga merupakan kota terpenting di pulau Lombok. Terletak di sebelah Timur pulau Bali, kota ini telah berkembang menjadi kota multikultur yang didiami oleh berbagai kelompok suku dan agama. Suku Sasak dan Bali merupakan dua suku besar yang telah lama hidup berdampingan di kota yang juga menjadi ibukota propinsi Nusa Tenggara Barat ini. Suku Sasak, suku asli pulau Lombok, merupakan kelompok terbesar. Hampir semua etnis Sasak memeluk agama Islam dan termasuk penganut Islam yang taat. Sedangkan etnis Bali merupakan etnis terbesar kedua yang mayoritas beragama Hindu.

Relasi antara dua etnis besar di kota Mataram ini berlangsung secara harmonis. Kedua kelompok saling menghargai perbedaan agama dan keyakinan masing-masing. Kedua kelompok etnis ini,

sebagaimana dipaparkan di bab empat, telah mengembangkan budaya kewargaan. Namun demikian, pada saat-saat tertentu, kedua kelompok ini juga tak bisa lepas dari ketegangan dan konflik. Sejumlah konflik yang belum bisa dikelola secara baik terkadang mencuat menjadi konflik terbuka berupa kerusuhan sosial yang bernuansa suku dan agama. Untuk melengkapi pembacaan yang utuh mengenai hal ini, berikut dipaparkan sekilas sejarah kota Mataram dan kondisi sosial penduduknya.

Tilikan Historis

Tilikan historis atas keberadaan kota Mataram menarik untuk diulas mengingat rekaman sejarah masa silam tersebut terkadang ikut mempengaruhi pola interaksi sosial antar warga kota pada masa-masa berikutnya. Di Mataram, terdapat satu kota penting yang bernama Cakranegara.¹ Kota ini pernah menjadi ibukota sekaligus pusat pemerintahan kerajaan Karangasem. Kerajaan Karangasem Hindu Bali yang menguasai Lombok selama kurang lebih satu setengah abad (1740-1894).² Sesuai namanya, kerajaan ini berasal dari kerajaan Karangasem Bali yang mampu menaklukkan kerajaan Selaparang Lombok bagian Timur dan selanjutnya mentasbihkan dirinya sebagai penguasa tunggal di pulau Lombok.

¹ Sebagian sumber menyebutkan kata Cakranegara berasal dari kata cakra dan Negara. Cakra artinya roda yang berputar mengendalikan pemerintahan dan mengontrol seluruh sistem kerajaan dan masyarakat. Sebagian ahli mengartikan Cakra sebagai tempat pengajaran agama Hindu. Pembangunan kota diselesaikan pada pertengahan abad ke-18. Lihat Handinoto, "Pola Spasial dan Sistem Jalan dari Kota Akranegara dan Probolinggo, Sebuah Perbandingan", *Dimensi Teknik Arsitektur* vol. 27, no. 2, Desember 1999: 21 - 30.

² Lihat, Fathurahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998). Alfons van der Kraan, *Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940* (Singapore: Heinemann Educational Bookss Asia, 1980).

Sebagai penguasa tunggal di pulau Lombok, kerajaan Mataram diperintah secara berturut-turut oleh tiga raja keturunan Karangasem yaitu pertama, Raja Anak Agung Ketut Karangasem IV yang memerintah pada tahun 1838 hingga 1850. Kedua, Raja Anak Agung Made Karangasem IV yang memerintah pada tahun 1850 hingga 1872. Dan ketiga adalah raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem IV yang memerintah pada tahun 1872 hingga 1894.³

Posisi kerajaan Mataram Karangasem semakin kuat setelah sukses menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Lombok bagian Barat seperti kerajaan Pagutan, kerajaan Pagesangan, kerajaan Mataram, dan kerajaan Singasari.⁴ Kerajaan Mataram Karangasem inilah yang selanjutnya mengembangkan tata ruang kota berdasar subkultur filsafat *Asta Kosala-kosali*.⁵ Pada setiap kota dibangun berbagai fasilitas seperti istana raja (puri), tempat persembahyangan (pura Puseh, pura desa, pura *dalem* dan pura kerajaan yang dikenal dengan pura Meru), tempat pertemuan adat (*bale banjar*), kuburan (*setra*) dan kampung-kampung pemukiman dengan pola lingkaran.⁶

Di pusat lingkaran dibangun istana kerajaan (puri) sebagai tempat tinggal raja dan para bangsawan.⁷ Sementara di lingkaran berikutnya dibangun perumahan-perumahan dengan sistem blok

³ Sudirman dan Sukma, Gumi Sasak dalam Sejarah (Selong: Pemda Lombok Timur, 2009), 161-162.

⁴ Lalu Mulyadi, *Pola Kota Cakranegara* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000), 1.

⁵ Tentang arsitektur rumah dan tempat peribadatan khas Hindu-Bali, selengkapnya lihat Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, *Arsitektur Rumah Tradisional Bali, Berdasarkan Asta Kosala-Kosali* (Denpasar: Udayana University Press, 2008); Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, *Arsitektur Bangunan Suci Hindu, Berdasarkan Asta Kosala-Kosali* (Udayana University Press, Denpasar, Bali), 2008.

⁶ Lalu Mulyadi, *Pola Kota Cakranegara* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000), 1.

⁷ Saat ini beberapa pura bekas peninggalan Kerajaan dijadikan obyek wisata seperti Kompleks Pura Mayura. Selain terdapat pura, di areal kompleks yang luas ini terdapat kolam pemancingan, patung-patung (sebagian patung orang bersorban yang merepresentasikan orang Islam), dan juga kolam renang untuk publik.

berdasarkan strata sosial tertentu sebagaimana yang lazim dalam pembagian kasta warga Bali. Blok pertama diperuntukkan untuk kaum *Brahmana*, blok kedua untuk kaum *Kesatria* dan blok selanjutnya untuk kaum *Sudra*.⁸ Setiap warga memperoleh sebidang tanah berbentuk persegi empat yang luasnya rata yakni sekitar 6–8 are (600–800m²). Lahan perumahan berbentuk persegi empat tersebut sangat ideal sebagai tempat tinggal.⁹ Setiap bagian lahan cukup digunakan untuk memenuhi keperluan tiga hal sekaligus yaitu *parahyangan* (membangun pura sebagai tempat bersembahyangan), *pawongan* (hunian) dan *palemahan* (pertanian).¹⁰

Di sela-sela pemukiman warga Hindu Bali, disediakan perkampungan Muslim untuk warga Sasak. Warga Muslim Sasak yang diizinkan oleh pihak kerajaan untuk tinggal di wilayah tersebut harus memiliki kecakapan khusus. Kecakapan yang dimaksud adalah sejumlah keterampilan warga yang memang dibutuhkan oleh pihak istana kerajaan. Seperti kecakapan merawat senjata, membuat kerajinan emas, merawat gamelan hingga membuat makanan dan minuman. Dengan pola penataan pemukiman seperti itu, wajar jika sekarang ini ada pengelompokan pemukiman berdasar etnis dan agama di Mataram terutama di wilayah Cakranegara. Pengelompokan pemukiman berdasar etnis dan agama ini pada kondisi-kondisi tertentu berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik.

⁸ Struktur Kasta yang membentuk pelapisan sosial dipengaruhi oleh sistem nilai yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu *utama*, *madya* dan *nista*. Sehingga secara berurut melahirkan golongan *Brahmana*, *Kesatria*, dan *Waisya*. Pelapisan sosial ini selanjutnya berpengaruh dalam penggunaan tiga tingkatan bahasa yaitu *alus*, *lumrah* (*madya*) dan *kasar*. Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), 36-38.

⁹ Konsep penggunaan lahan disesuaikan dengan unsur-unsur *atma* (jiwa), *sarira* (badan) dan *Trikarya*. Sehingga setiap lahan pekarangan hendaknya digunakan untuk kebutuhan *parahyangan* (tempat ibadah/pura), *pawongan* (tempat hunian), dan *palemahan* (lahan pertanian). Lalu Mulyadi, *Pola Kota Cakranegara* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000), 3.

¹⁰ Lalu Mulyadi, *Pola Kota Cakranegara* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000), 3.

Memasuki paruh kedua abad ke-19, Kerajaan Karangasem mulai kehilangan kekuasaan, terutama setelah Belanda menguasai pulau Lombok. Secara efektif, Mataram dikuasai oleh Belanda sejak tahun 1843 tepatnya setelah ditandatanganinya surat perjanjian *Korte Verklaring* atau "pernyataan pendek" pada tanggal 7 Juli 1843. Dari pihak Belanda diwakili Huskus Koopman. Sedangkan dari pihak kerajaan, surat perjanjian ditandatangani langsung oleh Raja serta beberapa orang Punggawa di Puri Kanginan Mataram. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan sejumlah hal penting seperti Mataram memberikan pengakuan resmi bahwa seluruh Pulau Lombok adalah milik Belanda dan bahwa Belanda berkuasa atas seluruh pulau Lombok dan Lombok adalah bagian dari Hindia Belanda. Dalam perjanjian itu juga dinyatakan bahwa pihak pemerintah Hindia Belanda mengakui Raja Mataram sebagai penguasa atas bagian Barat wilayah Pulau Lombok.¹¹ Sejak saat itulah, secara resmi Lombok dijajah Belanda.

Akibat penjajahan tersebut, kehidupan rakyat Sasak semakin sengsara. Banyak tanah milik rakyat dirampas, dan banyak warga yang harus melakukan kerja paksa. Kesengsaraan ini semakin diperparah dengan tingginya pungutan pajak yang harus dipikul oleh para petani.

Untuk mengukuhkan kekuasaannya, segala taktik dan siasat dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Hingga akhirnya pada tahun 1894, Belanda dengan berani menyatakan tidak mengakui kekuasaan raja Mataram dan mulai melakukan langkah-langkah penataan administratif. Di bawah kekuasaan Belanda, status pulau Lombok ditetapkan sebagai wilayah *Afdeling* yang diatur dengan *Staatsblad*, No 185 Tahun 1895 dengan sebutan *Afdeling van Lombok*. *Afdeling* dikepalai oleh seorang asisten residen ibukotanya di Ampenan. *Afdeling* Lombok termasuk bagian dari Residentie van Bali en Lombok (Karesidenaan Bali dan Lombok) dengan ibukotanya di Singaraja Bali. Dengan *Staatsblad* No 185 tahun 1895 itu pula ditetapkan bahwa *Afdeling* Lombok dibagi menjadi dua wilayah *Onder Afdeling* yaitu

¹¹ Jamaludin dkk, *Penyusunan Sejarah Kota Mataram*. Laporan Akhir Penelitian (Mataram: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2011), 37.

Onder Afdeling van Oost Lombok (Lombok Timur) dengan ibukota di Sisiq (Labuhan Haji) dan *Onder Afdeling van West Lombok* (Lombok Barat) dengan ibukota Mataram. *Onder Afdeling* dikepalai oleh seorang Controleur.¹²

Selepas dikuasai Belanda, sebagaimana daerah lain di Indonesia selanjutnya, Lombok dikuasai oleh Jepang sejak tahun 1942. Selain perubahan penataan administrasi pemerintahan, tak banyak cerita menarik yang dapat diungkap pada masa pendudukan Jepang. Satu hal yang pasti, kepedihan dan penderitaan masih menggelayut di pundak orang-orang Sasak Lombok. Secercah harapan mulai mencuat kala Republik Indonesia memproklamkan diri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Pada masa kemerdekaan, wilayah Mataram masuk ke dalam wilayah Pemerintah Daerah tingkat II Lombok Barat. Seiring perkembangan kota, sejumlah usaha dilakukan untuk menjadikan Mataram sebagai kota administratif. Dengan berbagai usaha dan pertimbangan, akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 21 Tahun 1978, terbentuklah Kota Administratif (Kotif) Mataram. Drs. H. L. Mujitahid ditunjuk sebagai Wali Kota Mataram pertama. Selanjutnya Kota Administratif Mataram ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Dati II Mataram, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1993.¹³ Wilayah Mataram saat itu terdiri dari tiga kecamatan yaitu kecamatan Mataram, kecamatan Ampenan dan kecamatan Cakranegara.

Pesatnya pertumbuhan kota menyebabkan perlunya dilakukan pemekaran. Oleh karenanya sejak tahun 2007 wilayah kecamatan di Kota Mataram dimekarkan menjadi enam kecamatan yaitu Kecamatan Mataram, Selaparang, Ampenan, Sekarbela, Cakranegara dan Sandubaya. Di enam kecamatan ini terdapat 50 kelurahan yang terdiri dari 297 lingkungan (setingkat dusun).

¹² Jamaluddin, *Penyusunan Sejarah*..., 37.

¹³ Menteri dalam negeri kala itu, Moch. Yogi S Memet pada Tanggal 31 Agustus 1993 melantik Drs. H. L. Mas'ud sebagai Wali Kota Mataram. Selengkapnya lihat *Ibid.*

Topografi dan Demografi

Kota Mataram berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut dengan rentang ketinggian sejauh 9 km. Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan *tuff* yang merupakan endapan *alluvial* yang berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Rinjani. Secara visual wilayah Mataram terlihat seperti lempengan batu pecah yang di bawahnya terdapat lapisan pasir.

Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.4 °C sampai dengan 32.10 °C. Kelembaban maksimum 92% terjadi pada bulan Januari, April, Oktober dan November, sedangkan kelembaban minimum 67% terjadi pada bulan Oktober. Rata-rata penyinaran matahari secara maksimum terjadi pada bulan Februari. Sementara jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan curah hujan rata-rata mencapai 1.256,66 mm per tahun, dan jumlah hari relatif 110 hari per tahun.

Gambar 3.1
Peta Kota Mataram

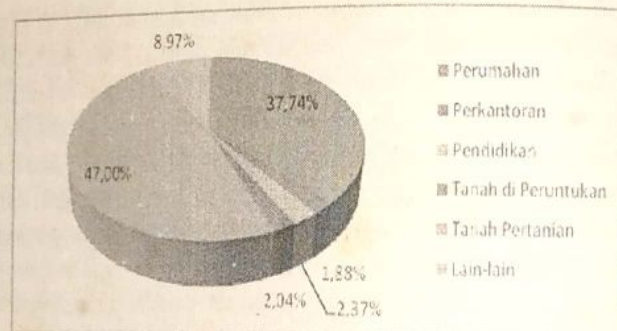


Hingga tahun 2009, penggunaan lahan di Kota Mataram didominasi oleh kawasan perumahan (37,74%) dan pertanian (47,00%). Dalam perkembangannya, berdasarkan data tahun 2008-

2009 terjadi konversi lahan yang cukup besar mencapai sekitar 4.80 Ha/tahun. Kondisi seperti ini berakibat pada berkurangnya lahan pertanian dan area terbuka hijau. Padahal sebagaimana diketahui, kebutuhan akan ruang terbuka hijau merupakan sesuatu yang urgen bagi warga kota. Tentang persentase penggunaan lahan sebagaimana tampak dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.1

Komposisi Penggunaan Lahan di Kota Mataram Tahun 2009



Sumber: Dinas PU Kota Mataram, 2009

Terkait dengan kondisi kependudukan, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kota Mataram mencapai 402,3 ribu jiwa (terdiri dari 198,9 ribu laki-laki dan 203,4 ribu perempuan). Tingkat penyebaran penduduk di Kota Mataram tidak merata di semua kecamatan. Kecamatan Ampenan dan kecamatan Mataram adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, masing-masing 78,6 ribu jiwa dan 72,9 ribu jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Sekarbela, yaitu sebesar 53,1 ribu jiwa. Oleh karenanya, kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Ampenan yakni sebesar 19,55%. Kepadatan penduduk berikutnya secara berturut-turut berada di kecamatan Mataram yakni sebesar 18,13%, kecamatan Selaparang sebesar 18,06%, kecamatan Cakranegara sebesar 15,91%, kecamatan Sandubaya sebanyak 15,14 %. Sedangkan kepadatan terkecil berada kecamatan Sekarbela yakni sebesar 13,21 %.

Dengan luas wilayah sekitar 61,30 kilo meter persegi, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Mataram sebesar 6,6 ribu jiwa per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah kecamatan Ampenan sebesar 8,3 ribu jiwa per kilo meter persegi, sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah kecamatan Sekarbela yaitu sebesar 5,2 ribu jiwa per kilo meter persegi.

Secara umum, rasio perbandingan jenis kelamin penduduk Kota Mataram adalah sebesar 98. Artinya jumlah penduduk perempuan 2 persen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sex rasio terbesar terdapat di kecamatan Ampenan yakni sebesar 101 dan yang terkecil terdapat di kecamatan Mataram yaitu sebesar 95. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel rasio jumlah penduduk berikut ini.

Tabel 3.1
Rasio Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (000 jiwa)			Seks Ratio
		Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Ampenan	39,6	39,1	78,7	101
2	Sekarbela	26,2	27,0	53,1	97
3	Mataram	35,6	37,3	72,9	95
4	Selaparang	35,5	37,1	72,6	96
5	Cakranegara	31,6	32,4	64,0	98
6	Sandubaya	30,4	30,5	60,9	100
Jumlah Total		198,9	203,4	402,3	98

Sumber :Sensus Penduduk 2010 BPS Kota Mataram

Laju pertumbuhan penduduk Kota Mataram pertahun dalam sepuluh tahun terakhir (2000 s/d 2010) sebesar 1,96 persen. Dari data statistik, laju pertumbuhan penduduk kecamatan Sekarbela adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu 3,94 persen. Adapun laju pertumbuhan penduduk yang terendah terdapat

di kecamatan Selaparang yakni sebesar 0,41 persen. Kecamatan Ampenan, walaupun menduduki jumlah penduduk tertinggi namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk menempati urutan ke-empat yakni 2,00 persen. Jumlah penduduk apabila dibagi dengan jumlah Rumah Tangga akan menghasilkan rata-rata anggota rumah tangga. Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 di Kota Mataram berjumlah 111.436 rumah tangga. Ini artinya bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah rata-rata sebanyak 4 orang. Rata-rata anggota rumah tangga di setiap kecamatan berkisar antara 3 orang sampai dengan 4 orang.

Tabel 3.2
Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga berdasar Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Rumah tangga (000)	Jumlah penduduk (000)	Rata-rata Anggota Rumah tangga
1	Ampenan	20,7	39,1	4
2	Sekarbela	15,7	27,0	3
3	Mataram	19,3	37,3	4
4	Selaparang	22,6	37,1	3
5	Cakranegara	17,0	32,4	4
6	Sandubaya	16,1	30,5	4
Jumlah Total		111.4	402,3	4

Sumber: Sensus Penduduk 2010 BPS Kota Mataram

Sebagai kota termaju di propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram termasuk kota multikultur. Hampir semua suku bangsa hidup di kota yang juga menjadi ibukota propinsi Nusa Tenggara Barat ini, seperti suku Sasak, Bali, Samawa, Arab, Cina, Jawa, Bugis dan lain-lain. Suku terbesar adalah suku Sasak, penduduk asli pulau Lombok. Berikutnya suku Samawa yang berasal dari Bima, Dompu dan Sumbawa. Suku Jawa dan Bali banyak menempati pusat kota. Suku Bali yang beragama

Hindu merupakan penduduk yang banyak mendiami wilayah Cakranegara. Sebagian besar suku Bali adalah keturunan punggawa kerajaan Karangasem yang pernah memerintah pulau Lombok.

Posisi Mataram yang berada dekat dengan kawasan pantai menjadikan Mataram termasuk salah satu destinasi wisata yang paling banyak diminati wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan posisi seperti ini, Mataram juga menjadi pintu gerbang bagi tujuan-tujuan wisata ke tempat lainnya di pulau Lombok.

Sebagai ibukota propinsi, hampir semua kantor seperti kantor Gubernur, kantor DPRD pemerintahan berada di maupun kantor milik swasta berada di kota yang memiliki motto "*Maju, Religius dan Berbudaya*" ini.¹⁴ Selain itu, berbagai pusat perbelanjaan modern juga tumbuh di kota Mataram. Lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi saat ini juga menjamur di kota Mataram. Keberadaan lembaga pendidikan ini, menarik dicermati mengingat sebagian lembaga pendidikan didirikan atas dasar semangat keagamaan. Banyak lembaga pendidikan tersebut dikelola oleh organisasi atau yayasan keagamaan.

¹⁴ Penjelasan lebih rinci mengenai motto kota adalah sebagai berikut. *Maju* ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mataram. *Religius* diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan *muammallah* serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. *Berbudaya* diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani. Lihat Buku Saku Kota Mataram tahun 2011. Buku Saku Kota Mataram Tahun 2011, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram

Sosial Keagamaan

Sebagaimana dipaparkan di bagian lain tulisan ini, bahwa masyarakat Mataram merupakan masyarakat multikultur, multi etnis dan multi agama. Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk Kota Mataram beragama Islam (352.021), Hindu (39.575), Katolik (3.104), Kristen (3.855), Budha (1.601) dan Konghucu (1.145). Komposisi penduduk berdasar agama selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Jumlah Pemeluk Agama Di Kota Mataram Tahun 2010

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	Mataram	59.106	776	1.040	12.185	120	40	73.267
2	Selaparang	65.253	597	361	6.030	245	-	72.486
3	Cakranegara	48.415	1.236	671	13.266	621	215	64.424
4	Sandubaya	53.457	617	467	5.140	193	321	60.195
5	Ampenan	75.293	527	515	1.570	343	551	78.799
6	Sekarbela	51.497	102	50	1384	79	18	53.130
Jumlah		352.021	3.855	3.104	39.575	1.601	1.145	402.301
Persentase		87 %	1 %	1 %	10 %	0,3 %	0,2 %	100 %

Sumber :Sensus Penduduk 2010 BPS Kota Mataram

Kegiatan keagamaan marak berlangsung di kota Mataram. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari banyaknya keberadaan sarana tempat ibadah masing-masing agama. Hampir semua tempat ibadah terlihat di kota Mataram. Sarana tempat ibadah yang paling banyak terlihat adalah masjid. Keberadaan masjid tidak hanya terdapat di kota Mataram melainkan juga terdapat di seluruh penjuru pulau Lombok. Maka wajar jika pulau Lombok terkenal dengan sebutan "pulau seribu masjid".

Pola pembangunan masjid rata-rata dilakukan secara gotong royong. Masyarakat secara swadaya dan swadana membangun masjid yang ada di lingkungan masing-masing. Antusiasme masyarakat dalam membangun masjid menyebabkan di hampir setiap lingkungan (setingkat dusun) berdiri 2 sampai 3 buah masjid seperti nampak di kawasan Dasan Agung.

Di kampung yang berjarak kurang dari 2 km dari kantor Gubernur NTB ini hampir setiap lingkungan memiliki lebih dari satu masjid. Karena jumlah masjid lebih dari satu, maka untuk kegiatan salat Jumat harus dilakukan secara bergantian dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Sebagai contoh jika Minggu pertama, salat Jumat diadakan di masjid Gapuk, maka *jumatan* berikutnya diadakan di masjid Pelita. Pada Jumat ketiga dan keempat, secara berturut-turut salat Jumat diadakan di masjid Perigi atau Pejeruk Timur. Demikian seterusnya, sehingga setiap masjid memiliki kesempatan yang sama untuk diadakan salat Jumat.

Tabel 3.4
Data Sebaran Tempat Peribadatan

No	Kec	Islam					Gereja	Pura	Wihara
		Masjid	Musala	Ponpes	Majlis-Taklim	TPQ			
1	Mataram	41	64	7	25	11	2	34	-
2	Selaparang	53	80	-	40	37	3	6	-
3	Ampenan	22	62	6	10	28	3	8	2
4	Sekarbela	34	32	2	25	31	-	2	-
5	Cakranegara	55	40	4	10	31	4	109	2
6	Sandubaya	39	72	4	62	50	-	11	1
Jumlah		244	350	23	172	188	12	170	5

Sumber: Diolah dari Data Emis Kemenag Provinsi NTB 2009

Fenomena banyaknya masjid di Kota Mataram merupakan satu hal yang menarik untuk dicermati. Secara teologis, antusiasme masyarakat Muslim Mataram dalam membangun masjid sangat terkait dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan umatnya untuk mendirikan dan memakmurkan masjid. Salah satunya adalah anjuran dalam al-Quran surat Al-Taubah ayat 18.¹⁵ Ayat ini biasanya

¹⁵ Artinya "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk".

sering disampaikan para khatib dan ustad dalam khotbah Jumat maupun pengajian agar umat Islam berlomba-lomba membangun masjid dan memakmurkannya. Ayat ini biasanya dirangkai dengan hadis Nabi yang artinya: "barang siapa membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah-rumah di surga."

Sedangkan secara sosiologis, tingginya animo masyarakat dalam membangun masjid juga bisa dilihat sebagai semacam kontestasi dari banyaknya Pura (tempat persembahyangan umat Hindu) di kota Mataram. Seperti terlihat di lingkungan-lingkungan Hindu, hampir setiap rumah warga Hindu memiliki pura. Mulai dari Sanggah, pura yang ada di tiap keluarga. Pura Maksan di tingkat lingkungan hingga pura Dalem yang ada di tingkat banjar (setingkat kecamatan). Jumlah pura yang ada di kota Mataram jauh lebih banyak dari catatan statistik yang ada di Kementerian Agama.

Kuatnya nuansa keagamaan baik di komunitas Hindu maupun Islam menjadikan Mataram memilih jargon kota "Maju, Religius dan Berbudaya". Pihak pemerintah kota berupaya membangun kota dengan visi menyeimbangkan antara keagamaan dan kemajuan atau modernitas. Pembangunan dan kemajuan kota diharapkan bernafaskan nilai-nilai agama sekaligus memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Berbagai kegiatan keagamaan bersekala besar sering berlangsung di Mataram. Di kota ini sering digelar acara besar keagamaan seperti Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) untuk umat Islam dan Utsawa Dharma Gita (UDG) untuk umat Hindu. Kegiatan Utsawa Dharma Gita (UDG) tingkat Nasional VIII bahkan pernah diselenggarakan di kota Mataram ini.¹⁶

Nuansa keagamaan juga dapat dilihat dari semangat masyarakat kota dalam memperingati hari-hari besar keagamaan. Bagi kalangan

¹⁶ Berbagai lomba sudah digelar mengiringi pelaksanaan UDG di antaranya lomba pembacaan sloka, dharma wacana, palawak dan parade kidung. Berbagai jenis lomba yang digelar lokasinya tersebar. Seperti lomba pembacaan sloka dipusatkan di *Jaba Pisan* Pura Meru, kemudian lomba dharma wacana di *Jaba Kalih* Pura Meru. Selanjutnya parade kidung di Taman Mayura dan pelawak yang dilaksanakan di Taman Budaya, Mataram.

Muslim Lombok, kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dilakukan secara unik dan khas. Hampir setiap keluarga, mengadakan tasakuran dengan memasak aneka makanan dan jajanan. Selain disantap di rumah dan mengundang sanak saudara, rekan kerja dan teman, tasakuran juga diadakan di masjid. Perayaan maulid Nabi di Mataram, dan di hampir seluruh wilayah Lombok, berlangsung sangat meriah. Selain pengajian umum, setiap remaja dan takmir masjid biasanya juga menggelar aneka perlombaan yang diikuti oleh anak-anak dan remaja. Seperti *Musabaqoh Qira'atil Qur'an* (lomba membaca al-Qur'an dengan lagu indah), puitisasi al-Qur'an, lomba pidato dengan tema-tema keislaman, panjat pinang (*Jorakan*) dan lain-lain.

Semarak keagamaan juga semakin terasa manakala Ramadhan tiba. Berbagai pengajian untuk menyambut datangnya bulan suci bagi umat Islam ini digelar di setiap masjid. Setiap hari, terutama di malam hari selama bulan Ramadhan, pembacaan ayat suci al-Quran (*tadarus*) dilakukan di masjid-masjid dengan menggunakan *loud speaker*. Tadarus biasanya dilakukan selepas salat Isak dan Tarawih hingga larut malam. Suasana semakin meriah menjelang hari raya Idul Fitri. Di malam tanggal satu Syawal biasanya diadakan takbir keliling dan pawai lampion. Dalam kegiatan pawai dan takbir keliling tersebut, setiap lingkungan menampilkan berbagai kreasi seperti membuat miniatur masjid, miniatur al-Qur'an yang dihiasi lampion warna-warni.

Seolah tidak mau ketinggalan dengan umat Islam, geliat keberagaman umat Hindu sebagai umat mayoritas kedua di Mataram juga tak kalah semarak. Berbagai upacara hari besar agama Hindu seperti Sarawasti, Galungan, Kuningan, Pujawali atau pawai ogoh-ogoh berlangsung meriah dan khidmat. Seperti ketika perayaan hari Nyepi misalnya, hampir tiap gang yang ada di perkampungan Hindu ditutup dan dijaga oleh *pecalang*. Pada saat Nyepi berlangsung, kondisi kota sangat sunyi dan sepi. Keadaan ini kerap menimbulkan perasaan tidak senang oleh penganut agama lain. Sebagian warga non-Hindu terkadang menyampaikan keluhan kurang bebas beraktivitas. "Kalau pas Nyepi, kita dilarang cari makan keluar", demikian keluh Joni dan Eka warga yang kos di kampung Karang Jasi dan Karang Ledé.

Menanggapi keluhan seperti ini sebagian besar warga Hindu menyatakan bahwa seharusnya mereka menghargai tradisi agama Hindu. Dalam sebuah *Focus Group Discussion* (FGD), seorang peserta yang bernama Niluh menyatakan "Kan cuma sekali setahun. Itu pun jauh-jauh hari sudah dipermaklumkan. Jika ada yang di luar Hindu sebaiknya mencukupi kebutuhannya sebelum Nyepi berlangsung".¹⁷

Sehari sebelum Nyepi, masyarakat Hindu setiap tahun rutin menggelar pawai ogoh-ogoh. Sebuah pawai keliling kota Mataram dengan mengarak boneka raksasa yang bentuknya sangat beragam. Sebagian besar boneka yang terbuat dari material kertas bekas ini berbentuk buta kala. Setelah diarak keliling kota, boneka-boneka tersebut selanjutnya dibakar sebagai simbol sirnanya angkara murka. Kegiatan pawai ogoh-ogoh ini selain melibatkan hampir semua *banjar* Bali di wilayah Mataram, tak jarang juga melibatkan sebagian warga Muslim. Untuk meramaikan kegiatan tahunan ini, panitia pawai sering mengundang kelompok-kelompok musik tradisional Sasak untuk ikut mengiringi. Sebagai contoh adalah keterlibatan grup musik "Taruna Nunggal" dari Narmada Lombok Barat. Keterlibatan warga Muslim dalam pawai tersebut memperlihatkan bahwa relasi sosial dan toleransi berlangsung cukup baik antara komunitas Hindu dan Muslim di Kota Mataram.

Sosial Ekonomi

Dari sisi ekonomi, kondisi ekonomi Mataram relatif lebih baik dibanding wilayah lain di propinsi NTB. Salah satu indikator untuk menilai kondisi ekonomi tersebut adalah Produk Domestik Regional Brutto (PDRB). Seperti dipublikasikan oleh BPS Kota Mataram, PDRB Kota Mataram pada triwulan IV-2010 mencapai Rp. 1,241 triliun.

Rincian mengenai Produk Domestik Regional Brutto tersebut sebagaimana tertera dalam table berikut ini.

¹⁷ Rekaman FGD dengan peserta aktivis keagamaan yang terdiri 10 remaja Hindu dan 10 remaja Muslim tanggal 18 Agustus 2011 di Aula Sangkareang Kantor Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3-5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram
Tahun 2008-2010

Lapangan Usaha	2008		2009		2010 *)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian	164.891,34	4,55	173.741,72	4,20	47.968,60	3,86
Pertambangan dan Penggalian	1.420,30	0,04	895,85	0,02	202,34	0,02
Industri Pengolahan	366.763,72	10,12	430.190,96	10,39	149.397,72	12,04
Listrik, Gas & Air Bersih	40.374,79	1,11	47.488,46	1,15	9.338,19	0,75
Bangunan	276.117,54	7,62	346.163,59	8,36	115.958,24	9,34
Perdagangan Hotel & Restoran	710.506,66	19,60	825.078,54	19,93	230.381,20	18,56
Pengangkutan & Komunikasi	1.101.329,59	30,39	1.192.868,40	28,81	351.526,18	28,32
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	552.271,19	15,24	634.041,99	15,31	196.878,95	15,86
Jasa-Jasa	410.662,71	11,33	489.883,15	11,83	139.500,75	11,24
Jumlah	3.624.337,84	100	4.140.352,66	100	1.241.152,17	100

*) data pada Triwulan IV tahun 2010. Sumber: BPS Kota Mataram, 2011

Indikator ekonomi juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh laju pertumbuhan ekonomi kota Mataram pada triwulan IV-2010 tumbuh sebesar 0,10 persen. Kondisi ini tampaknya terpengaruh oleh kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2010 yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -1,54 persen dari triwulan sebelumnya. Di tahun 2010, sejumlah sektor mengalami peningkatan pertumbuhan. Salah satunya yang terbesar adalah sektor bangunan sebesar 7,85 persen. Sedangkan sektor jasa, serta sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat. Adapun sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram diikuti dengan fluktuasi laju inflasi. Data tiga tahun terakhir, laju inflasi di Kota Mataram mengalami penurunan dari 13,29% pada tahun 2008 menjadi 3,14% pada tahun 2009. Laju inflasi kembali tinggi pada tahun 2010 yang naik menjadi 7,48%.¹⁸

Selain PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, patut diperhatikan adanya indikator makro ekonomi lainnya seperti kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Menarik untuk dicatat, meskipun tingkat inflasi di Mataram dapat ditekan dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun ke tahun, namun hal ini masih belum memberi pengaruh signifikan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin kota.

Tabel berikut ini memberi gambaran secara jelas bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih relatif tinggi yakni sebesar 20% di tahun 2010. Angka ini hanya menyusut kurang dari setengah persen di tahun 2011 yang mencapai 19,59%. Masih belum membaiknya kondisi makro ekonomi berakibat

¹⁸ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2012 (Mataram: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2012).

pada belum terdongkraknya IPM Mataram. Sesuai tabel berikut IPM kota Mataram masih belum beranjak dari angka 70.

Tabel 3.6
Perkembangan Indikator Makroekonomi Kota Mataram

No.	Indikator Makro Pembangunan	Tahun		
		2009	2010*	2011**
1.	Pertumbuhan PDRB	8,32 %	7,92 %	7,83 %
2.	Laju Inflasi	10,23 %	10,02 %	3,36 %
3.	PDRB (Rp)			
	Menurut harga berlaku	4.047.840	4.569.754	4.569.754
	Menurut harga konstan	2.026.792	2.187.248	2.187.248
4.	PDRB per kapita (Rp)			
	Menurut harga konstan	5.397.496	5.692.740	5.692.740
	Menurut harga berlaku	10.779.720	11.893.679	11.893.679
5.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	375.506	402.254	438.457
6.	Jumlah Penduduk (KK)	105.560	116.116	126.567
7.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	18 %	20 %	19,59 %
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,06 %	1,10 %	1,09 %
9.	Angka Melek Huruf	92 %	90 %	99,54 %
10.	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	66	66,25	66,64
11.	Angka kematian bayi (1/1000 jiwa)	40,51	40	40,82
12.	Angka Rata-Rata lama Sekolah (Tahun)	9,5	10	10

13.	Angka Partisipasi Sekolah (%)	95	97	>105.27
	- Usia 7 -12 tahun	97	99	> 114.19
	- Usia 13 - 15 tahun	72	73	> 116.96
	- Usia 16 - 18 tahun			
14.	Tingkat pengangguran terbuka	10,78 %	10 %	10 %
15.	IPM (Indeks)	72,5**	72,99	73

* Angka Sementara dari BPS Kota Mataram.

** Angka Proyeksi RPJMD Kota Mataram 2010-2015.

Persoalan ekonomi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kondisi sosial kota Mataram adalah tingginya tingkat pengangguran. Problem ketenaga-kerjaan melibatkan dua aspek yaitu penyediaan lapangan kerja/usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kota Mataram sebesar 10,78% pada tahun 2009. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 11,89%. Hal menarik lainnya, bergesernya lapangan pekerjaan sektor pertanian ke sektor industri, dan perdagangan, mengindikasikan bahwa Kota Mataram menuju perekonomian modern.

Jumlah tenaga kerja di Kota Mataram secara umum meningkat baik di sektor formal maupun informal. Sebagai gambaran, pada 2009 jumlah penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) sebesar 272.128 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 8.561 jiwa. Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap tahun meningkat sebesar 3,30% yang artinya dari seluruh jumlah penduduk usia produktif di Kota Mataram yang aktif secara ekonomi sebesar 3,30%.¹⁹

¹⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.

Tabel 3.7
Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2009

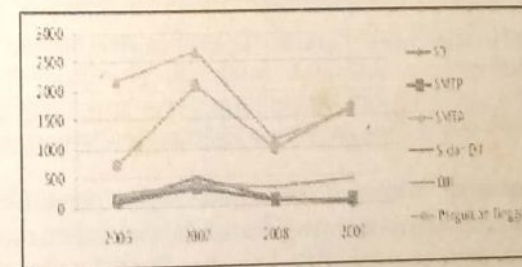
Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
SD/MI	9	6
SMP/MTs	58	12
SMA/SMK/MA	953	672
D-I dan D-II	30	19
D-III	156	270
Perguruan Tinggi	798	876
Jumlah	2.004	1.855

Sumber: BPS Kota Mataram, 2010.

Berikutnya berdasarkan Hasil Survei Ekonomi Daerah Kota Mataram tahun 2009, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Mataram sebesar 57,25%. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah pencari kerja dengan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menduduki tempat tertinggi. Disusul kemudian oleh lulusan Perguruan Tinggi dan Diploma Tiga (D-III). Secara lebih rinci mengenai gambaran para pencari kerja di Kota Mataram dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut ini.

Grafik 3.2.

Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
di Kota Mataram Tahun 2006 s/d 2009



Sumber: BPS Kota Mataram, 2010.

Pendidikan, Kesehatan dan Politik

Kondisi pengembangan pendidikan di kota Mataram cukup baik. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan. APK SMP dan SMA mulai tahun 2008-2010 telah mencapai angka 100 %.

Tabel 3.8
Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Indikator Pendidikan

No	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Angka Melek Huruf	91,80%	91,80%	92%	95,50%	95,50%
2.	Rata Lama sekolah	8,40	9,05	9,05	9,2	9,50
3.	Angka Partisipasi Kasar					
	- SD/MI/Paket A	108,30	105,67	107,45	108,36	108,98
	- SMP/MTs/Paket B	94,04	96,21	101,18	101,94	101,66
	- SMA/SMK/MA/Paket C	69,75	72,28	75,46	100,28	101,64
4.	Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI/Paket A	94,82	96,06	96,38	95,86	97,50
	- SMP/MTs/Paket B	72,12	74,31	72,93	77,48	76,64
	- SMA/SMK/MA/Paket C	54,15	52,39	57,43	71,32	71,79
5.	Angka Pendidikan yang ditamatkan	91,22%	94,35%	96,35%	96,51%	96,51%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka pendidikan yang ditamatkan belum dapat menjangkau 100%, hal ini menunjukkan bahwa masih adanya peserta didik yang belum dapat menuntaskan pendidikannya. Namun selama periode 2005-2010 angka

pendidikan yang ditamatkan mengalami peningkatan dari 91,22% pada 2005 menjadi 96,51% pada 2009.

Dari sisi kesehatan, selama lima tahun terakhir derajat kesehatan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan, antara lain: angka kematian bayi, umur harapan hidup, dan prevalensi gizi buruk. Jabaran rinci mengenai hal ini sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Indikator Kesehatan

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per / 1000 kelahiran hidup	42,89	42,00	41,58	41,25	-
2.	Umur Harapan Hidup (UHH)		64,7	64,9	65,66	65,15
3.	Prevalensi Gizi buruk	7,20%	3,60%	2,71%	1,51%	-

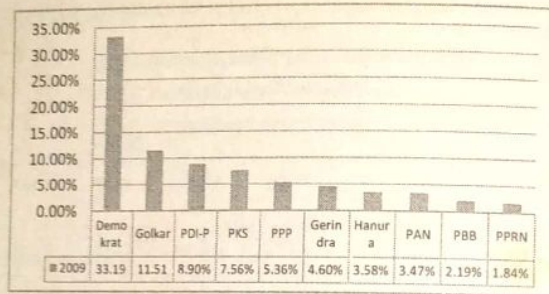
Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2010

Angka kematian bayi selama empat tahun mengalami penurunan dari 42,89 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 41,25 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008. Kenyataan ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Mataram di Kota Mataram mencapai 65 -66 tahun. Selama kurun lima tahun terakhir prevalensi gizi buruk mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 7,20 % menjadi hanya sebesar 1,51 % Tahun 2008.

Berikutnya terkait kondisi sosial politik. Salah satu indikator keterlibatan politik adalah keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu). Keterlibatan warga Mataram dalam pemilihan umum terlihat cukup menggembirakan. Hampir semua penduduk yang

mempunyai hak pilih telah ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hasil pemilu legislatif tahun 2009 partai Demokrat memperoleh suara terbanyak di Mataram. Disusul berikutnya partai Golkar, PDI-P dan PLS. Rincian Perolehan suara sepuluh besar partai politik pada pemilu tahun 2009 sebagaimana nampak dalam tabel berikut ini.

Grafik 3.3
Hasil Pemilu 2009 Di kota Mataram



Sumber: Diolah dari data KPU Propinsi NTB

Selain organisasi partai politik, sejumlah organisasi masyarakat berbasis keagamaan baik Islam maupun Hindu berkembang cukup baik di kota Mataram. Di komunitas Muslim misalnya berkembang organisasi seperti Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah (kesemuanya lengkap dengan struktur organ di bawahnya seperti Himmah untuk NW, Pemuda Ansor, Muslimat). Sedangkan di komunitas Hindu, masyarakat tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).²⁰ Untuk konteks Mataram, struktur PHDI ini efektif hingga tingkat desa.

²⁰ PHDI merupakan organisasi resmi keagamaan yang menyatukan seluruh komponen Hindu yang ada di Indonesia. Kehadiran PHDI juga dimaksudkan untuk secara tidak langsung menegaskan dan sebisa mungkin mendekatkan keyakinan teologis Hindu sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah konsep monoteisme yang berbeda dengan Hindu yang ada di India. Lihat Freek L. Bakker, "Balinese Hinduism and the Indonesian State: Recent Developments", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153, 1ste Afl.* (1997): 15-41. Published by: KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies <http://www.jstor.org/stable/27864809>. (diakses tanggal 01 Nopember 2011)

Adapun di tingkat pemuda dan mahasiswa terdapat organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW), IMM dan lain-lain. Sementara untuk kalangan generasi muda Hindu berdiri Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHD). Adapun organisasi lintas umat beragama berdiri Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Selain FKUB, semua organisasi keagamaan ini dapat dikategorikan sebagai organisasi yang bersifat *bonding*, membangun ikatan solidaritas di tingkat internal kelompok. Sedangkan organisasi semacam FKUB karena sifatnya lintas agama idealnya mampu menjembatani (*bridging*) relasi antar komunitas.

Keterlibatan warga masyarakat dalam organisasi sosial seperti di atas ditambah partisipasi mereka dalam pemilu lima tahunan merupakan indikator penting tumbuhnya budaya kewargaan. Keterlibatan warga dalam organisasi sukarela, selain merupakan manifestasi dari tradisi berasosiasi, juga merupakan modal penting bagi terbangunnya kerjasama antar warga. Sikap dan perilaku warga seperti ini ditambah kesediaan mereka berpartisipasi dalam pemilu merupakan sebagian indikator diterimanya demokrasi di Mataram. Penjelasan lebih mendalam mengenai hal-hal ini selengkapnya dipaparkan pada bab empat berikut ini.

4

Benarkah Hindu Lebih Toleran?

Budaya kewargaan dicirikan oleh adanya partisipasi aktif, solidaritas, sikap saling percaya, toleransi, norma resiprositas, ekualitas, dan jaringan antar warga. Para sarjana masih berdebat ada tidaknya perbedaan antara tradisi agama dengan tingkat budaya kewargaan. Perdebatan ini jika dikelompokkan mengerucut pada dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan bahwa perbedaan tradisi agama melahirkan perbedaan pada sikap saling percaya antara warga. Terdapat perbedaan antara derajat budaya kewargaan yang dipengaruhi oleh tradisi agama yang pada gilirannya juga berpengaruh terhadap apresiasi pada demokrasi. Agama tertentu seperti Islam dan Katolik adalah agama yang dituduh kurang cocok dengan demokrasi.

Pandangan kedua menyatakan budaya kewargaan dan demokrasi tidak dipengaruhi oleh tradisi agama tertentu. Konsolidasi demokrasi mungkin bias dijelaskan oleh faktor agama, tetapi ini bukan satu-satunya. Penjelasan tentang budaya kewargaan dan konsolidasi demokrasi akan lebih tepat jika dikaitkan dengan kondisi

social, politik, ekonomi dan keamanan suatu Negara. Sebelum menntukan mana di antara dua pandangan ini yang mendekati kebenaran, berikut dipaparkan potret budaya kewargaan yang berlangsung pada komunitas Hindu dan Muslim di Kota Mataram. Deskripsi tentang potret budaya kewargaan ini diperoleh dengan cara menjaring pandangan responden dari dua komunitas Hindu dan Muslim melalui pengisian kuesioner yang telah disiapkan. Selain itu, guna memperoleh data yang lebih komprehensif sekaligus membantu analisa, bagian ini juga dilengkapi dengan paparan hasil wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci.

Partisipasi

Unsur budaya kewargaan yang pertama adalah partisipasi. Partisipasi didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan setiap warga Negara dalam proses politik, kebangsaan dan demokrasi. Penekanan keterlibatan terletak pada warga Negara bukan Negara. Secara garis besar, inti dari partisipasi adalah kesukarelaan. Setiap warga Negara secara sukarela, tanpa dipaksa dan tidak dibayar, terlibat dalam mempengaruhi kebijakan Negara.¹ Partisipasi politik bukan hanya menyangkut pikiran, tetapi juga sikap dan kecenderungan. Lebih rinci, Verba, Schlozman, Bardy, memberi batasan bahwa partisipasi politik paling tidak mencakup empat hal; partisipasi dalam pemilihan umum, kegiatan kampanye, kontak dengan pejabat publik dan aktif terlibat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan.

Keterlibatan warga dalam proses politik berlangsung melalui dua cara; konvensional maupun non-konvensional. (Mujani, 39). Bentuk partisipasi politik yang bersifat konvensional dapat dilakukan dengan dan melalui saluran resmi yang telah diatur oleh Negara

¹ Lihat Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, dan Henry E. Bardy, *Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 38-39.

seperti ikut serta dalam pemilihan umum, kampanye dan lain-lain. Sedangkan bentuk partisipasi politik yang bersifat non-konvensional misalnya menggelar demonstrasi, melakukan protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat dan menyimpang, melakukan mogok, mengadakan boikot dan lain sebagainya.

Keterlibatan warga Mataram dalam proses politik terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Semenjak era reformasi, keterlibatan warga dalam proses politik dengan mudah dapat disaksikan di hampir semua wilayah di Indonesia. Terbukanya kran demokrasi pasca berakhirnya rezim Orde Baru, memungkinkan warga dapat secara bebas mengartikulasikan afiasi politik melalui saluran konvensional seperti ikut pemilihan umum, menyampaikan pendapat dan melakukan demonstrasi atau protes manakala terdapat kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang.

Pada penelitian ini, partisipasi warga yang dikaji tidak hanya berdasarkan partisipasi politik semata. Seperti disinggung di bagian awal, bahwa partisipasi kebangsaan yang dilakukan warga juga menarik untuk dikaji. Partisipasi kebangsaan dapat dipahami sebagai adanya rasa nasionalisme di kalangan warga negara. Bentuk partisipasi tersebut bermacam-macam, mulai dari yang sederhana misalnya dengan ikut memperingati hari kemerdekaan republik Indonesia, hingga kesediaan warga dalam mengikuti wajib militer untuk bela negara. Partisipasi kebangsaan, dengan kata lain, melibatkan rasa kebangsaan yang tinggi yang diwujudkan dengan bangga sebagai bagian Negara Indonesia dan kesediaan membela tanah air. Indikator seperti ini masuk dalam bagian penting dalam *World Value Survey* (WVS).²

Dari survei yang dilakukan di penghujung tahun 2012, ditemukan data bahwa tingkat partisipasi politik warga Mataram tergolong tinggi. Lebih dari 90% responden menyatakan selalu berpartisipasi dalam

² Selengkapnya silahkan lihat Hans-Dieter Klingemann, "Mapping Political Support in 1990s: A Global analysis." Dalam *Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance*. Ed. Pippa Norris (Oxford: Oxford University Press, 1999). 38.

pemilihan umum. Mereka juga sering terlibat dalam agenda-agenda yang dilakukan partai politik seperti menghadiri sosialisasi partai, kampanye dan lain-lain.

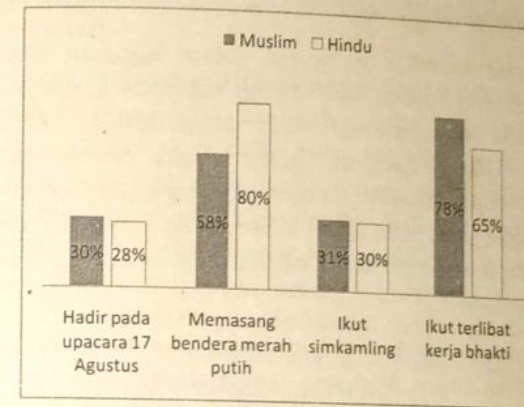
Partisipasi politik sebagaimana ditunjukkan oleh warga tersebut paralel dengan partisipasi kebangsaan. Tingginya partisipasi politik juga membuahkan dukungan yang kuat terhadap pemerintah. Salah satunya dapat dilihat dari ketaatan warga masyarakat dalam membayar pajak dan selalu mentaati peraturan pemerintah. Baik komunitas Muslim maupun komunitas Hindu menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sesuatu yang penting. Sebanyak 95% responden Muslim dan sebanyak 97% warga Hindu, menyatakan penting membayar pajak. Demikian juga dengan pertanyaan pentingnya setiap warga negara selalu mentaati peraturan pemerintah. Baik warga Hindu maupun Muslim menyatakan penting untuk selalu taat terhadap peraturan pemerintah. Tingkat persentase untuk pertanyaan ini mencapai 98%. Angka persentase ini jumlahnya sama untuk responden Hindu maupun Muslim.

Bentuk partisipasi kebangsaan lainnya adalah pada keterlibatan warga dalam memperingati hari-hari besar Nasional Republik Indonesia. Bentuk partisipasi dalam hal ini sangat beragam seperti kesediaan menghadiri upacara bendera, memasang bendera merah putih saat perayaan hari kemerdekaan hingga kesediaan untuk ikut wajib militer, apabila Negara membutuhkan. Partisipasi kewargaan juga dapat dilihat dari sejauh mana warga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan komunitas mereka masing-masing seperti aktif terlibat dalam kegiatan sistem pengamanan lingkungan (siskamling) dan kerja bhakti.

Grafik berikut ini menunjukkan tingkat partisipasi warga Hindu dan Muslim dalam berbagai kegiatan yang melibatkan warga dari berbagai komunitas. Persentase yang tertera dalam grafik merupakan akumulasi jawaban responden yang menyatakan sangat sering dan cukup sering terlibat dalam berbagai kegiatan kewargaan.

Grafik 4.1

Partisipasi dalam Kegiatan Kebangsaan dan Sosial



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa partisipasi warga dalam kegiatan siskamling ternyata sangat rendah. Di komunitas Muslim angkanya mencapai 31% sedangkan di komunitas Hindu hanya sebesar 30%. Ada dua kemungkinan mengapa partisipasi warga dalam kegiatan siskamling tergolong rendah. *Pertama*, kondisi Mataram yang selama ini relatif aman, sehingga kegiatan siskamling atau ronda malam tidak diadakan secara aktif di lingkungan masing-masing. *Kedua*, sebagian menyatakan bahwa tugas memelihara keamanan telah cukup dilaksanakan oleh aparat keamanan. Sahrin, bukan nama sebenarnya menyatakan, bahwa kondisi di Mataram sejauh ini aman. Pernyataan lebih kritis disampaikan Amak Madil yang menyatakan bahwa tugas menjaga keamanan kampung seharusnya menjadi tanggung jawab polisi. Masyarakat harus dilindungi oleh aparat keamanan karena masyarakat telah membayar kewajiban yakni membayar pajak.³

Dukungan masyarakat terhadap kegiatan sosial di tingkat kelurahan juga tergolong tinggi. Sebanyak 78% responden Muslim

³ Wawancara dengan Sahrin dan Amak Madil tanggal 11 Desember 2012.

menyatakan sering terlibat dalam kegiatan kerja bhakti atau gotong royong di desa. Sedangkan di kalangan Hindu sebanyak 65% warga menyatakan sering kerja bhakti.

Persentase keterlibatan warga dalam kegiatan sosial kerja bhakti atau gotong royong lebih tinggi daripada partisipasi warga dalam kegiatan memperingati hari kemerdekaan. Keterlibatan warga dalam upacara bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan republik Indonesia yang jatuh tanggal 17 Agustus hanya berkisar di angka 30%. Sedangkan sebanyak 80-% warga menyatakan sering memasang bendera merah putih di rumah masing-masing saat perayaan 17 Agustus.⁴

Kegiatan memperingati hari besar kemerdekaan, meskipun bagi sebagian kalangan dianggap sangat simbolis, tetapi memberi makna yang luar biasa dalam meningkatkan rasa nasionalisme warga. Kegiatan memperingati hari kemerdekaan paling tidak dapat membantu mengingatkan jasa para pejuang kemerdekaan dalam mendirikan republik ini. Mengingat jasa para pendiri bangsa dengan sendirinya akan mengingatkan semua pihak akan cita-cita luhur pendiri bangsa dalam membangun Negara menuju kemakmuran.

Mengenai rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan upacara, hal ini sangat terkait dengan status seseorang. Kegiatan apel bendera

⁴ Dalam hal memasang bendera terdapat perbedaan cukup signifikan antara komunitas Hindu dan Muslim di mana menurut data survei komunitas Hindu lebih sering memasang bendera merah putih untuk memperingati hari kemerdekaan republik Indonesia. Data seperti ini tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa loyalitas berbangsa komunitas Muslim lebih rendah daripada komunitas Hindu. Pemasangan bendera sangat terkait dengan kondisi perumahan umat Islam dan Hindu. Sebagaimana hasil observasi, sebagian besar komunitas Hindu memiliki atau tinggal di perumahan yang rata-rata memiliki akses jalan secara langsung. Sementara perumahan Muslim di kota Mataram kurang (kalau tak boleh dibilang tidak memiliki) akses jalan secara langsung. Pola pemukiman Hindu hingga hari ini masih terawat dengan pola bidak catur, di mana rata-rata rumah warga saling berpunggungan dan langsung menghadap jalan raya. Sementara pemukiman Muslim, karena keterbatasan lahan, jarang yang mempunyai akses jalan. Bendera biasanya dipasang di tepi jalan besar bukan gang-gang kecil. Kondisi semacam ini merupakan salah satu alasan rendahnya persentase warga Muslim yang memasang bendera merah putih saat peringatan hari kemerdekaan.

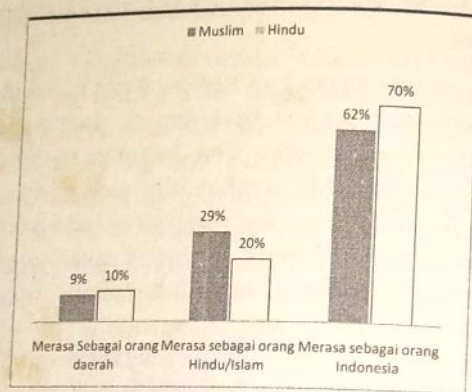
memperingati hari kemerdekaan biasanya dilakukan oleh mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pelajar dan mahasiswa. Sedangkan bagi warga umum, tak banyak dari mereka yang menghadiri kegiatan tersebut.

Semarak memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia di Mataram memang tidak semeriah dengan yang terjadi di pulau Jawa. Di banyak daerah di pulau Jawa, kegiatan memperingati hari kemerdekaan biasanya telah terlihat dan terasa sejak memasuki bulan Agustus. Banyak warga yang melakukan kerja bhakti, mengecat rumah terutama di bagian puncak, mengecat pagar hingga membuat gapura bertuliskan "Dirgahayu Republik Indonesia" Suasana seperti ini menurut pengamatan penulis jarang terlihat di kota Mataram. Tak banyak kegiatan perlombaan yang dilakukan warga dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia ini.

Suasana seperti di atas berbeda dengan yang terjadi di daerah-daerah di Jawa. Sejumlah lomba yang melibatkan warga dalam jumlah besar diselenggarakan di hampir di tiap komunitas. Ada lomba panjat pinang, lomba merangkai bunga, lomba balap karung, tarik tambang, sepak bola, bola volley hingga lomba masak.

Sementara di Mataram, berbagai lomba seperti ini karang terlihat kecuali di beberapa perumahan seperti di perumahan BTN Griya Pagutan, Perumahan Tanjung Karang. Rendahnya persentase warga yang terlibat dalam kegiatan memperingati hari kemerdekaan tidak berarti rendahnya rasa nasionalisme. Grafik berikut ini memberi gambaran tentang pandangan warga Hindu dan Muslim yang lebih merasa orang Indonesia daripada sebagai orang daerah, atau orang Islam/Hindu.

Grafik 4.2.
Ikatan Kebangsaan



Terkait dengan rasa nasionalisme, ditemukan data sebanyak sebanyak 60% responden Muslim dan 68% responden Hindu menyatakan sebagai orang Indonesia. Persentase ini mengalahkan perasaan sebagai orang Islam atau Hindu yang masing-masing hanya mencapai 29% dan 20%. Atau perasaan sebagai orang daerah yang hanya mencapai 9% dan 10%. Perasaan sebagai orang Indonesia menjadi salah satu indikator kuat tidaknya nasionalisme seseorang. Perasaan sebagai orang Indonesia seperti inilah yang memungkinkan kesediaan warga untuk ikut wajib militer apabila sewaktu-waktu Negara memerlukannya. Data survei menunjukkan sebanyak 70% warga Mataram menyatakan bersedia melakukannya wajib militer.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rasa nasionalisme warga Mataram tergolong tinggi. Beberapa informan yang sempat penulis wawancarai menyatakan bahwa membela tanah air bukan hanya penting tetapi adalah kewajiban setiap warga Negara. Seorang tuan guru di Kota Mataram menyatakan bahwa membela tanah air adalah sebagian dari iman. Tuan guru ini juga menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membela tanah air.⁵

⁵ Wawancara dengan TGH. Sohimujn Faisol, 26 Desember 2012.

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh Hindu dari Cakranegara. Menurut tokoh masyarakat ini, salah satu fakta sejarah mengenai keterlibatan warga Mataram dalam membela tanah air adalah perlawanan rakyat Mataram dalam mengusir penjajah. Menurutnya, sebagaimana tercatat dalam sejarah- jenderal Belanda van Ham yang pernah menguasai Mataram meninggal dalam serangan yang dilancarkan rakyat Mataram pada abad ke-19. Makam van Ham di Karang Jangkong di Mataram adalah bukti sejarah tentang kegigihan rakyat Mataram dalam membela tanah air.⁶ L. Anggawa, seorang kesediaan Lombok masuk dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada September 1945 adalah bukti bahwa rasa nasionalisme warga Lombok tak perlu diragukan lagi.⁷

Solidaritas

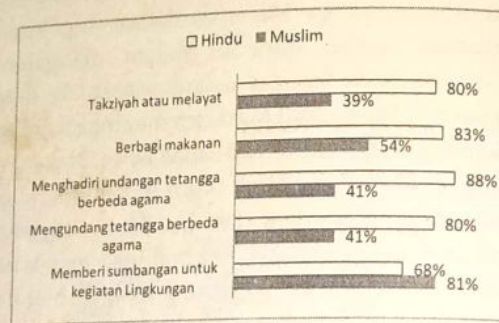
Solidaritas adalah unsur berikutnya dalam *civic culture*. Ia merupakan manifestasi dari sikap saling percaya antar personal. Beberapa indikator untuk menilai tingkat solidaritas warga antara lain adanya perasaan senasib-sepenanggungan, kesediaan membantu anggota masyarakat lain yang memerlukan pertolongan, mengembangkan konsep persaudaraan di antara anggota masyarakat, dan pemberdayaan program *charity* (semisal zakat infaq dan sedekah dalam Islam, atau *Yadnya* dalam komunitas Hindu).

Data survei menunjukkan bahwa tingkat solidaritas antar warga di dua komunitas Hindu dan Muslim sebagaimana tampak dalam grafik berikut ini.

⁶ Wawancara dengan Oka Netra, 18 Nopember 2012.

⁷ Wawancara dengan L. Anggawa 4 Desember 2012.

Grafik 4.3.
Tingkat Solidaritas Sosial



Dari gambar grafik di atas terlihat bahwa secara umum tingkat solidaritas masyarakat Hindu lebih tinggi dibanding dengan umat Islam. Hanya 41% responden Muslim yang sering mengundang tetangga yang berbeda agama apabila mereka menggelar acara atau mempunyai hajatan keluarga. Persentase tersebut lebih kecil dibanding kesediaan warga Hindu yang mencapai 80%. Ini berarti umat Hindu lebih sering mengundang tetangga mereka yang berbeda agama dibanding dengan umat Islam.

Data ini paralel dengan frekuensi menghadiri undangan dari tetangga mereka yang berbeda agama. Hanya sebanyak 41% responden Muslim yang menyatakan sering menghadiri undangan tetangga yang berbeda agama. Persentase ini lebih kecil dari persentase responden Hindu yang mencapai 88%.

Demikian juga terkait dengan kesediaan berbagai atau saling antar makanan, sebanyak 54% warga Muslim mengaku sering melakukannya. Sedangkan di komunitas Hindu, persentasenya lebih tinggi yakni sebesar 83%. Persentase yang lebih tinggi juga dapat ditemui di komunitas Hindu kegiatan melayat tetangga berbeda agama yang meninggal dunia. Pada komunitas Hindu, sebanyak 80% responden menyatakan sering ikut melayat ke tetangga mereka yang berbeda agama. Sedangkan di kalangan Muslim persentasenya hanya mencapai 39%. Persentase solidaritas Muslim lebih tinggi dibanding dengan komunitas Hindu terjadi pada kesediaan untuk membantu

kegiatan bersama yang diadakan warga di tingkat lingkungan, di mana angkanya mencapai 81%, dua puluh lebih tinggi dibanding responden Hindu.

Adanya perbedaan persentase antara komunitas Hindu dan Muslim ini menarik untuk dikaji. Mengapa komunitas Hindu lebih sering mengembangkan ikatan solidaritas kepada tetangga mereka yang berbeda agama dibanding dengan kesediaan warga Muslim dalam mengembangkan hal yang sama. Adakah fenomena ini berkaitan dengan paham dan tradisi keagamaan yang dikembangkan masing-masing komunitas? Benarkah asumsi Inglehart bahwa tradisi agama memberi pengaruh terhadap sikap percaya dan solidaritas antar warga? Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas pada bab lima. Sedangkan pada paparan berikut ini akan ditampilkan pola solidaritas yang terbangun antar warga yang dikenal dengan tradisi saling.

Di kota Mataram dan juga di wilayah Lombok lainnya, terdapat tradisi saling antar makanan yang dikenal dengan istilah *saling jot* atau *joting*. Ketika ada anggota masyarakat yang memiliki hajatan keluarga atau sedang merayakan hari besar agama, biasanya mereka mengantar (*ngejot*) makanan kepada tetangga di sekitarnya. Umat Muslim biasa mengantar makanan ke umat Hindu, demikian juga sebaliknya umat Hindu juga mengantar makanan kepada tetangga mereka yang beragama Islam. Tradisi ini dulu pernah berlangsung secara baik dan terbukti mampu merawat kohesifitas dan harmoni sosial di Kota Mataram. Tradisi ini juga mampu meluruskan sekat-sekat primordialisme antar warga.,

Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir, tradisi antar makanan (*saling jotting*) terutama yang melibatkan warga berbeda agama ini, mulai jarang ditemui. "Kalau dulu kita biasa saling *ngejot*, tapi tidak tahu sekarang ini, fenomena seperti itu jarang sekali dilakukan. Paling-paling hanya kepada saudara", demikian kata H. Muslih, tokoh masyarakat dari lingkungan Karang Tapan.⁸ Hal senada juga disampaikan Made Bambang, salah seorang tokoh masyarakat Hindu di kawasan Cakranegara. Menurutnya, upaya menjaga

⁸ Wawancara dengan H. Muslih tanggal 6 Desember 2012.

solidaritas sosial dengan tetangga dipupuk dengan cara saling mengundang dan saling antar makanan terutama di saat perayaan hari besar agama.⁹ Namun, tradisi semacam ini, saat ini muali kurang dilakukan oleh warga kota Mataram.

Masih banyak *tradisi saling* yang dapat dipandang sebagai sarana menjalin kerukunan umat beragama dan mengembangkan harmoni sosial antar warga. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dipaparkan pada sub bab norma resiprositas.

Sikap Saling Percaya (*Trust*)

Sikap saling percaya antar warga merupakan bagian terpenting dari budaya kewargaan. *Interpersonal trust* kata Putnam (1993) merupakan unsur modal sosial yang sangat penting. *Trust* mendasari munculnya sikap solidaritas dan menjadi modal bagi pengembangan *civic engagement* (ikatan antar warga). Dalam iklim demokrasi modern, rasa saling percaya mutlak diperlukan agar perjalanan demokrasi tidak tersendat oleh sikap saling curiga yang terkenal sangat tinggi di kancah politik. Pada masyarakat dengan tingkat kepercayaan antar warga yang kecil, sulit dibayangkan demokrasi dapat berjalan secara maksimal. *Trust* menjadi kata penting yang dapat mengurangi ongkos politik. Para elit harus percaya dengan elit politik yang lain. Elit hendaknya mengembangkan satu keyakinan bahwa lawan politiknya tidak akan memberangusnya manakala ia menjadi pemenang dalam pemilihan.¹⁰

Perkembangan sikap saling percaya antar warga sangat terkait dengan kultur demokrasi. Sebagian sarjana berpendapat bahwa sikap saling percaya sebetulnya buah dari proses demokrasi yang stabil. Ketika demokrasi telah mampu meyakinkan orang bawa setiap warga

⁹ Wawancara dengan Made Bambang 8 Desember 2012.

¹⁰ Ronald Inglehart, "Trust, Well-Being, and Democracy" dalam *Democracy and Trust*. Editor Mark E. Warren (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 98.

memiliki akses dan kesetaraan yang sama atas kebijakan pemerintah, maka kepercayaan tersebut akan muncul. Tetapi pendapat seperti ini dipertanyakan banyak sarjana. Putnam misalnya menyatakan bahwa meskipun di suatu wilayah mengembangkan sistem demokrasi yang sama, namun kepercayaan antar warga yang terbangun belum sepenuhnya sama. Ia memberi contoh kasus perbedaan sikap saling percaya antar warga di Irtalia Utara dan Italia Selatan. Menurutrya, meskipun kedua wilayah itu mengembangkan sistem demokrasi, sistem pemilu dan sistem penyelenggaraan Negara yang sama, namun perjalanan demokrasi di Italia Utara lebih maju dibanding dengan yang terdapat di Italia selatan.¹¹ Maka tidaklah mengherankan jika *civic engagement* jauh lebih berkembang di Italia Utara dan kurang maksimal di Italia Selatan.¹²

Tidak jauh berbeda dengan argumentasi Putnam di atas, Inglehart juga kurang sependapat bahwa lembaga demokrasi akan menghasilkan sikap saling percaya antara sesama warga. Ia mencontohkan kasus demokrasi di Amerika. Selama ini demokrasi di Amerika berjalan secara stabil. Itu berarti sikap saling percaya antar warga juga dengan sendirinya akan ikut terpelihara secara stabil pula. Namun kenyataannya, kata Inglehart, sikap saling percaya antar warga Amerika justru merosot sepanjang empat puluh tahun terakhir.¹³ Sebagai gantinya, lanjut Inglehart, sikap saling percaya melibatkan banyak dimensi yang mencerminkan keseluruhan warisan sejarah manusia termasuk faktor ekonomi, politik, agama dan lain sebagainya.¹⁴ Terkait dengan faktor agama, Inglehart menyebut bahwa perbedaan tradisi dalam agama-agama mempengaruhi sikap saling percaya antar warga. Sebagaimana dikutip oleh Mujani (2007), Inglehart menyatakan; "sikap saling percaya sesama warga benar-

¹¹ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat. Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 120.

¹² Mujani, *Muslim Demokrat ...*, 120

¹³ Inglehart, "Trust ...", 88.

¹⁴ *Ibid.*

benar berhubungan erat dengan tradisi agama dari masyarakat tertentu... Masyarakat yang dipengaruhi oleh tradisi agama Protestan dan Konghucu secara konsisten menunjukkan tingkat sikap saling percaya antar sesama warga yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh agama Katolik dan Islam.¹⁵

Tesis yang dikemukakan Inglehart di atas dibantah oleh Mujani. Menurut survei yang dilakukan di Indonesia tahun 2001 dan 2002, tingkat atau derajat kepercayaan antar warga mungkin dipengaruhi oleh faktor agama, tetapi mungkin juga dipengaruhi oleh faktor lain semisal stabilitas politik dan keamanan sebuah bangsa.¹⁶ Selain itu, Mujani juga menjelaskan bahwa faktor kerusuhan bernuansa agama yang terjadi di Indonesia belakangan ini juga memicu munculnya sikap kurang cepat percaya terhadap orang lain. Di banyak tempat, orang tidak gampang percaya kepada orang lain mengingat sebelumnya telah terjadi kasus-kasus yang meresahkan warga. Keresahan semakin menguat, ketika aparat keamanan dinilai lamban dalam menangani setiap kerusuhan sosial. Akibatnya setiap orang berusaha untuk tetap waspada dan hati-hati termasuk kepada orang yang mungkin kurang ia kenal.

Terlepas dari perdebatan di atas, grafik berikut menggambarkan persentase responden Muslim dan Hindu menyangkut sikap saling percaya. Sikap saling percaya dalam penelitian ini tidak hanya dibatasi dengan pertanyaan seperti "apakah secara umum orang lain dapat dipercaya atau kita harus hati-hati?". Melainkan dikembangkan dengan sejumlah pertanyaan tentang misalnya pernah tidaknya seseorang meminjam atau meminjamkan uang kepada orang yang berbeda agama.

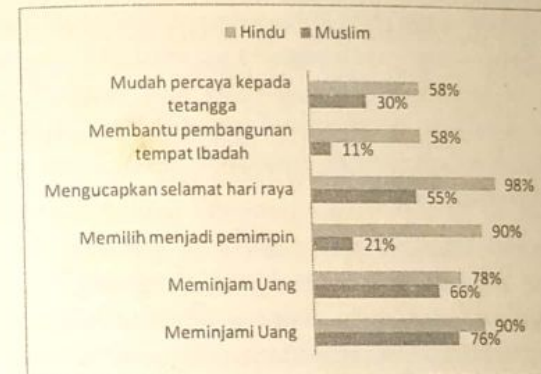
Praktek pinjam-meminjam tampaknya merupakan hal sederhana. Tetapi perlu dicatat bahwa transaksi ekonomi semacam ini dapat berlangsung manakala kedua belah pihak memiliki rasa

¹⁵ Mujani, *Muslim Demokrat* ..., 121.

¹⁶ Mujani, *Muslim Demokrat* ..., 126.

saling percaya yang tinggi. Tanpa adanya rasa saling percaya sangat sulit dibayangkan praktek seperti dapat berlangsung. Seseorang hanya akan meminjamkan uangnya kepada orang lain yang secara personal dapat ia percayai. Sebaliknya seseorang tidak akan bersedia meminjamkan uangnya kepada orang atau pihak lain manakala, ia meragukan *track record* atau kurang percaya kepada calon peminjam.

Grafik 4.4.
Sikap saling percaya antar-personal



Dari paparan grafik di atas, lagi-lagi ditemukan rasa saling percaya warga Hindu relatif lebih tinggi dibanding warga Muslim. Sebagai contoh ketika diajukan pertanyaan seberapa sering Ibu/Bapak meminjamkan uangnya kepada tetangga atau orang yang berbeda agama? Sebanyak 76% responden Muslim menyatakan sering. Sedangkan di kalangan responden Hindu, sebanyak 90%. Sedangkan untuk kasus meminjam uang, persentasenya hampir seimbang antara responden Muslim dengan Hindu, yakni secara berturut-turut sebesar 66% dan 78%.

Perbedaan mencolok terlihat pada kesediaan responden dalam memilih orang yang berbeda agama menjadi pemimpin. Di kalangan umat Hindu, kesediaan mereka memilih orang lain menjadi pemimpin sebesar 90%. Sedangkan di kalangan komunitas Muslim hanya mencapai 21%. Dari data ini dapat dimengerti bahwa persoalan memilih pemimpin merupakan isu yang sangat krusial di komunitas

Muslim. Umat Islam tidak mudah begitu saja menjatuhkan pilihannya terhadap pemimpin mereka tanpa terlebih dulu melihat latar belakang keagamaan mereka. Persoalan ideologis nampak lebih kental dalam hal memilih pemimpin di kalangan umat Islam.

Perbedaan tingkat kepercayaan antar warga yang berbeda antara komunitas Islam dan Hindu sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di atas memerlukan pengkajian lebih jauh. Perbedaan ini tidak dengan sendirinya membenarkan klaim-laim sarjana seperti Inglehart bahwa memang tradisi agama yang berbeda menentukan perbedaan tingkat kepercayaan atau *trust* antar warga. Perlu penelitian tentang kondisi dan posisi komunitas beragama itu sendiri. Posisi komunitas Hindu yang minoritas di Mataram bias jadi menjadi salah satu factor tingginya tingkat interpersonal trust ini. Perlu dikembangkan penelitian lain misalnya dengan membandingkan komunitas Hindu di Bali yang memang mayoritas.

Dalam hal memilih pemimpin atau pejabat publik, umat Muslim sering kali merujuk ajaran agama yang memang melarang untuk menjadikan orang di luar agama Islam menjadi pemimpin. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an (QS.3:28) yang secara tegas melarang umat beriman menjadikan orang-orang "kafir" sebagai pemimpin. Ayat ini biasanya disandingkan dengan ayat al-Quran (QS. 5: 51) yang mengharuskan umat Islam untuk tidak menjadikan orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Seorang tokoh masyarakat Muslim dari Kelurahan Karang Taliwang Cakranegara menyatakan bahwa sebisa mungkin dalam memilih calon pemimpin hendaknya didasarkan pada kesamaan iman.¹⁷ Tetapi, tokoh ini buru-buru menyatakan bahwa persoalan kesamaan agama hanyalah salah satu pertimbangan saja. Pertimbangan lainnya adalah kemampuan dan kejujuran tokoh atau calon pemimpin tersebut. "Seagama tapi tidak jujur ya... tidak usah dipilih., Seagama tetapi kurang memiliki kemampuan atau atau istilahnya tidak mampu ya.. tidak usah dipilih".¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Nahwi, 3 Januari 2013.

¹⁸ Wawancara dengan Nahwi, 3 Januari 2013.

Dalam kegiatan sosial ekonomi, interaksi antara warga Hindu dan Muslim di Mataram berlangsung secara alamiah. Kegiatan saling memerlukan dalam kegiatan perdagangan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Hindu berjualan bersama dengan warga Muslim di lapak-lapak yang disediakan oleh pemerintah kota Mataram. Keakraban antar warga berbeda etnis dan agama seperti ini dapat disaksikan di pasar Dasan Agung, Pasar Cemara, pasar Bertais, pasar Karang Lelede dan lain-lain.

Di pasar Karang Lelede misalnya, toko-toko yang menjual sembilan bahan pokok (*sembako*) milik warga Muslim berdampingan dengan kios-kios milik warga Bali yang menjual aneka kebutuhan persembahyangan umat Hindu seperti kembang, dupa, janur (daun kelapa), anyaman bambu dan lain-lain. Banyak bahan baku untuk kepentingan upacara keagamaan tersebut dipasok oleh warga Muslim dari desa-desa di sekitar Mataram seperti dari desa Gunung Sari dan Narmada. Para petani di kedua wilayah ini biasa memasok janur dan bambu ke para pengepul Hindu di sekitar pasar. Demikian juga untuk kepentingan pembuatan tuak yang biasa dijual di pinggir jalan perkampungan Hindu, bahan utamanya (buah nira), sebagian dipasok oleh orang Islam dari Gunung Sari.

Para kusir Cidomo (delman khas Lombok) atau tukang ojek sepeda motor, sebagian besar Muslim Sasak, yang mangkal di sekitar pasar-pasar tersebut juga terbiasa memberi jasa angkutan pada warga Hindu Bali. Di bagian luar pasar, Ibu Nursiyah, pemilik warung yang berjualan *plecing* (sayuran kangkung khas Lombok) di pinggir jalan Palapa Karang Tapen misalnya mengaku bahwa pelanggannya bukan hanya warga Muslim dari Karang Tapen tetapi juga warga Bali dari Karang Lelede dan Karang Jasi. Demikian juga dengan Mak Wayan pemilik toko kelontong yang sebagian pekerjanya adalah gadis Muslim Sasak juga biasa melayani pelanggan Muslim di pasar Dasan Agung.

Toleransi

Toleransi merupakan pandangan dan sikap yang menghargai dan menghormati perbedaan baik perbedaan pandangan, perbedaan organisasi, afiliasi politik maupun perbedaan dalam beragama maupun berkeyakinan. Perbedaan merupakan sesuatu yang sangat lazim pada masyarakat multikultur seperti Indonesia. Beraneka ragam budaya, adat istiadat serta keyakinan ada di sekitar kita. Dalam kajian mengenai toleransi dan pengembangan budaya demokrasi, ditemukan fakta bahwa demokrasi hanya akan berkembang manakala masyarakat pendukungnya memiliki sikap toleran. Tanpa adanya toleransi sulit dibayangkan demokrasi dapat berlangsung secara baik di suatu masyarakat

Toleransi umat beragama idealnya berlangsung di tingkat internal umat beragama, maupun antar umat beragama. Pada tingkat internal setiap penganut agama hendaknya menghormati pandangan dan keyakinan atau aliran keagamaan yang berbeda. Sementara toleransi antar umat beragama dilakukan melalui pengembangan sikap menghargai keyakinan atau agama orang lain, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama mereka. Termasuk dalam toleransi antar umat beragama adalah kesediaan untuk memberi izin bagi orang lain untuk mendirikan tempat ibadah.

Sikap toleran dapat muncul manakala setiap umat beragama tidak memutlakkan pandangan atau keyakinan yang ia miliki. Seorang penganut agama memang dituntut untuk meyakini bahwa agama yang dipeluknya sebagai yang paling benar, paling baik dan paling menjanjikan keselamatan di hari kemudian. Tetapi pengakuan dan keyakinan seperti ini tidak dengan sendirinya berarti membolehkan atau mengabsahkannya untuk menyalahkan atau menghina keyakinan agama lain. Di sinilah penting untuk dikaji sikap umat beragama terhadap agama lain. Cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid, secara tipologis membedakan tiga tipe pola keberagamaan yaitu; inklusif, eksklusif, pluralis.¹⁹ Beberapa sarjana lain membuat

¹⁹ Nurcholish Madjid, "Dialog di antara Ahli Kitab (*ahl al-kitāb*): Sebuah Pengantar", dalam George B. Grose dan Benjamin J. Hubbard (editor), *Tiga Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog*, penerj. Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 1998), xix.

pembagian yang sedikit berbeda. Terrence W. Tilley misalnya mengemukakan empat sikap yaitu Eksklusivisme, inklusifisme, pluralisme dan partikularisme;²⁰ sedangkan Raimundo Panikkar, juga dengan empat sikap, yaitu: Eksklusivisme, inklusifisme, paralelisme, dan pluralisme.²¹

Eksklusivisme adalah pandangan yang mengklaim bahwa agamanyalah yang paling benar. Bagi kelompok ini kebenaran, keselamatan, dan berbagai keutamaan lainnya hanya pada agama yang dianutnya. Pandangan ini hanya mengakui kebenaran tunggal yakni agama yang dianutnya. Agama lain dipandang tidak memiliki kebenaran demikian juga tidak menawarkan keselamatan.

Eksklusivisme sebagai sebuah sikap yang meyakini bahwa agamanya yang paling benar terutama nampak sekali dalam agama-agama yang memiliki kitab suci. Keunggulan pada kitab suci yang dimiliki, dianggap lebih superior dibanding agama lain. Arnod Toynbe dalam bukunya *An Historian Approach to the Study of Religion* menyebut bahwa ketiga agama yakni Yahudi, Kristen dan Islam memiliki tendensi ke arah Eksklusivisme dan intoleransi yang tinggi.²² Mereka masing-masing mengklaim sebagai pemilik kebenaran yang ultim. Hal ini sedikit berbeda dengan agama-agama di India yang masih mengakui adanya kemiripan-kemiripan manifestasi dari agama lain.

Dalam sejarah agama-agama, bahkan eksklusitas itu dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan pandangan yang bersifat dikotomis seperti pembagian "agama wahyu dan non-wahyu", "samawi-ardhi", "semitik dan non-semitik".²³ Klasifikasi semacam

²⁰ Lihat Terrence W. Tilley, *Postmodern Theologies and Religious Diversity* (Maryknoll, New York: Orbis Book, 1996), 158.

²¹ Lihat Raimundo Panikkar, *Dialog Intra Religius*, terj. oleh Kelompok Studi Filsafat Driyarkara (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 18-24.

²² Lihat George R. Wilkers, "Religions Attitudes to The Middle East Peace Process" dalam *Can Faith Make Peace? Holy Wars and The Resolution of Religious Conflicts*, Philip Bronthead and Damien Keown ed. (London and New York: IB Tauris, 2007).

²³ Kautsar Azhari Noer, "Agama Langit versus Agama Bumi: Sebuah Telaah atas Klasifikasi Agama-agama", *Titik - Temu Jurnal Dialog Peradaban*, Vol.3, No.2 Januari-Juni (2011): 72-96.

ini dapat ditemukan dalam karya-karya para teolog Kristen seperti Thomas Aquinas²⁴ maupun Muslim seperti Abd al-Karim al-Shahrastani.²⁵ Pola klasifikasi semacam ini dimaksudkan untuk meneguhkan superioritas agama yang satu terhadap yang lain.

Sikap beragama yang eksklusif biasanya menghalangi seseorang untuk menjalin interaksi secara bebas dengan kelompok yang berbeda. Hal ini karena adanya keyakinan bahwa agama (keyakinan) miliknya-lah yang dianggap paling benar. Sikap semacam ini kemudian menjadi pedoman bahkan perintah untuk mengajak orang lain mengakui kebenaran yang dimiliki. Setelah pengakuan didapat maka kelompok lain akan diajak untuk masuk ke dalam rengkuhan agamanya. Munculnya perasaan milik sendiri sebagai superior dan milik orang lain sebagai kurang baik karena tidak mengandung keselamatan semacam ini menjadi menjadi motivasi bagi kelompok keagamaan untuk menyalahkan agama lain. Pada tingkat tertentu mereka akan berusaha melarang agar yang (agama) lain tidak lagi menjalankan agamanya. Sikap eksklusif semacam ini jelas menjadi batu sandungan bagi terwujudnya integrasi sosial, karena menghindari adanya pengakuan, kesetaraan dan pada kondisi tertentu membatasi partisipasi yang lain.

Tipologi sikap dasar beragama berikutnya adalah inklusifisme.²⁶ Inklusifisme adalah pandangan dan sikap keagamaan yang mengklaim bahwa agama yang dianutnya memiliki kebenaran dan keselamatan yang lebih sempurna dibanding dengan agama lain. Menjadi inklusif

²⁴ Thomas Aquinas adalah teolog Kristen yang kali pertama membedakan agama alami dan agama wahyu. Lihat Kautsar Azhari Noer, "Agama Langit versus Agama Bumi...", 72-96.

²⁵ Al-Shahrastani adalah seorang teolog Ash'ari yang membagi penduduk dunia dalam dua kategori besar yakni ; para penduduk yang beragama /berkeyakinan, dan penduduk yang mengikuti hawa nafsu dan bersekte-sekte. Lihat Muhammad Abd al-Karim al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, ed. 'Abd al-Aziz Muhammad al-Wakil (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

²⁶ Secara leksikal, *inclusivism is the practice of trying to incorporate diverse or unreconciled elements into a single system*. Lihat Oxford Dictionary of English, (Oxford: Oxford University Press, 2003), 876.

berarti menyadari bahwa kebenaran dan keselamatan bukanlah monopoli agama-agama tertentu, melainkan sangat mungkin ditemukan dalam agama-agama lain.²⁷ Sikap ini lebih baik satu tingkat dibanding sikap eksklusif.

Inklusifisme bukan berarti tidak punya pendirian, melainkan tetap meyakini bahwa agamanya benar, tetapi pada saat yang sama juga mengakui ada bagian-bagian tertentu dalam agama lain yang mengandung kebenaran. Inklusifisme sebagai sebuah pandangan yang merupakan kebalikan dari eksklusifisme mulai dikembangkan dalam setiap agama. Dalam agama Katolik misalnya sejak Konsili Vatikan II mengakui adanya keselamatan di luar gereja. Doktrin *extra ecclesia nulla salus*, dengan sendirinya telah direvisi. Karl Rahner memperkenalkan satu istilah yang terkenal sekaligus kontroversial yakni *anonymous Christian* yang intinya ada keselamatan di luar kristen. Meskipun istilah ini sendiri menimbulkan kontroversi karena dianggap menempatkan agama Kristen superior di atas yang lain, tetapi semangat inklusif telah muncul di kalangan Katolik setelah lama terkungkung dalam eksklusivisme.

Di kalangan Islam, banyak tokoh yang terlibat aktif mempromosikan hal ini. Menyebut di antaranya adalah Nurchlisch Madjid. Almarhum Cak Nur demikian tokoh ini akrab disapa telah memperkenalkan dan mempromosikan inklusifisme dalam beragama. Bagi Cak Nur, penganut agama-agama lain di luar Islam seperti orang Yahudi, Kristen, Hindu dan Budha akan masuk surga juga manakala mereka menyerah kepada yang Illahi.²⁸

²⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997).

²⁸ Selain menyatakan bahwa agama di luar Islam juga memiliki kebenaran dan keselamatan, Cak Nur juga sering menyebut pendapat Rasyid Ridha seorang pemikir pembaharu asal Mesir yang menyatakan bahwa di luar kaum Yahudi dan Kristen terdapat juga *ahl al-Kitab* seperti pengikut Majusi, Zoroaster, Budha, Hindu, dan Konfusianisme. Lihat. Nurcholish Madjid, *Islam agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam sejarah*, editor M. Wahyuni Nafis (Jakarta: Paramadina, 1995), 81-84. Bahkan Cak Nur juga sering menyebut bahwa Abd al-Hamid Hakim, tokoh pembaharu Sumatra Barat yang menyatakan bahwa Hindu, Budha, Agama Cina dan Je-

Sedangkan pluralisme adalah pandangan dan sikap keagamaan yang tidak berpretensi menghakimi pihak lain. Semua agama mempunyai kebenaran dan karenanya juga memiliki peluang memberi keselamatan. Pluralisme mengisyaratkan adanya pengakuan bahwa semua agama dan keyakinan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh keselamatan dan kebenaran. Pandangan ini muncul karena kebenaran yang mutlak hanya diketahui oleh Tuhan, sebuah kebenaran yang tak dapat dideskripsikan dengan bahasa manusia. Terbatasnya bahasa yang dimiliki manusia jelas tidak mampu mengungkapkan kebenaran Tuhan yang bersifat mutlak. Bahasa yang relatif tak akan mampu mengungkap kebenaran absolut.²⁹ Yang paling mungkin dilakukan manusia adalah mendekati kebenaran Tuhan, dan tidak bisa mengklaim bahwa yang dicapainya adalah kebenaran yang sejati sehingga menegaskan kebenaran yang juga sedang diupayakan oleh yang lain.

Islam sebagai agama yang turun setelah agama-agama besar dunia, memiliki pengalaman yang banyak sekali dengan keanekaragaman ini. Jacques Waardenburg sebagaimana dikutip oleh Harold Coward mencatat bahwa sejak kelahirannya Islam telah berjumpa dan berinteraksi dengan beragam keyakinan. Misalnya dengan orang-orang Kristen (lengkap dengan berbagai alirannya), Yahudi, kaum Mazdean, kaum Manikhean dan Sabian, kaum Haranain, para pengikut Budha, Hindu dan lain-lain.³⁰

pang selain merupakan *ahl al-Kitab*, juga merupakan agama-agama yang inti ajarannya bersumber pada ajaran tauhid. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan* (Jakarta: Paramadina, 1992), lxxii.

²⁹ Dalam *The Oxford Dictionary of World Religion*, pluralisme didefinisikan sebagai berikut: "Pluralism is a view, important in dialogue, that religions are diverse ways of leading the same ultimate truth and reality. All religions are corrigible and approximate ways of talking about the Absolute that cannot be described in human language." John Browker ed. *The Oxford Dictionary of World Religion*, (Oxford: Oxford University Press, 1997), 756.

³⁰ Setidaknya ada enam tahapan perjumpaan (*encounter*) Islam dengan agama-agama lain. Selengkapnya baca Harold Coward, *Pluralism: Challenge to World Religions* (New York: Orbis Books, 1985), 47-49.

Di samping itu, salah satu bukti sejarah otentik yang merekam tentang persentuhan Islam dengan kelompok-kelompok lain dapat dilihat dalam Piagam Madinah. Dalam kesepakatan Madinah, kota Yathrib ditetapkan sebagai tanah *haram*. Konsep *haram* pada masa itu dimaknai sebagai zona aman. Semua anggota masyarakat tanpa membedakan suku, agama, bebas melakukan perdagangan, berinteraksi secara aman. Semua anggota kelompok bertanggung jawab menjaga agar daerah ini tetap aman. Maka tidaklah mengherankan jika pada saat itu keterlibatan kelompok non-Muslim tidak hanya sebatas hubungan formal tetapi juga ikut mendanai perang atau bahkan berperang aktif bersama pasukan Muslim. Orang-orang Yahudi atau Nasrani yang ikut berperang juga mendapat bagian yang sama dengan pengikut Nabi.³¹

Namun demikian, tidak semua kelompok dalam Islam mempunyai pandangan yang sama terhadap pluralitas agama. Bagi sebagian kelompok menilai ajaran untuk mengembangkan sikap pluralis dinilai mengancam keimanan umat. Di Indonesia, isu pluralisme agama pernah menjadi isu perdebatan yang menarik. Bahkan salah satu lembaga keagamaan di Indonesia, MUI sempat mengeluarkan fatwa haram atas pluralisme melalui fatwa MUI nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005.³²

Tidak hanya kelompok Islam yang melarang mengikuti pluralisme, sebagian kelompok Krite ortodoks juga mengancam pluralisme. Bagi kelompok ini, pluralisme mengancam identitas, sendi-sendi dan nilai-nilai kekristenan yang mereka nilai merupakan kebenaran mutlak dari Tuhan. Pluralisme juga mengancam doktrin evangelisme dan misionarisme.³³

³¹ Lihat Robert G. Hoyland, "Sebeos, the Jews and the Rise of Islam," dalam *Medieval and Modern Perspectives on Muslim-Jewish Relation*, ed. R.L. Netter, (Amsterdam: Harwood Academic Publisher, 1995); 89 -102. 95. Dan juga Uri Rubin, *Between Bible and Qur'an. The Children of Israel and The Islamic Self- Image*, (Princeton: The Darwin Press, 1999), 51.

³² Lihat selengkapnya dalam http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php

³³ Sumanto al-Qurtuby, "Pluralisme, Dialog dan Peace Building Berbasis Agama di Indonesia" dalam *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009), 168-197.

Pemahaman orang atau kelompok mengenai pluralisme tidak sepenuhnya seragam. Ada banyak makna mengenai pluralisme. Ada pluralitas makna pluralisme. Thomas Banchoff menyebut bahwa pluralisme secara teologis mengandung makna harmoni, konvergensi dan kesesuaian banyak nilai agama-agama. Dengan demikian, secara teologis, pluralisme agama adalah lawan dari Eksklusivisme. Sementara dalam perspektif sosiologis, kata pluralisme merujuk pada pengertian keragaman dari tradisi-tradisi agama yang berbeda yang terdapat dalam ruang sosial dan budaya yang sama.³⁴

Mengapa sikap dasar dalam beragama ini perlu dikaji secara panjang lebar? Hal ini karena fakta hubungan antar agama sering terganggu akibat adanya pemutlakan terhadap pandangan dan keyakinan absolut dari setiap penganut agama. Agama hingga hari ini masih dipahami sebagai pembatas bagi munculnya interaksi sosial yang lebih luas. Klaim kebenaran yang menguat dari setiap pemilik agama menjadikan munculnya pandangan kelompokku atau agamaku yang paling benar sementara agama lain salah. Agamaku lah yang paling ortodoks. Sementara yang lain dianggap telah terkontaminasi dengan bidah (heterodoks).

Sejarah agama sebagaimana dicatat oleh Frederich Heiler penuh dengan pertentangan antar pemeluk agama yang didorong oleh pemutlakan ajaran agamanya. Orang-orang beriman sering bertentangan satu sama lain bahkan melibatkan perang dan memandang rendah keyakinan agama lain. Heiler juga menunjukkan fakta sejumlah kekejaman dari yang dilakukan oleh pengikut Konfusianisme terhadap pengikut Budha di Cina, nasib minoritas Islam di India juga nasib pengusiran orang-orang Yahudi dari kongregasi-kongregasi dan gethgo-gethgo mereka pada zaman abad pertengahan Kristen. Sejarah kelam perang salib antara Islam dan Kristen yang hingga hari ini dampaknya masih terasa juga akibat pemutlakan keyakinan ini. Bahkan dalam agama-agama yang

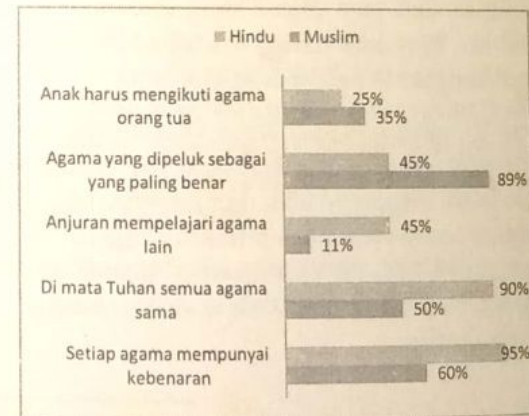
³⁴ Thomas Banchoff, *Religious Pluralism, Globalization, and World Politics* (New York: Oxford University Press, 2008), 4.

dianggap paling toleran seperti Hindu, soal perpindahan (konversi) agama juga menjadi persoalan yang mengganggu hubungan sosial antar manusia. Seorang Hindu yang masuk Kristen, Islam atau agama lain telah menyebabkannya terputus dari keluarga dan kastanya, dan bahkan dianggap lebih rendah dari kasta Paria.³⁵

Fakta bahwa eksklusifitas sikap beragama yang mendorong munculnya ketegangan dengan kelompok lain seperti di atas ternyata masih berlanjut hingga kini. Dalam konteks Indonesia, munculnya keinginan dari sebagian daerah untuk mengusulkan kebijakan publik berbasis agama juga sangat mungkin didorong oleh sikap-sikap semacam ini. Sikap truth claim dan memandang kelompok sendiri sebagai superioritas, mendorong kelompok tertentu mempunyai potensi bagi satu kelompok untuk meminggirkan kelompok lain.

Grafik berikut ini menggambarkan sikap toleransi umat terhadap umat lain.

Grafik 4.5
Inklusifitas dalam beragama



³⁵ Frederich Heiler, "Studi agama sebagai persiapan kerjasama antaragama" dalam *Metodologi Studi Agama*, ed. dan penterjemah Ahmad Norma Permata (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 23-256.

Dari grafik di atas, nampak terlihat sebanyak responden 60% Muslim dan 95% responden Hindu menyatakan setuju atas pernyataan bahwa setiap agama mempunyai kebenaran dan kesematan. Kebenaran dan keselamatan dimiliki oleh setiap agama karena di mata Tuhan semua agama sama. Keteguhan umat Muslim dalam meyakini agama Islam sebagai agama yang paling benar sebesar 89% jauh lebih tinggi dari responden Hindu sebesar 45%.

Wujud toleransi yang paling sederhana adalah mengucapkan selamat hari raya kepada tetangga yang berbeda agama. Berkaitan dengan kesediaan untuk mengucapkan selamat hari raya bagi orang lain yang berbeda agama ditemukan data bahwa sebanyak hampir 100% responden Hindu bersedia melakukannya. Sementara di kalangan Muslim, responden yang menyatakan pernah mengucapkan selamat hari raya bagi pemeluk agama lain hanya sebesar 55%. Persentase ini jauh lebih tinggi dari hasil survei serupa yang diadakan tim LIPI tahun 2007 di mana hanya sebesar 9,70% warga Muslim yang bersedia mengucapkan selamat hari besar agama pada penganut agama lain.³⁶ Rendahnya kesediaan mengucapkan selamat hari raya bagi orang yang beragama lain di kalangan Muslim bisa jadi sangat terkait dengan munculnya anjuran dari para ulama yang melarang umat Muslim melakukan hal itu. Termasuk dalam hal ini adalah larangan untuk menonton atau menghadiri perayaan agama lain.

Saat peneliti mengikuti salat Jumat di salah satu masjid di kota Cakranegara, penulis secara jelas mendengar peringatan khatib yang melarang umat Islam menonton atau ikut memeriahkan pawai *ogoh-ogoh*.³⁷ "Menonton pawai *ogoh-ogoh* termasuk bagian merayakan dan mensiarkan agama Hindu", demikian nasihat khatib tersebut. "Oleh karenanya haram hukumnya umat Islam menontonnya", demikian sang khatib melanjutkan.

³⁶ Muhammad Hisyam, dkk., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2007), 164.

³⁷ Setiap tahun pawai *ogoh-ogoh* diselenggarakan oleh umat Hindu di Kota Mataram. Pawai mengarak boneka raksasa berbentuk raksasa atau buta kala ini dilakukan sehari menjelang pelaksanaan hari raya Nyepi.

Mengucapkan selamat hari raya bagi pemeluk agama lain sering menjadi perdebatan di kalangan umat. Hampir setiap tahun, menjelang perayaan Natal misalnya, persoalan seperti ini kerap muncul dan menimbulkan pro dan kontra. Merespon keresahan masyarakat ini, Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan bahwa Kaum Muslim di Indonesia boleh mengucapkan "Selamat Natal" kepada kaum Kristiani yang sedang merayakan Natal. Ucapan ini bukan bagian dari mengikuti ritual agama Kristen atau Katolik, melainkan wujud toleransi kepada umat beragama yang berbeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Ini (ucapan selamat Natal) boleh, ini bukan ritual. Ini penghargaan atas sesama kaum beragama dan sesama masyarakat Indonesia," kata Menteri Agama, Suryadharma Ali, di Jakarta, Senin (24/12/2012).³⁸

Pendapat Menteri agama sebagaimana dikemukakan di atas merupakan salah satu langkah positif pemerintah dalam mengurangi eksklusifitas dalam beragama. Langkah ini meskipun kelihatannya sepele, namun untuk jangka panjang merupakan potensi pemberi semangat bagi berkembangnya kehidupan saling menghormati dan menghargai antar sesama pemeluk agama di Indonesia.

Masih terkait dengan toleransi antar umat beragama, adanya pengakuan bahwa agama sendiri sebagai yang paling benar berpengaruh terhadap kesediaan mempelajari agama orang lain. Sesuai hasil survei sebanyak 45% pemeluk agama Hindu memperbolehkan putra-putri mereka mempelajari agama orang lain. Sementara di kalangan Muslim, persentasenya sebesar 11%.

Selain hal di atas terdapat perbedaan pola transmisi pengetahuan keagamaan di kalangan anak-anak. Bagi mayoritas penganut Hindu,

³⁸ Lihat selengkapnya di berita berjudul "Menteri Agama : Muslim Boleh Ucapkan Selamat Natal" http://nasional.kompas.com/read/2012/12/24/20523543/Menteri_Agama.Muslim.Boleh.Ucapkan.Selamat.Natal diakses tanggal 16 Januari 2013; Pernyataan yang sama juga dapat dilihat di situs Berita Antara yang berjudul "Menag: ucapan selamat Natal halal" Senin, 24 Desember 2012 14:31 WIB | 4498 Views <http://www.antaraneews.com/berita/349960/menag-mengucapkan-selamat-natal-halal> dikutip tanggal 6 Januari 2013.

proses transmisi agama dilakukan melalui jalur keluarga. Pendidikan dan pembelajaran agama lebih banyak dilakukan di keluarga. Sedangkan di kalangan umat Islam, selain melalui keluarga, anak-anak juga memperoleh pengetahuan agama Islam melalui berbagai jalur pendidikan. Jalur pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan formal seperti lewat madrasah maupun pendidikan non-formal seperti mengikuti pengajian di masjid, musala dan pondok pesantren.

Upaya mengembangkan toleransi antar umat beragama dilakukan di antaranya dengan mendirikan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB). Forum Kerukunan Umat beragama atau disingkat FKUB³⁹ merupakan sebuah forum lintas agama yang unik. Di satu sisi ia merupakan lembaga bentukan negara dan didanai oleh negara yang terkadang rentan dalam jebakan kooptasi negara, tetapi di sisi lain organisasi ini dapat secara independen mengembangkan organisasinya secara otonom.⁴⁰ Keberadaan organisasi yang menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia hingga tingkat kabupaten ini merupakan potensi yang luar biasa dalam mempromosikan kerukunan intra dan antar umat beragama.

Dalam perspektif Putnam, FKUB dapat berperan penting dalam menjembatani (*bridging*) komunitas beragama yang sangat pluralistik. Ia bisa menjadi katalisator sekaligus menjadi penopang tugas pemerintah dalam upaya membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Dengan keanggotaannya yang bersifat lintas

³⁹ Dasar yuridis pendirian FKUB adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dan sejumlah peraturan daerah sesuai daerah masing-masing.

⁴⁰ FKUB memiliki sejumlah fungsi ideal di antaranya: 1) FKUB memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama kepada Gubernur dan Bupati atau walikota; 2) Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan majelis-majelis agama; 3) Menyalurkan aspirasi Umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah; 4) Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan Umat beragama; 5) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

agama, tak pelak lagi keberadaan FKUB akan dapat menjadi jembatan penghubung bagi komunitas agama yang berbeda-beda. Ragam persoalan yang muncul akibat dari konflik antar umat beragama dapat dimediasi oleh forum semacam ini.

Hanya saja, di tataran implementasi, sejumlah harapan ideal di atas belum sepenuhnya tercapai. Keberadaan organisasi yang telah ada sejak tahun 2006 ini berbeda-beda dari waktu ke waktu dan juga berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Fungsi dan peran organisasi ini ternyata sangat tergantung pada para pengurus yang tergabung di dalamnya. Organisasi ini, meskipun mengemban misi mulia sebagai lembaga yang mempertemukan dan menjembatani pluralitas agama, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh para pengurus yang terlibat di dalamnya.

Di samping itu, program-program kerja yang ditawarkan FKUB juga dinilai kurang variatif. Program kerja didominasi dengan dialog. Dialog yang dikembangkannya pun masih belum menyentuh problem mendasar yang dihadapi umat. Dialog biasanya cenderung elitis dan formalistis. Kenyataan ini dikeluhkan oleh perwakilan dari umat Hindu. Nata, sekretaris PHDI Mataram misalnya menyatakan "Menurut saya, acara dialog yang diselenggarakan FKUB terkadang berjalan sekedarnya. Maksudnya masih banyak formalitasnya. Beberapa persoalan yang kita hadapi di lapangan, banyak yang kurang terungkap. Para tokoh biasanya hanya memunculkan sisi positif saja dan kurang menggali yang permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan".⁴¹ Idealnya dalam dialog yang dikembangkan FKUB, semua pihak secara bijaksana berkenan mengungkap ragam persoalan riil yang dihadapi umat beragama. Persoalan kesulitan membangun tempat ibadah, persoalan adanya tempat ibadah yang dirusak massa atau beberapa kesulitan terkait pelaksanaan ritual keagamaan.

Selain toleransi keagamaan sebagaimana dipaparkan di atas, toleransi politik juga merupakan unsur penting budaya kewargaan.

⁴¹ Wawancara dengan Nata 23 Desember 2012.

Banyak kajian menyebutkan untuk mengukur tingkat toleransi suatu masyarakat dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya kelompok-kelompok yang tidak disukai. Toleransi juga dimaknai sebagai kesediaan menghargai atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau tidak disukai.⁴² Artinya masyarakat boleh membenci atau tidak menyukai kelompok tertentu, tetapi mereka tetap harus menghormati pandangan dan aktifitas kelompok yang tidak disukai tersebut.

Dari data survei, kelompok yang paling tidak disukai oleh warga Muslim dan Hindu adalah kelompok Komunis. Sebanyak 46% responden mengakui tidak menyukai kelompok komunis ini. Angka ini lebih kecil dari survei serupa yang dilakukan Mujani (2007). Pada survei tahun 2002, sebanyak 84% warga Negara Indonesia menolak bertetangga dengan komunis. Menyusul berikutnya, kelompok Kristen dan "Islamis Muslim" yang secara berturut-turut mencapai 16% dan 14%. Ketidaksiapan bertetangga dengan orang Cina mencapai 13%.⁴³

Tingginya persentase ketidak-sukaan warga masyarakat terhadap kelompok komunis, secara tidak langsung terkait dengan munculnya stigma negatif terhadap kelompok komunis yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Seperti dijelaskan oleh Mujani, anti-komunisme merupakan pilar utama pemerintahan Orde Baru di bawah Jenderal Suharto. Lazim terdengar pada masa itu bahwa komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan bahaya laten bagi bangsa Indonesia yang harus diwaspadai. Komunisme telah mengancam kemurnian Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Pengetahuan semacam ini disebarluaskan secara sistematis di seluruh pelosok negeri. Pemerintah Orde Baru bahkan telah membentuk Badan Pusat Pengkajian, Pendidikan, Pengamalan, Penghayatan dan Pemurnian Pancasila (BP7).⁴⁴ Serangkaian program Penataran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) secara massif diselenggarakan baik untuk anggota pegawai negeri sipil maupun

⁴² Mujani, *Muslim Demokrat* ..., 162.

⁴³ Mujani, *Muslim Demokrat* ..., 164.

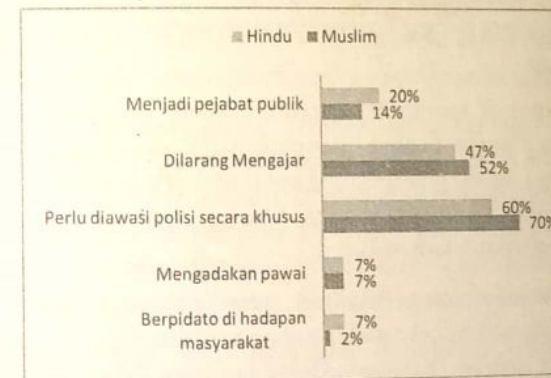
⁴⁴ Mujani, *Muslim Demokrat* ..., 181.

pelajar dan mahasiswa. Program pemerintah berupa program anti-komunisme ini secara tidak langsung memberi dampak bagi ketidak-sukaan masyarakat bertetangga dengan orang yang berideologi komunis.

Terhadap kelompok yang tidak disukai tersebut, selanjutnya diajukan pertanyaan tentang bagaimana pandangan responden jika kelompok tersebut mengadakan beberapa acara. Seperti kelompok tadi mengadakan pidato di hadapan masyarakat di daerah sini, mengadakan pawai, menjadi pejabat publik dan lain-lain. Jawaban responden selengkapnya sebagaimana tertera dalam grafik berikut ini.

Grafik 4.6.

Sikap terhadap kelompok yang tak disukai



Norma Resiprositas dan Ekuualitas

Norma timbal balik atau resiprositas merupakan unsur penting bagi modal sosial. Menurut Putnam (1993) norma resiprositas bersama-sama *interpersonal trust* menjadi dasar bagi berkembangnya *civic engagement* (ikatan kewargaan). Norma-norma timbal balik untuk meraih kebaikan bersama ini selanjutnya mentradisi dalam kehidupan sosial antar warga. Kesediaan untuk saling membantu atau saling

menolong, saling berbagi makanan adalah beberapa bentuk tradisi timbal balik yang berlangsung antara komunitas Hindu dan Muslim. Praktek-praktek seperti ini terbukti telah mampu menjadi jembatan yang secara tidak langsung mengurangi eksklusivitas beragama dan primordialisme kelompok. Dalam kehidupan sosial, tradisi timbal balik ini dengan sendirinya menjadi pendorong berkembangnya harmoni di masyarakat.

Secara kuantitatif, sebanyak 98% responden baik dari kalangan Hindu maupun Muslim menyatakan bahwa menolong sesama manusia hendaknya dilakukan tanpa memandang latar belakang agamanya. Seorang tokoh masyarakat Hindu dari Karang Jasi, menyatakan bahwa untuk soal tolong-menolong seharusnya dilakukan kepada semua orang. "Ibarat donor darah, kita *kan* tidak melihat ini darah si Wayan, ini darah si Ahmad. Semuanya berwarna merah", demikian kepala lingkungan Karang Jasi menyatakan perlunya tolong menolong sesama warga.

Di Lombok sendiri telah lama dikenal adanya tradisi saling seperti saling *ayoin* (saling menghormati), saling *besilak* (saling mengundang), saling *joting* (saling antar makanan), saling *pelangarin* (saling takziah). Tradisi saling inilah yang dapat dipandang sebagai strategi membangun kohesi sosial.

Tradisi saling *joting* misalnya, memungkinkan setiap keluarga mengantarkan makanan ke pada saudara atau tetangga mereka selepas mengadakan *begawe* (hajatan). Demikian juga dalam tradisi saling *besilak*, di mana warga dengan sukarela saling mengundang manakala mereka menggelar hajatan. Bahkan untuk menjaga perasaan saudara Muslim, apabila umat Hindu mengundang umat Islam, biasanya pihak Hindu telah menyediakan makanan mentah agar saudara Muslim bisa memasaknya sendiri. Demikian juga dengan tempat menghidangkan makanan yang hendak digunakan untuk saudara Muslim, warga Hindu menyediakan wadah atau tempat yang khusus. Semua ini dimaksudkan agar tetangga Muslim tidak ragu dalam mengkonsumsi makanan yang dihidangkan warga Hindu.

Bentuk tradisi saling yang lain adalah tradisi saling *pelangarin* yaitu tradisi mengunjungi keluarga yang meninggal atau *takziah*. Apabila ada tetangga yang meninggal apapun agamanya, semua warga datang melayat. Jika yang meninggal warga non-Muslim, biasanya umat Islam hanya datang sampai ke rumah duka, namun jika ingin sampai ke pemakaman hal demikian juga tidak dilarang.

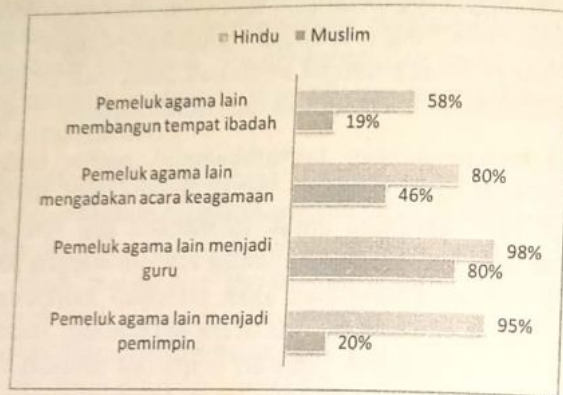
Masih terkait dengan berkembangnya norma resiprositas, berbagai kearifan lokal muncul untuk mengurangi ketegangan. Setiap pihak akan berusaha untuk memahami dan menghormati tradisi agama lain. Sebagai contoh ketika ada rombongan pengantin yang diiringi gamelan kebetulan akan melewati kampung Hindu Bali, sementara di situ sedang ada acara keagamaan, maka orang-orang Islam hanya menabuh gamelan tanpa ada teriakan, nyanyian atau tepukan. Demikian halnya jika orang Hindu Bali mengadakan ritual yang ada gamelannya seperti *ngaben* atau *pejagraja* kemudian melewati perkampungan Muslim, maka seketika gamelan dihentikan.

Sikap dan perilaku saling memberi, saling berbagi sebagaimana dipaparkan di atas dapat muncul selain karena adanya toleransi yang tinggi di antara warga juga karena adanya pengakuan bahwa semua manusia. Pandangan bahwa semua warga Negara pada dasarnya sama dan sederajat. Pengakuan bahwa semua warga Negara memiliki derajat dan akses yang sama inilah yang disebut dengan ekualitas (*equality*).

Dalam survei ini, nilai-nilai kesamaan derajat diukur berdasarkan pandangan warga Hindu dan Muslim mengenai sejumlah hal misalnya kesamaan memperoleh pendidikan, kesamaan mendapatkan pekerjaan dan layanan kesehatan. Termasuk juga aspek ekualitas adalah adanya pengakuan hak-hak asasi manusia serta kesamaan manusia di depan hukum.

Grafik berikut secara sekilas memberi gambaran tentang tingkat ekualitas masyarakat Hindu dan Muslim.

Grafik 4.7
Pandangan tentang Kesetaraan



Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase pandangan umat Hindu atas sejumlah hal menyangkut ekualitas lebih tinggi dibanding responden Muslim. Dari hasil survei diperoleh data bahwa sebanyak 95% responden yang beragama Hindu menyatakan setuju apabila pemeluk agama lain menjadi pemimpin. Sedangkan di kalangan responden Muslim hanya sebesar 20%. Kenyataan ini boleh jadi terkait dengan alasan ideologis dan teologis sebagaimana yang diulas di bagian awal. Seperti dinyatakan bahwa urusan memilih pemimpin bagi umat Islam merupakan isu fundamental. Sebagian besar kalangan Islam memandang bahwa pilihan terhadap pemimpin hendaknya dilakukan atas dasar kesamaan agama dan keyakinan.

Hal yang tidak jauh berbeda adalah respon atas pernyataan pemeluk agama lain boleh menjadi guru di sekolah umum. Secara berturut-turut sebanyak 80% responden Muslim dan 98% responden Hindu menyatakan persetujuan mereka apabila ada orang yang beragama lain yang menjadi guru di lingkungan mereka. Persentase kesediaan menerima penganut agama lain untuk menjadi guru ini ternyata menurun ketika diajukan pernyataan "pemeluk agama lain mengadakan acara keagamaan". Persentase penurunan bahkan hampir separo. Hanya sebanyak 46% responden Muslim yang

menyatakan setuju dan sangat setuju apabila ada penganut agama lain mengadakan acara keagamaan di lingkungan mereka. Sementara di kalangan responden Hindu, persentase persetujuan lebih tinggi yakni sebesar 80%.

Apabila dianalisa, penurunan persentase pada aspek toleransi bagi agama lain untuk mengadakan acara keagamaan rupanya sangat situasional dan kondisional. Dalam suasana di mana kondisi sosial masyarakat berjalan aman, sebagian besar responden menyatakan bahwa umat lain mempunyai hak dan dipersilakan mengadakan acara keagamaan di lingkungan mereka. Tetapi sikap ini dapat berubah manakala ada isu-isu yang kurang mendukung harmoni sosial. Akibatnya sebagian besar warga akan mempersoalkan acara-acara keagamaan yang diadakan umat lain. Sebuah kasus pelarangan pernah terjadi di kawasan Lingsar Lombok Barat. Pada saat perayaan hari Nyepi tahun 2012 yang lalu, sebagian warga di sekitar pura Lingsar kecamatan Lingsar menentang adanya pawai *ogoh-ogoh* di lingkungan mereka. Sempat terjadi ketegangan selama beberapa hari menjelang pawai *ogoh-ogoh* yang biasa digelar setiap tahun oleh umat Hindu. Warga menolak umat Hindu yang bermukim di kawasan Lingsar untuk mengadakan pawai *ogoh-ogoh* karena sebelumnya berkembang rumor bahwa umat Islam di Bali dilarang mengadakan salat Jumat. Secara kebetulan pada saat itu, pelaksanaan salat Jumat bertepatan dengan perayaan hari raya Nyepi. Akibat protes warga ini akhirnya pelaksanaan pawai *ogoh-ogoh* urung dilaksanakan. Panitia pawai tidak memperoleh izin dari pihak kepala desa, pihak kecamatan. Akhirnya atas kesepakatan wakil-wakil dari kedua komunitas disepakati bahwa pelaksanaan opawai *ogoh-ogoh* bagi warga Hindu Lingsar dialihkan di kota Mataram.

Dukungan persetujuan umat Islam terhadap pembangunan tempat ibadah juga merupakan isu yang sempat mengganggu hubungan antara agama. Sesuai data survei hanya sebesar 19% responden Muslim yang menyatakan persetujuan bagi umat lain membangun tempat ibadah di lingkungan sekitar mereka. Sedangkan umat Hindu yang menyatakan setuju mencapai 58%.

Pembangunan tempat ibadah merupakan isu yang sangat sensitif. Berbagai ketegangan kerap muncul terkait dengan keberadaan dan pembangunan sarana peribadatan. Banyak warga masyarakat yang kurang setuju apabila di lingkungan sekitar mereka didirikan bangunan tempat ibadah bagi agama lain, sementara jumlah umat agama tersebut terbilang kecil. Salah satu kasus penolakan pembangunan tempat ibadah pernah mencuat di tahun 2006 yakni penolakan pembangunan Pura Penataran Agung Gunung Rinjani. Pura ini berada di wilayah Lombok Barat (kini masuk Lombok Utara). Pembangunan pura yang diperkirakan akan menjadi pura terbesar di kawasan Asia Tenggara ini sontak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemda Lombok Barat dan pemerintah propinsi NTB tidak mengeluarkan izin dengan alasan masyarakat sekitar tidak menyetujui pembangunan tersebut. Menurut masyarakat sekitar, pura yang ada saat itu masih cukup menampung jumlah penganut agama yang hanya sekitar 50 kepala keluarga, sehingga tidak diperlukan pemugaran atau pembangunan pura baru. Keadaan sempat memanas, dua alat berat yang ada di sekitar lokasi pembangunan dihancurkan masa. Akhirnya rencana pembangunan pura ini pun gagal dilaksanakan.⁴⁵

Kasus lain terkait tempat ibadah adalah kasus perusakan pura di Narmada (\pm 20 km dari kota Mataram). Perusakan pura tahun 2008 lalu itu cukup mengganggu keharmonisan kedua komunitas. Meskipun letak rumah ibadah ini jauh dari wilayah Mataram tetapi sangat berdampak bagi relasi antar agama di kota ini.

Penolakan pembangunan tempat ibadah tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam. Penolakan pembangunan tempat ibadah baru -yang jamaah atau umatnya sedikit- juga penulis temukan di kalangan umat Hindu. Para warga dapat menerima pembangunan rumah ibadah

⁴⁵ Selain ada penolakan di kalangan kelompok masyarakat Islam, proses penghentian pemugaran dan pembangunan pura yang terletak di Dusun Kebaloan, Desa Senaru, Kecamatan Lombok Barat ini juga karena adanya friksi di internal umat Hindu yang diduga terkait dengan politik suksesi kepengurusan PHDI NTB. Selengkapnya lihat <http://www.mail-archive.com/hindu-dharma@itb.ac.id/msg02172.html> tertanggal 22 November 2007 (diakses tanggal 22 Desember 2012).

asalkan terdapat jemaat atau penganut yang membutuhkannya. I Nengah Mertha, Kepala lingkungan Karang Lelede misalnya mengungkapkan, "Pada prinsipnya kami mempersilakan orang membangun masjid atau gereja di lingkungan ini. Tapi harus sesuai dengan kebutuhannya. Jika jamaah dari lingkungan kampung sini tidak banyak kenapa harus membangun tempat ibadah baru di lingkungan sini?"⁴⁶

Memperhatikan kasus-kasus perusakan tempat ibadah yang sudah ada dan penolakan pembangunan rumah ibadah baru yang tidak hanya terjadi di komunitas Muslim tetapi juga Hindu, memberi gambaran bahwa tingkat komunalisme masyarakat masih tinggi. Komunalisme seperti itu sering terjadi pada kelompok mayoritas terhadap minoritas. Keberadaan kelompok minoritas masih dianggap ancaman bagi kelompok mayoritas. Kesediaan menenggang perbedaan dengan demikian belum sepenuhnya terimplementasi secara penuh di tengah-tengah masyarakat. Hal-hal seperti ini pada gilirannya akan mempengaruhi berkembangnya ikatan sosial antar warga.

Jaringan Antar Warga dan Tradisi berasosiasi

Unsur budaya kewargaan berikutnya adalah adanya jaringan kewargaan dan tradisi berasosiasi. Dua hal ini merupakan unsur penting bagi berkembangnya modal sosial. Ada dua jenis ikatan antar warga; ikatan resmi yang bersifat formal dan ikatan tak resmi yang berlangsung sehari-hari atau biasa disebut sebagai ikatan *quotidian*. Kedua jenis ikatan ini menurut penelitian Ashutos Varshnay mampu berfungsi menjaga harmoni antar warga Hindu dan Muslim di India. Ikatan antar warga terutama yang bersifat formal seperti partai politik, organisasi sosial, klub olah raga yang efektif di wilayah-wilayah di India memungkinkan warga dapat mengelola ketegangan dan konflik secara lebih baik.

⁴⁶ Wawancara tanggal 23 Desember 2012.

Kedua jenis ikatan ini berperan penting dalam menepis provokasi dan rumor yang dihembuskan para politisi yang bertendensi memecah atau memunculkan friksi horizontal di kalangan warga. Asosiasi buruh pabrik, asosiasi pedagang juga termasuk beberapa contoh ikatan antar warga yang bersifat formal. Jenis ikatan dapat berkembang secara baik di kota-kota yang relatif aman dari konflik. Sementara ikatan informal tak resmi berlangsung dalam kehidupan warga sehari-hari. Contoh ikatan jenis kedua ini antara lain kesediaan warga untuk saling menolong, berbagi dan makan bersama, membiarkan anak-anak mereka bermain dengan anak-anak yang berlainan agama.

Jaringan antar warga pada perhimpunan sukarela memungkinkan warga dapat mengembangkan kerjasama. Robert D Putnam (1993, 173) secara eksplisit menyebut bahwa semakin erat jaringan antar yang berlangsung di suatu komunitas, maka akan semakin memungkinkan warga tersebut melakukan kerjasama untuk meraih kebaikan bersama.

Dalam suasana demokrasi, hubungan interpersonal terutama hubungan yang melintasi ikatan etnis dan agama, memungkinkan warga dapat mencairkan kebuntuan komunikasi akibat sekat-sekat primordialisme berdasar etnis dan agama. Pada skala yang lebih luas munculnya asosiasi antar warga juga menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

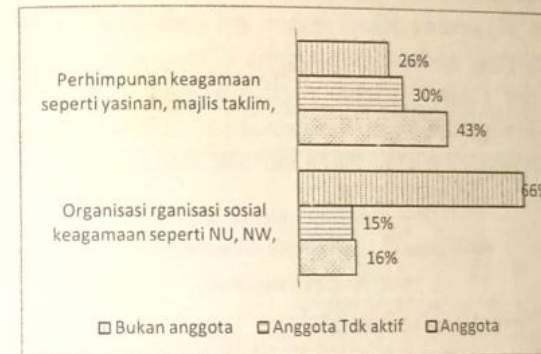
Pada penelitian ini, jaringan antar warga tidak hanya dibatasi pada keterlibatan warga pada asosiasi resmi melainkan juga pada ikatan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Pelibatan dua jenis ikatan ini didasarkan pada asumsi bahwa keduanya berpotensi menjadi jembatan bagi terbangunnya kohesi sosial.

Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya difokuskan pada keterlibatan warga dalam asosiasi yang bersifat keagamaan tetapi juga pada asosiasi atau perhimpunan sukarela yang bersifat sekuler. Jaringan kewargaan baik yang bersifat tak resmi maupun jaringan yang bersifat formal asosiasional menjadi sumber penelitian menarik yang berpengaruh pada unsur-unsur *civic culture* yang lain. Keterlibatan

dalam kelompok kewargaan baik yang berbasis keagamaan maupun non-agama (sekuler) membantu warga mengembangkan toleransi.⁴⁷

Pada grafik berikut ditampilkan persentase keterlibatan warga dalam berbagai organisasi. Ini sekaligus juga menggambarkan tradisi asosiasi yang selama ini berlangsung di komunitas Muslim maupun Hindu.

Grafik 4.8
Keterlibatan Warga Muslim dalam perhimpunan keagamaan



Keterlibatan warga Muslim dalam organisasi keagamaan ternyata lebih kecil dibanding keterlibatan mereka pada perhimpunan tak resmi. Seperti tampak dalam grafik di atas, hanya sebesar 16% responden Muslim yang mengaku sebagai anggota keagamaan seperti NU, NW atau Muhammadiyah. Sebanyak, 15% menyatakan sebagai anggota tidak aktif dan sisanya sebesar 66% menyatakan bukan anggota organisasi keagamaan tersebut. Sedangkan untuk kegiatan seperti yasinan, pengajian atau majelis taklim, persentasenya lebih tinggi. Sebanyak 43% responden menyatakan sebagai anggota aktif, 30% anggota tidak aktif dan hanya sebesar 26% yang mengaku bukan anggota. Warga lebih tertarik tidak menjadi anggota resmi sebuah

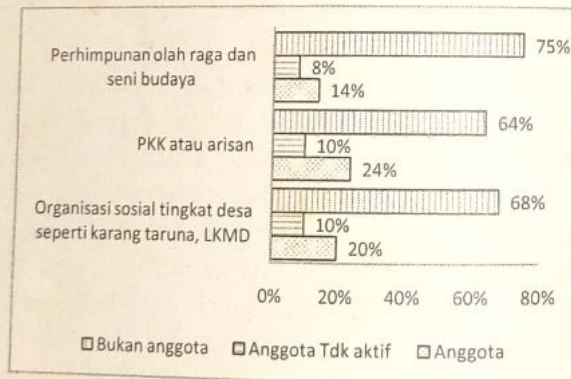
⁴⁷ Mujani, *Muslim Demokrat* ..., 177.

organisasi, tetapi mereka memilih terlibat aktif dalam aktivitas keagamaan seperti pengajian, yasinan dan hadir di majelis taklim.

Sebagaimana diketahui, keterlibatan warga dalam kegiatan keagamaan seperti di tas memberi manfaat bagi warga untuk tidak hanya menambah wawasan pengetahuan tentang agama, melainkan juga meningkatkan solidaritas dan kohesi sosial. Hanya saja solidaritas dan kohesi sosial ini hanya berlangsung di tingkat internal kelompok agama dan kurang menjangkau komunitas yang lebih luas.

Adapun untuk meningkatkan kohesi sosial secara lebih luas perlu dilihat bagaimana sikap responden terhadap organisasi atau perhimpunan yang berbasis non-agama. Organisasi kewargaan yang bersifat sekuler. Deskripsi lebih detil mengenai keterlibatan warga Muslim dalam organisasi non-keagamaan atau biasa disebut sebagai perhimpunan sekuler sebagaimana tampak dalam grafik berikut ini.

Grafik 4.9
Keterlibatan warga Muslim dalam organisasi sukarela non-keagamaan

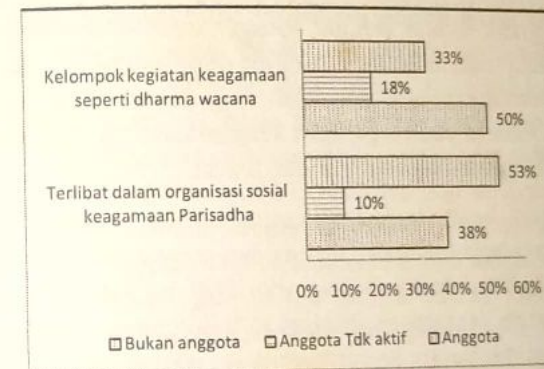


Dari grafik di atas terlihat bahwa keterlibatan warga Muslim dalam organisasi sosial tingkat desa seperti karang taruna, LKMD persentasenya relatif tidak jauh berbeda dengan keterlibatan mereka di asosiasi keagamaan. Hal yang sama juga terjadi pada keterlibatan warga Muslim dalam kegiatan desa atau lingkungan seperti PKK, arisan, perhimpunan seni dan olah raga. Sebagian besar responden

muslim menyatakan bahwa mereka bukan merupakan anggota dari perhimpunan sekuler baik dalam bidang politik, seni maupun perhimpunan olah raga. Persentase yang hampir sama juga terlihat dalam organisasi seperti Serikat pekerja, perhimpunan petani atau pedagang, di mana hanya sebanyak 21% responden yang mengaku menjadi anggota. Sebagian besar (60%) menyatakan bukan anggota.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di komunitas Hindu. Paparan data dalam grafik di bawah ini menggambarkan persentase keterlibatan warga Hindu dalam perhimpunan sosial maupun keagamaan.

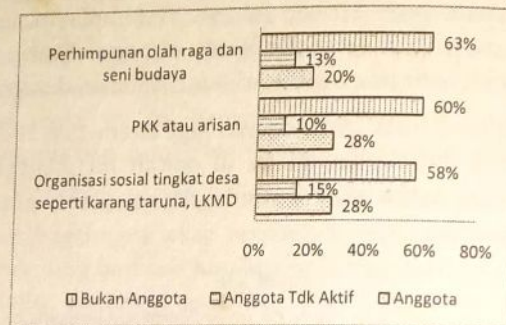
Grafik 4.10
Keterlibatan Warga Hindu dalam perhimpunan keagamaan



Terkait persentase keterlibatan warga Hindu dalam organisasi keagamaan seperti PHDI, sebanyak 38% responden menyatakan menjadi anggota aktif, 10% bukan anggota dan sebanyak 53% menyatakan bukan sebagai anggota organisasi keagamaan. Kondisi ini hampir sama dengan persentase keterlibatan warga Muslim. Warga Hindu lebih banyak terlibat dalam kegiatan non-formal seperti dharma wacana dari pada aktif menjadi anggota Parisada.

Adapun mengenai keterlibatan warga Hindu dalam organisasi non-keagamaan selengkapnya terpapar dalam grafik di bawah ini.

Grafik 4.11
Keterlibatan Warga Hindu dalam organisasi sukarela non-keagamaan



Dari grafik di atas terlihat bahwa keterlibatan warga Hindu dalam kegiatan organisasi social tingkat desa seperti karang taruna, LKMD, perhimpunan seni dan olah raga lebih tinggi dibanding keterlibatan mereka pada organisasi keagamaan. Hal yang sama juga berlaku pada kegiatan seperti PKK dan arisan.

Sebagian besar responden yang terlibat dalam dua jenis kegiatan antar warga ini adalah wanita dan remaja putri. Di kalangan komunitas Muslim kegiatan arisan atau PKK ini biasanya digabung dengan kegiatan keagamaan di tingkat lingkungan seperti yasinan atau pengajian mingguan. Secara bergiliran, warga yang memperoleh arisan akan menjadi tuan rumah bagi kegiatan yasinan. Dalam kegiatan yasinan atau pengajian mingguan tersebut, keperluan untuk hidangan konsumsi diambilkan dari dana arisan.

Adapun di kalangan responden laki-laki, keterlibatan dalam kegiatan lingkungan seperti arisan, persentasenya sangat rendah. Sejumlah kegiatan arisan sebenarnya dilakukan juga oleh para pria. Seperti terlihat di beberapa lingkungan di Mataram, kegiatan arisan setingkat lingkungan diadakan untuk memperkuat hubungan antar warga. Di komunitas Muslim, kegiatan arisan biasanya dirangkaikan dengan kegiatan *yasinan* rutin yang diadakan di rumah anggota secara bergiliran. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan setiap

seminggu sekali (biasanya berlangsung pada malam Jumat atau Kamis malam selepas sembahyang Isyak). Sejumlah informan menuturkan bahwa *arisan dua ribuan* hanyalah salah satu cara menstimuli warga agar aktif mengikuti kegiatan *yasinan* rutin. "Bukan soal uangnya berapa, tapi ini hanya untuk mendorong warga agar rajin mengikuti kegiatan kita", demikian ungkap Buchori salah satu jamaah Yasinan di lingkungan Taman Karang Baru Mataram.⁴⁸ Kegiatan *yasinan* ini hanya diperuntukkan bagi warga Muslim, sehingga dampak bagi terbangunnya ikatan antar warga secara lebih luas kurang dapat diperoleh.

Beberapa ikatan antar warga dengan melibatkan warga lintas etnis dan agama sebetulnya telah berlangsung di Mataram. Ikatan tradisional tersebut dinamakan *krama banjar*. Di Mataram juga di banyak wilayah di Lombok, tradisi berasosiasi telah lama tumbuh. Tradisi berasosiasi yang bersifat informal berlangsung selama bertahun-tahun dalam bentuk *pekraman* (paguyuban). Beberapa bentuk *krama* yang ada pada masyarakat Sasak misalnya; *krama banjar* (yakni perkumpulan antar warga yang anggotanya berasal dari beberapa dusun), *krama gubuk* (perkumpulan setingkat kampung atau dusun) dan *krama desa* (perkumpulan setingkat desa). Di dalam setiap *krama* terdapat beberapa perkumpulan sesuai kepentingan anggota *krama*. Sebagai contoh dalam *krama banjar* terdapat *krama banjar subak* (perkumpulan para petani penggarap sawah), *krama banjar merariq* (perkumpulan para pemuda untuk kegiatan perkawinan), *krama banjar mate* (perkumpulan untuk membantu keluarga yang meninggal), *krama banjar haji* (perkumpulan untuk membantu anggota yang hendak pergi haji).

Keterlibatan warga dalam asosiasi tradisional di atas merupakan salah satu faktor yang menyumbang terbentuknya kohesi sosial masyarakat Mataram. Pola-pola hubungan antar warga dikembangkan tidak hanya untuk kepentingan formalitas sebagaimana lazim terlihat dalam masyarakat kota, melainkan berlangsung secara sukarela.

⁴⁸ Wawancara dengan Buchori, 18 Desember 2012.

Setiap warga secara sukarela akan terlibat dalam krama gubuk, krama banjar, dan lain-lain karena dengan demikian akan memudahkan mereka di terima sebagai anggota masyarakat. Keterlibatan dalam asosiasi semacam ini akan menjadikan seseorang dapat secara penuh diterima sebagai anggota gubuk atau banjar. Tidak hanya itu, keterlibatan seseorang dalam asosiasi tradisional semacam ini akan memungkinkannya memperoleh bantuan dari warga lain. Karena dalam asosiasi tradisional semacam ini yang berkembang adalah prinsip tolong menolong atau gotong royong.

5

Kontestasi Simbol dan Konsolidasi Demokrasi

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan potret budaya kewargaan yang berlangsung pada komunitas Muslim dan Hindu di kota Mataram. Tingkat dan wujud budaya kewargaan tersebut berbeda antara komunitas yang satu dengan yang lain. Dinamika budaya kewargaan sebagaimana diketahui dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor ideologis, tradisi agama, keterlibatan dalam organisasi sosial, kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan sistem demokrasi. Semua ini berkelindan mempengaruhi dinamika budaya kewargaan.

Pada bab ini kajian dilanjutkan untuk melihat potret kontestasi simbol-simbol keagamaan di ruang publik yang ditampilkan oleh kedua kelompok. Kontestasi simbol keagamaan bagi sebagian kalangan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah mengiringi perkembangan demokrasi. Kontestasi hadir sebagai konsekuensi logis atas kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari demokrasi

itu sendiri. Berkembangnya kran demokrasi di Indonesia memberi peluang kepada semua kelompok termasuk kelompok agama untuk kembali menampilkan identitas kelompok termasuk identitas keagamaan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kontestasi ini juga berpengaruh terhadap berkembangnya budaya kewargaan? Bagaimana tanggapan satu kelompok atas hadirnya simbol-simbol keagamaan di ruang publik yang dilakukan oleh kelompok lain? Apakah kemunculan simbol keagamaan ini berpengaruh pula terhadap perkembangan demokrasi di Kota Mataram? Inilah beberapa pertanyaan menarik yang hendak dianalisa dalam bagian ini.

Konsepsi dan Ragam Kontestasi Simbol Keagamaan

Kontestasi simbol keagamaan dipahami sebagai muncul dan menguatnya simbol-simbol keagamaan baik yang bernuansa Islam maupun Hindu yang ada di kota Mataram. Kontestasi simbol tersebut nampak terlihat dalam tampilan fisik seperti banyaknya rumah ibadah (masjid dan pura), keberadaan bangunan rumah dan toko dengan arsitektur tertentu seperti ukir-ukiran bernuansa Bali, tulisan kaligrafi Arab yang berisi potongan ayat al-Qur'an maupun Hadis. Simbol-simbol keagamaan seperti itu banyak dijumpai di sejumlah fasilitas publik semisal jalan raya, perkantoran pemerintah, sekolah umum dan lain sebagainya.

Kontestasi simbol keagamaan di ruang publik sebetulnya merupakan fenomena yang jamak terjadi di berbagai daerah di Indonesia terutama di era reformasi. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi pada daerah-daerah yang secara historis memiliki ikatan kuat dengan Islam seperti Nangro Aceh Darussalam (NAD), Sulawesi Selatan, dan Banten; atau daerah yang memiliki kultur Islam secara kuat seperti Jawa Timur dan Sumatra Barat; tetapi juga terjadi di daerah yang terkategori sebagai *melting pot* seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Sumatra Utara.¹

¹ Lihat, Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar, ed., *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2011), 24.

Setelah berakhirnya era Orde Baru yang kemudian diikuti era otonomi daerah, banyak elit dan politisi daerah berlomba mengusung simbol-simbol keagamaan di ranah publik. Hadirnya Islam di ruang publik secara umum bisa dilihat sebagai upaya penyebaran nilai, ajaran dan simbol-simbol agama kepada masyarakat secara lebih intensif. Dengan memanfaatkan ruang publik baik nyata maupun virtual warga dapat mengkomunikasikan berbagai ide dan kepentingan termasuk di dalamnya pandangan dan kepentingan agama.²

Maraknya simbol-simbol keagamaan di kota Mataram memang tidak semuanya dapat dipandang sebagai sebetuk perlombaan atau kontestasi. Sebagian simbol-simbol tersebut telah ada sejak lama. Ia hadir bersamaan dengan berkembangnya komunitas beragama di kota ini. Keberadaan pura, bangunan dengan arsitektur Bali dan lain-lain telah ada sejak kehadiran komunitas Hindu Bali di Lombok beberapa ratus tahun silam. Namun demikian, melihat maraknya simbol-simbol tersebut akhir-akhir ini, dapat dinyatakan bahwa sedang terjadi "perebutan" ruang publik. Perebutan yang dimaksud di sini adalah berbagai upaya setiap elemen atau kelompok komunal dalam memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan ruang publik untuk menonjolkan simbol-simbol keagamaan yang mereka miliki. Beberapa elemen masyarakat dengan kreatifitasnya masing-masing berusaha menampilkan identitas kultural mereka di ruang-ruang publik.

Penting dicatat bahwa tujuan menghadirkan simbol-simbol keagamaan di ruang publik juga sangat variatif. Sebagian kelompok sengaja menampilkan simbol untuk menegaskan eksistensi kelompoknya. Melalui penguatan simbol, kelompok ini sedang mengkomunikasikan dirinya kepada orang lain bahwa keberadaannya masih layak diperhitungkan. Sebagian elit politik daerah menggunakan simbol-simbol keagamaan dengan alasan atau kepentingan politik. Langkah ini diikuti dengan serangkaian kegiatan penunjang yang muaranya dimaksudkan untuk meningkatkan rasa

² *Ibid.*, 2.

kebanggaan terhadap kelompok. Membangkitkan kembali simbol-simbol komunitas akan menyatakan berbagai faksi dalam kelompok pendukung simbol. Sedangkan bagi sebagian kalangan dari komunitas beragama, simbol-simbol tersebut sengaja ditampilkan untuk kepentingan syiar atau dakwah agama. Melalui simbol keagamaan, setiap umat diingatkan untuk tetap setia dengan ajaran agama mereka.

Faktor agama memang sangat dominan dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat kota Mataram. Terdapat keinginan kuat untuk menjadikan nilai-nilai agama dan budaya dalam mewujudkan kota Mataram yang maju dan modern. Hal ini tercermin dari adanya jargon atau motto pemerintah kota Mataram yang berbunyi "Maju, Religius dan Berbudaya".

Jargon atau motto kota Mataram ini telah disosialisasikan secara massif di masyarakat. Mulai dari instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga pendidikan dan di forum-forum warga yang diselenggarakan warga kota.

Jargon seperti di atas merupakan cita-cita seluruh komponen masyarakat kota Mataram. Sebagai cita-cita bersama, setiap elemen masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi mensukseskan cita-cita mulia tadi. Sebagai program pemerintah, upaya untuk menjadikan Mataram sebagai kota yang maju, religius dan berbudaya ini merupakan langkah yang bersifat netral. Namun ternyata, sebagian kalangan memberi penafsiran tersendiri. Memaknai kata religius dalam jargon kota tersebut adalah dengan sebisa mungkin memasukan unsur Islam dalam visi pembangunan kota. Dengan istilah lain, bagi kalangan Muslim, istilah religius hendaknya dimaknai dengan satu visi menciptakan Mataram dalam suasana keislaman. Kultur keislaman sedapat mungkin lebih menonjol dibanding pengembangan kultur agama yang lain. Keinginan kuat untuk menjadikan Mataram dalam nuansa atau kultur keislaman ini paralel dengan keinginan sebagian besar elit masyarakat untuk mewujudkan wilayah Lombok benar-benar sebagai "pulau seribu masjid".

Penyebutan "Lombok sebagai pulau seribu masjid" bukan hanya merepresentasikan realitas banyaknya masjid di kota Mataram dan pulau Lombok, melainkan juga di dalam terkandung beberapa motif atau keinginan. Keinginan yang paling kuat adalah upaya untuk menghadirkan nuansa keislaman di kota Mataram dan pula Lombok secara keseluruhan sebagai ganti atas nuansa atau kultur (agama) lain yang sudah ada.

Dalam wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah kota Mataram dan pejabat provinsi NTB, sebagian besar pejabat publik memiliki pandangan seperti ini; adalah logis mendorong pembangunan kota Mataram berdasarkan prinsip dan kultur Islam. Mengingat masyarakat Lombok mayoritas beragama Islam, maka sudah sewajarnya jika yang dominan adalah nuansa keislaman.³

Nuansa keislaman itu antara lain dengan menghadirkan simbol-simbol keislaman baik yang terkait dengan bentuk tampilan fisik, maupun terkait dengan regulasi atau peraturan pemerintah daerah yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Menyebut beberapa contoh tampilnya simbol-simbol keislaman yang bersifat fisik misalnya keberadaan bangunan masjid-masjid, tulisan-tulisan kaligrafi Arab dan bentuk-bentuk bangunan gedung maupun pagar yang terdapat di beberapa sekolah umum negeri.

Kehadiran masjid juga dapat dipandang sebagai kontestasi atau lebih tepatnya resistensi dari banyak pura di kota Mataram. Sebagaimana diketahui kehadiran komunitas Bali di Lombok selama ratusan tahun telah menghadirkan tidak hanya *landscape* kota yang indah seperti terlihat di kawasan Cakranegara Mataram melainkan juga telah menampilkan pemukiman yang kental dengan nuansa Hindu Bali. Hampir setiap rumah memiliki bangunan persembahyangan berupa pura. Pura-pura ini ada di setiap keluarga. Letak pura biasanya di sebelah Timur Utara pekarangan perumahan. Untuk satuan yang lebih luas dari keluarga, terdapat pura tingkat lingkungan. Demikian

³ Wawancara dengan salah satu pejabat pemerintah provinsi NTB, tanggal 12 Desember 2012.

selanjutnya pada tingkat banjar atau desa berdiri pura yang lebih besar.⁴ Pola pemukiman Hindu dengan pola blok-blok memungkinkan pembangunan pura tampak jelas terlihat di sudut-sudut pekarangan perumahan dan di sudut kampung-kampung. Oleh karenanya, di setiap sudut kawasan (satu blok) dengan mudah dapat disaksikan pura-pura yang indah. Tidak mengherankan jika banyak orang yang berkunjung ke Mataram terutama di kawasan Cakranegara akan berkata bahwa mereka seolah berada di pulau dewata, Bali. Banyaknya pura di kota Mataram ini bagi sebagian kalangan dianggap kurang merepresentasikan sebutan pulau Lombok sebagai pulau seribu masjid.

Di luar kegiatan membangun masjid yang sangat antusias dilakukan masyarakat Muslim di Lombok, terdapat program pemerintah NTB yang terkait dengan penguatan simbol Islam di ruang publik. Salah satu program tersebut adalah pembangunan fasilitas keislaman yang saat ini menjadi proyek besar pemerintah provinsi NTB yaitu pembangunan *Islamic Centre* (IC) yang terletak di jalan Langko kota Mataram.

Bagi sebagian tokoh masyarakat, pembangunan IC yang akan menjadi satu-satunya IC terbesar di provinsi NTB ini merupakan terobosan strategis bagi pengembangan dan pemantapan Islam di kawasan Tenggara Indonesia. "Ini merupakan langkah strategis pemerintah yang semakin melengkapi posisi Lombok sebagai pulau seribu masjid", demikian ungkap salah satu pejabat pemerintah provinsi NTB yang kurang berkenan disebutkan namanya.⁵ Pejabat ini menceritakan bahwa pembangunan IC sengaja diletakkan di Mataram dengan pertimbangan bahwa Mataram adalah ibukota provinsi dari wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Selain itu, langkah ini juga sebagai upaya untuk mengurangi dominasi nuansa Hindu Bali yang ada di kota Mataram ini.

⁴ Setiap rumah mempunyai pura yang dinamakan *Sanggah*. Di tingkat lingkungan terdapat *Pura Maksan*. Sedangkan pada tingkat banjar (setingkat kecamatan) terdapat *pura dalem*.

⁵ Wawancara tanggal 13 Desember 2012.

Bagi sebagian orang, apa yang disampaikan oleh pejabat di atas tampaknya agak berlebihan. Tetapi ungkapan-ungkapan seperti di atas sebetulnya merupakan satu bentuk kontestasi untuk menghadirkan nuansa keislaman di kota Mataram. Beberapa informan dari kalangan Muslim menyatakan bahwa program pemerintah kota terutama di era kepemimpinan walikota Ruslan, dianggap secara tidak langsung juga mengurangi dominasi nuansa Bali di kota Mataram. Salah satunya adalah dengan membangun sejumlah rumah toko (*ruko*) dengan arsitektur modern-minimalis. *Ruko* dengan model modern-minimalis ini dibangun di bekas-bekas rumah warga Bali yang sengaja dijual oleh pemiliknya. Kehadiran *ruko* dengan desain modern seperti ini dengan sendirinya telah menggantikan desain perumahan yang berarsitektur Hindu Bali. Sehingga yang tampak di jalan-jalan protokol di kota Mataram adalah desain baru yang sama sekali berbeda dengan model bangunan bercorak Bali.

Penguatan simbol keagamaan juga dapat disaksikan di sejumlah fasilitas umum seperti kantor pemerintah dan sekolah umum negeri. Menyebut di antaranya misalnya keberadaan fasilitas beribadah di tempat-tempat tersebut seperti musala untuk umat Islam dan pura untuk umat Hindu. Demikian juga di sekolah umum, sebagian besar sekolah di mana mayoritas murid dan gurunya beragama Hindu dapat dengan mudah dijumpai pura kecil di sekolah tersebut. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas seperti gedung dan pagar sekolah juga didominasi dengan ornamen Hindu Bali. Sedangkan di sekolah-sekolah yang mayoritas siswa dan pengelolanya Muslim, akan dengan mudah dijumpai bangunan musala. Dinding sekolah biasanya juga penuh dengan hiasan kaligrafi Arab.

Di samping dalam bentuk fisik, penguatan simbol keagamaan juga berlangsung dalam pembentukan organisasi sosial. Sejumlah organisasi berbasis keagamaan berkembang di kota Mataram termasuk organisasi para militer atau yang dikenal dengan sebutan pamswakarsa. Di Lombok, termasuk di Mataram, organisasi pamswakarsa banyak bermunculan. Di kalangan Muslim tercatat nama-nama kelompok pamswakarsa seperti Amphibi, Bujak dan

Elang Merah. Di komunitas Hindu misalnya berdiri Dharma Wisesa pimpinan Anak Agung Made Djelantik.⁶

Kehadiran Pamswakarsa tersebut secara tidak langsung turut memberi rasa aman di masyarakat. Berbagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat seperti pencurian mulai jarang terjadi. Namun demikian, secara sosio-politis, organisasi ini jelas belum bisa memberi penguatan integrasi masyarakat pada tingkat yang lebih luas. Bahkan kehadiran organisasi ini menyumbang kontestasi antar kelompok dengan memunculkan organisasi pamswakarsa sejenis. Organisasi ini berasal dari dan berdasar pada ikatan etnis atau agama. Sebagai contoh berdirinya Dharma Wisesa milik Hindu secara tidak langsung muncul sebagai respons atas keberadaan pamswakarsa umat Islam, seperti Amphibi. Kemunculan pamswakarsa tersebut terkadang juga menimbulkan gesekan. Beberapa kasus gesekan yang melibatkan pamswakarsa pernah terjadi misalnya pada tahun 2000-an.

Dalam hal pelaksanaan ritual keagamaan, berbagai kontestasi juga muncul seperti pembacaan al-Qur'an, adzan yang ada masjid-masjid dan pembacaan *Weda* di sebagian pura melalui pengeras suara. Lantunan ayat suci al-Qur'an biasa terdengar pada waktu salat tiba. Menjelang subuh di pagi hari, menjelang magrib atau setelah isyak, biasa terdengar dari pengeras suara lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an. Beberapa tahun terakhir ini, komunitas Hindu juga melakukan pembacaan kitab *Weda* melalui pengeras suara. Pada waktu tertentu, pembacaan *Weda*, atau lontar sering terdengar dari banyak pura. Aktivitas membaca *Weda* merupakan salah satu aktivitas keagamaan umat Hindu yang semarak di kota Mataram.⁷

⁶ Kari Telle, "Dharma Power...", 141-156.

⁷ Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pernah ditunjuk dan sukses menjadi tempat pelaksanaan Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat Nasional ke-VIII dan Pesamuhan Agung Parisada tahun 2002. Dikutip <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/> diakses tanggal 10 Desember 2012.

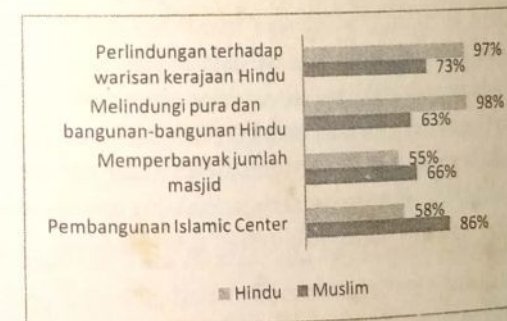
Masih termasuk dengan kontestasi simbol keagamaan di ruang publik adalah pemberlakuan peraturan daerah (PERDA) bernuansa agama. Untuk konteks Mataram, pemberlakuan peraturan daerah yang bernuansa agama belum terlalu kuat dibanding wilayah kota atau kabupaten lain di provinsi NTB.

Respons terhadap Kontestasi Simbol Keagamaan

Munculnya kontestasi simbol keagamaan di ruang publik menimbulkan tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung program-program memperbanyak sarana tempat ibadah, ada yang memandang bahwa keberadaan tempat ibadah yang kini ada di kota Mataram dinilai cukup memadai. Namun demikian, respons atas munculnya kontestasi ini masih dalam taraf wajar. Pertentangan terkadang muncul, demikian juga penolakan secara tak langsung juga sering terdengar dari sebagian masyarakat, tetapi semuanya tidak menguat menjadi konflik terbuka. Grafik di bawah ini, merupakan gambaran hasil survei mengenai respons masyarakat Hindu dan Muslim atas keberadaan pembangunan sarana ibadah.

Grafik 5.1.

Bangunan bernuansa agama



Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana tanggapan responden terhadap pembangunan *Islamic Centre* (IC) di kota Mataram. Sebagian responden menyatakan setuju dengan

pembangunan *Islamic Centre*. Respons persetujuan tidak hanya datang dari kalangan Muslim yang mencapai 86%, tetapi juga datang dari komunitas Hindu. Sebanyak 58% warga Hindu menyatakan setuju terhadap pembangunan *Islamic Centre* ini. Hanya sebagian kecil kalangan yang kurang sependapat dengan pembangunan salah satu ikon masyarakat Nusa Tenggara Barat ini. Di antara alasan ketidaksetujuan pembangunan *Islamic Centre* misalnya terkait dengan lokasi pembangunan gedung tersebut yang dinilai menggusur bangunan bersejarah yang sudah ada.

Sebagaimana diketahui bahwa lokasi tempat berdirinya *Islamic Centre* ini adalah gedung gelanggang olah raga KNPI dan sejumlah bangunan sekolah seperti SMPN 6 Mataram dan Sekolah Pertanian. Penggusuran sarana olah raga berakibat antara lain berakibat pada semakin berkurangnya ruang publik. Sementara memindahkan dua gedung sekolah akan berpengaruh terhadap sejarah keberadaan sekolah yang sudah lama berdiri ini.

Salah seorang informan menyatakan, "menurut saya pembangunan *Islamic Centre* itu bagus, tetapi sayang lokasinya harus menggusur bangunan yang sudah ada. Padahal kedua bangunan tersebut (peneliti: gedung olah raga dan beberapa gedung sekolah) sangat bersejarah. Ini yang kita sayangkan," kata salah seorang akademisi dari IAIN Mataram.⁸ Sebagian warga Hindu juga menyayangkan pembangunan *Islamic Centre* yang menggusur gedung olah raga. Made demikian informan ini akrab disapa menyatakan, "Dulu tanah gelanggang olah raga itu *kan* milik warga Hindu, tetapi diberikan kepada pemerintah untuk fasilitas umum. Nah sekarang kalo dirubah, ya... sebenarnya kurang pas begitu. Tapi mau gimana lagi?"⁹ Demikianlah beberapa respons informan tentang pembangunan IC. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, kini pembangunan IC telah berlangsung dan sedang memasuki tahap penyelesaian.

⁸ Wawancara dengan Kariman (bukan nama sebenarnya) tanggal 11 Desember 2012.

⁹ Wawancara dengan Made tanggal 10 Desember 2012.

Hal berikutnya adalah mengenai respons masyarakat terhadap banyaknya masjid di kota Mataram. Terhadap fenomena banyaknya masjid di kota ini, responden memberi tanggapan yang cukup beragam. Sebanyak 66% responden muslim menyatakan bahwa pembangunan masjid perlu diperbanyak. Sedangkan di kalangan Hindu, sebanyak 55% menyatakan setuju terhadap pembangunan masjid.

Beralih dengan fasilitas milik umat Hindu. Pertanyaan yang diajukan dalam survei antara lain tentang perlunya pemerintah melindungi pura, bangunan Hindu dan peninggalan kerajaan Hindu di pulau Lombok. Sebanyak 63% responden Muslim menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah hendaknya melindungi pura milik warga Hindu. Sedangkan di kalangan responden Hindu persentasenya mencapai 98%. Kenyataan ini menarik untuk dikaji. Lebih dari setengah jumlah responden Muslim menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan bahwa pemerintah kota Mataram wajib melindungi pura-pura milik warga Hindu. Persetujuan seperti ini merupakan langkah maju bagi berkembangnya toleransi terhadap komunitas lain. Beberapa informan menyebutkan bahwa umat Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat lain. "Sebagai kelompok mayoritas kita, harus melindungi yang minoritas. Kalau ada apa-apa dengan umat lain nanti citra umat Islam jadi rusak."¹⁰ Bentuk persetujuan umat Muslim terhadap upaya menjaga keberadaan pura ini perlu diapresiasi. Kenyataan ini memberi satu gambaran bahwa tingkat toleransi umat beragama di kota Mataram tergolong tinggi.

Selain dukungan terhadap keberadaan pura, umat Muslim juga memberi persetujuan atas pernyataan perlunya pemerintah kota menjaga warisan sejarah peninggalan kerajaan Hindu di kota Mataram. Umat Islam (sebanyak 73%) menyatakan setuju terhadap pelestarian benda-benda sejarah peninggalan kerajaan Hindu di Mataram.

Dari paparan data di atas, ada beberapa catatan menarik yang bisa diberikan. *Pertama*, bahwa kontestasi simbol keagamaan di ruang publik di kota Mataram sejauh ini masih berlangsung wajar. Kontestasi

¹⁰ Wawancara dengan Yusuf, aktifis LSM kota Mataram tanggal 17 Desember 2012.

simbol keagamaan yang berlangsung tidak menimbulkan gejolak atau pertentangan di masyarakat. *Kedua*, masing-masing komunitas menunjukkan toleransi terhadap kelompok lain. Kenyataan ini terlihat dari kesediaan menghargai menghargai fasilitas dan keragaman kultur kelompok lain. *Ketiga*, sebagai kelompok minoritas, umat Hindu Bali dalam posisi mengalah. Sebagai perbandingan, perlu juga dilihat pada komunitas Hindu yang memang mayoritas seperti di wilayah Bali. *Keempat*, komunitas Muslim merasa bahwa munculnya simbol keagamaan yang bernuansa Hindu belum mengancam kegiatan dakwah Islamiyah. Atau dengan kata lain bahwa keberadaan ornamen-ornamen bernuansa Bali di kota Mataram dianggap sebagai bagian dari sejarah masa lalu. Hanya sebagian kelompok kecil terutama dari kalangan elit politik, yang karena kurangnya apresiasi terhadap warisan masa lalu, terkadang ingin menghilangkan kesan Hindu Bali di Mataram dan menggantikannya dengan nuansa Islam.

Hanya saja, beberapa persoalan sempat muncul terkait dengan keberadaan rumah ibadah. Ada beberapa kasus perusakan tempat ibadah yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama. Seperti dipaparkan di bab ketiga, beberapa kasus yang mengarah pada kerenggangan sosial terjadi ketika ada sebagian anggota masyarakat yang melakukan perusakan pura Sangkareang di Narmada Lombok Barat. Meskipun berada di wilayah Lombok Barat, tetapi dampak dari kasus perusakan pura ini juga berimbas di kota Mataram. Kasus lain juga terjadi pada saat terjadi penolakan pembangunan pura di wilayah Lombok Utara. Untungnya, sejumlah kasus tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik komunal yang berkepanjangan.

Dari paparan ini juga dapat dinyatakan bahwa munculnya kontestasi tidak memberi pengaruh signifikan terhadap berkembangnya budaya kewargaan yang ada pada komunitas Hindu dan Muslim di kota Mataram. Munculnya kontestasi simbol-simbol keagamaan tidak menimbulkan gejolak keamanan yang berarti di masyarakat.

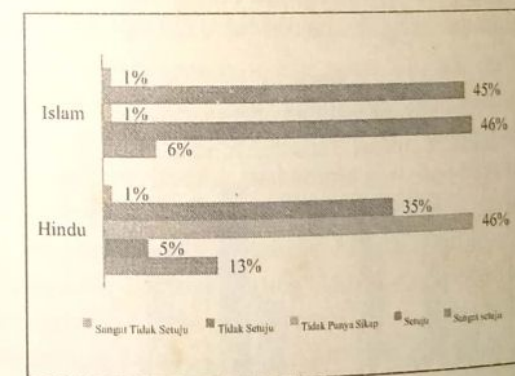
Selain kontestasi simbol keagamaan, beberapa hal penting perlu juga dianalisa. Misalnya adalah respons masyarakat di bidang

politik birokrasi tepatnya soal penempatan dan pembinaan karir pegawai negeri. Sebagaimana diketahui PNS adalah warga masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan umum. Proses seleksi atau rekrutmen, penempatan, dan pembinaan jenjang karir dilakukan dengan sistem dan mekanisme yang profesional. Dengan profesionalitas seperti ini, PNS yang mengisi lembaga birokrasi pemerintahan ini pun idealnya juga dilakukan secara profesional pula. Penunjukan dan penempatan seseorang pada jabatan tertentu hendaknya mengacu pada aspek prinsip-prinsip birokrasi modern seperti kecakapan, loyalitas, kompetensi dan sebagainya. Artinya manajemen birokrasi tidak dilakukan dengan pertimbangan primordialisme, latar belakang etnis apalagi hanya karena kedekatan keluarga. Sebagai abdi Negara dan masyarakat, PNS dituntut untuk bekerja secara profesional untuk kepentingan publik secara luas. PNS bukan bekerja untuk satu dan kelompok tertentu. Profesionalisme birokrasi pemerintahan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Terkait dengan persoalan di atas grafik berikut memberi gambaran tentang respons masyarakat terhadap keberadaan pegawai negeri sipil. Seperti pernyataan pegawai negeri sipil seharusnya dari orang asli daerah.

Grafik 5.2.

PNS sebaiknya berasal dari orang asli daerah



Respons masyarakat terhadap pernyataan "sebaiknya pegawai negeri sipil diisi dari orang atau warga daerah sini" cukup tinggi.

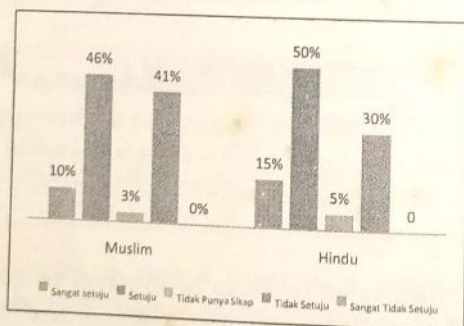
Sebanyak 46% (persentase ini sama di dua komunitas) menyatakan persetujuannya. Ini artinya 4 dari 10 orang menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan bahwa pegawai negeri sebaiknya diisi oleh orang daerah.

Sedangkan responden yang menolak sebanyak 35% (responden Muslim) dan 45% (responden Hindu). Dari perbandingan ini, sebenarnya responden yang menerima atau menolak pernyataan bahwa pegawai negeri sipil sebaiknya diisi oleh orang daerah persentasenya hampir sama. Isu orang daerah atau penduduk asli daerah muncul menguat setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir. Momentum otonomi daerah di mana kewenangan untuk mengelola daerah sebagian besar diserahkan ke daerah sangat mungkin memberi pengaruh terhadap isu seperti ini.

Dalam era otonomi daerah, sebagian besar kebutuhan pegawai terutama pada dinas-dinas yang secara langsung kewenangannya ada di daerah. Hanya beberapa bidang saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan sendirinya formasi pegawai lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah. Kesempatan ini memberi peluang bagi warga daerah untuk mengisi formasi pegawai negeri.

Tidak hanya dalam hal rekrutmen PNS, isu putra daerah atau warga pribumi juga terlihat dalam respons masyarakat terhadap posisi-posisi jabatan publik. Posisi sebagai pejabat publik merupakan posisi yang menjadi keinginan banyak orang. Respons warga terkait hal ini selengkapnya sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini.

Grafik 5.3.
Pejabat publik sebaiknya putra asli daerah



Dari grafik di atas, terlihat sebanyak 46% responden Muslim dan 50% responden Hindu menyatakan setuju apabila pejabat daerah sebaiknya berasal dari putra asli daerah tersebut. Sebaliknya responden Muslim dan Hindu yang menyatakan menolak pernyataan tersebut secara berturut-turut sebesar 41% dan 30%.

Masih banyaknya warga masyarakat yang menyatakan setuju bahwa pejabat daerah harus berasal dari putra daerah tampaknya juga merupakan imbas diberlakukannya otonomi daerah. Seperti terjadi di banyak wilayah di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah, banyak politisi daerah yang menyuarakan perlunya pejabat daerah diisi oleh orang daerah. Undang-undang itu sendiri tidak secara eksplisit mengatur dari mana asal seorang pejabat publik. Semangat undang-undang tersebut adalah pemberian kewenangan lebih banyak kepada daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Sebagaimana diketahui selama ini pola penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak dilakukan secara sentralistik, maka melalui otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat berkembang secara lebih mandiri. Melalui otonomi ini, peluang intervensi pusat terhadap daerah dengan sendirinya akan berkurang. Sedangkan isu putra daerah hanyalah eksekutif negatif yang mengiringi pergeseran pola pembagian kewenangan ini. *Euphoria* masyarakat menyambut pola pemerintahan yang tak lagi sentralistik tersebut di antaranya mewujudkan dalam menguatnya isu putra daerah.

Fenomena menguatnya isu putra daerah terutama dalam politik birokrasi pemerintahan, kerap menimbulkan pertentangan. Menurut sebagian kalangan, hal demikian sebagai sesuatu yang kontra produktif terhadap perkembangan demokrasi. Penguatan primordialisme pada momen-momen pemilihan kepala daerah atau penentuan pejabat daerah adalah sisi negatif pemberlakuan otonomi daerah. Sebagian kalangan yang lain menilai bahwa fenomena kedaerahan muncul sebagai resistensi dari pola sentralistik yang telah berlangsung lama. Pada era sentralistik, banyak daerah yang kehilangan kewenangan. Daerah seolah tidak memiliki *bargaining* dalam hal penentuan pejabat. Pada era sentralistik, pemimpin daerah biasanya ditunjuk atau *didrop* langsung dari pusat. Keadaan

demikian dengan sendirinya mengurangi peluang putra daerah untuk memimpin wilayahnya sendiri. Tidaklah mengherankan jika ketika kran otonomi dibuka, maka yang terjadi adalah menguatnya isu-isu kedaerahan seperti isu putra daerah ini.

Konsepsi tentang siapa putra daerah sebenarnya masih juga diperdebatkan. Belum ada satu rumusan baku mengenai siapa sejatinya putra daerah. Sejumlah informan warga Bali yang penulis temui mengemukakan bahwa mereka, meskipun telah ada di kota Mataram secara turun-temurun, tetap saja belum dianggap sebagai putra daerah. Para informan Bali tersebut merasa bahwa meskipun mereka lahir dan tumbuh serta tinggal di Lombok atau di Mataram, namun tetap saja mereka dianggap sebagai orang Bali bukan orang Sasak atau setidaknya sebagai putra daerah Lombok.

Stigma bukan sebagai orang asli atau putra daerah seperti di atas terutama dirasakan oleh warga Bali yang berada di dalam pemerintahan. Beberapa tahun terakhir, dalam hal pengembangan karir birokrasi, banyak warga etnis Bali yang ada di Lombok merasa bahwa karirnya tidak semulus saudara-saudara mereka dari etnis Sasak. Dari beberapa kali wawancara, banyak informan yang menyatakan bahwa pengembangan karir PNS seringkali tidak didasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas kepegawaian melainkan lebih karena alasan kedaerahan, kesamaan suku, agama atau bahkan kedekatan emosional dengan pimpinan. Pak Wayan misalnya, seorang pegawai fungsional di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyatakan kepada penulis, "Pak *kan* tahu sendiri, kami ini orang minoritas, mana mungkin bisa menduduki jabatan puncak."¹¹

Pernyataan yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh salah seorang lurah di wilayah kecamatan Cakranegara. Lurah yang enggan disebutkan namanya ini menyatakan, "Sepandai-pandai kami paling-paling *stop* sampai eselon III". Terkait dengan putra daerah, kadang-kadang sedikit membikin hati kami merasa kurang adil. Sebenarnya

¹¹ Wawancara dengan Pak Wayan 24 Nopember 2012.

siapa sih yang dimaksud putra daerah itu? Kalau mau jujur Pak Ruslan (mantan walikota Mataram; penulis) dulu ketika maju jadi walikota sebenarnya *kan* bukan orang asli Mataram. Beliau *kan* dari luar Mataram. Kami ini sudah lima generasi berada di Mataram. Kami lahir dan besar di Mataram, tetapi tetap saja dianggap bukan putra daerah".¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Widy, sekretaris PHDI Provinsi NTB. Menurutnya, "Soal politik birokrasi, saat ini kami hanya punya dua pejabat di tingkat eselon II. Di kota Mataram, hanya Kepala Dinas Pariwisata dan Kesehatan. Sedangkan di Lombok Barat juga *cuma* dua yaitu Budpar dan Pertanian. Itu saja kalau pak Renjana (kepala Dinas Budaya dan Pariwisata; penulis) bukan ketua PHDI mungkin tidak akan menduduki posisi itu".¹³

Adanya perasaan menjadi minoritas yang terpinggirkan di kalangan birokrat sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh etnis Bali, tetapi juga etnis lain seperti etnis Samawa, Mbojo, Jawa dan etnis lain. Kesan bahwa terdapat diskriminasi bagi etnis di luar Sasak di pemerintahan juga dirasakan pak Saprudin, warga Mataram asli Bima yang bertugas di salah satu kecamatan di wilayah Cakranegara. Menurutnya, "Semenjak *otda* ini tidak mudah bagi kami etnis di luar Sasak untuk menduduki puncak pimpinan. Paling-paling *mentok* sampai eselon III."¹⁴

Isu dan konsepsi putra daerah dengan demikian semakin dipersempit hanya pada kelompok tertentu. Kontestasi semacam ini berlangsung terutama di lingkungan birokrasi dan kalangan

¹² Wawancara, tanggal 23 Desember 2012.

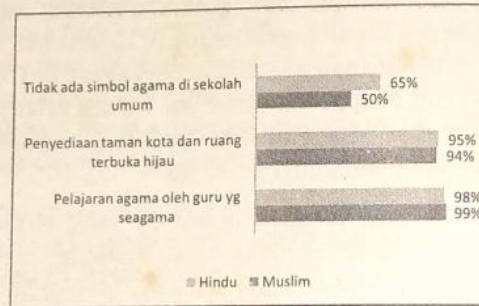
¹³ Wawancara, tanggal 24 Desember 2012. Beberapa hari setelah wawancara ini, terjadi pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Salah satu pejabat yang diganti adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram yaitu I Ketut Lania digantikan oleh Dr. Usman Hadi Selengkapnya baca di <http://www.ntbterkini.com/2012/03/28/pemerintah-kota-mataram-akhirnya-gelar-mutasi/> (diakses tanggal 29 Nopember 2012).

¹⁴ Wawancara, 30 Nopember 2012.

elit pemerintahan. Sedangkan di masyarakat umum, kontestasi berdasarkan asal suku hampir tidak terdengar.

Melengkapi kajian mengenai kontestasi ini, penting juga dilihat respons masyarakat mengenai munculnya kontestasi simbol agama di ranah pendidikan.

Grafik 5.4.
Kontestasi di ranah pendidikan



Pernyataan pertama yang diajukan terkait kontestasi simbol agama di ranah pendidikan adalah soal perlunya pelajaran agama diberikan oleh guru yang seagama dengan peserta didik. Hampir semua responden (98%) menyatakan setuju dengan pernyataan ini. Masyarakat memandang pelajaran agama adalah pelajaran keimanan atau akidah yang sangat penting bagi perkembangan anak. Para orang tua menginginkan transfer keimanan dapat berlangsung secara baik manakala pelajaran keagamaan diberikan oleh guru yang seiman. Pemberian pelajaran agama oleh guru yang seiman meyakinkan orang tua bahwa keimanan anak-anak mereka tidak akan goyah atau terpengaruh oleh agama lain.

Sekolah atau lembaga pendidikan merupakan salah satu ruang publik. Di tempat ini masing-masing kelompok mempunyai kesempatan untuk menampilkan simbol-simbol keagamaan. Di sadari atau tidak, kontestasi ini telah muncul dan dengan jelas dapat dilihat di sejumlah sekolah termasuk sekolah umum negeri. Menanggapi hal itu, sebanyak 50% dari kalangan Muslim dan 65% dari responden

Hindu menyatakan setuju adanya simbol-simbol agama di sekolah umum. Seorang informan menyatakan, "Pada prinsipnya sekolah tidak mengharuskan ada musala atau pura. Tetapi bagi kami, menyediakan sarana ibadah untuk anak-anak itu penting sekali. Karena di sekolah ada pelajaran agama. Jadi kalau mau praktek pelajaran agama, fasilitas sudah kita sediakan."¹⁵

Pemerintah kota Mataram sendiri melalui dinas pendidikan kota Mataram mempunyai program pembinaan keagamaan bagi siswa yang disebut program Iman dan Taqwa atau disingkat IMTAQ. Secara rutin, program ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Selama kurang lebih 1 jam, setiap sekolah memberi kesempatan peserta didik mengelompok berdasarkan agama dan memperdalam ajaran agama masing-masing dengan dipandu guru yang seagama. Pada kesempatan tersebut semua peserta didik diwajibkan memakai "seragam IMTAQ". Anak-anak Muslim menggunakan seragam muslim (laki-laki menggunakan celana panjang, baju koko dan songkok, sedangkan anak perempuan menggunakan rok panjang, baju lengan panjang dan jilbab). Demikian juga bagi anak-anak Hindu, mereka diwajibkan menggunakan pakaian Hindu (anak-anak laki-laki memakai sarung dan ikat kepala, sedangkan anak-anak perempuan *jarit* dan *kebaya*). Selain menambah wawasan atau pengetahuan ajaran agama peserta didik, lewat program IMTAQ seperti ini anak-anak diperkenalkan tentang adanya pluralitas dalam beragama. Para peserta didik tersebut sejak awal diperlihatkan bahwa di luar agama, tradisi yang selama ini mereka imani, ada agama atau keyakinan yang lain.

Dari paparan di atas dapat dimengerti bahwa semangat menampilkan simbol keagamaan di ruang publik seperti di sekolah dan lembaga pendidikan umumnya lainnya tak selamanya dipandang negatif. Kehadiran simbol-simbol tersebut secara tidak langsung telah menjadi wahana yang baik bagi para siswa untuk mengenal berbagai perbedaan identitas keagamaan. Dengan memberi kesempatan kepada para siswa menampilkan identitas keagamaan masing-

¹⁵ Wawancara dengan Pak Mulyadi, kepala sekolah tanggal 16 Desember 2012.

masing, akan memungkinkan siswa lain mengenal dan mempelajari identitas yang dimiliki agama lain. Yang diperlukan adalah bahwa satu kelompok tidak harus memutlakan identitas kelompoknya dan berusaha menyingkirkan identitas yang lain. Di sinilah, anak-anak yang menganut agama mayoritas diajari untuk menghormati identitas kelompok minoritas. Dalam perspektif Habermas, program menghadirkan agama di ruang publik seperti ini bisa diterima sepanjang tidak didominasi oleh kelompok mayoritas. Dalam ruang publik yang bebas, setiap kelompok memiliki kebebasan yang sama. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai agama di ruang publik sebagaimana dijabarkan dalam paparan berikut.

Agama di Ruang Publik dan Demokrasi

Terdapat pro dan kontra mengenai perlunya kehadiran agama di ruang publik. Sebagian menyatakan bahwa agama perlu dan sudah seharusnya hadir, sementara yang lain menolak perlunya artikulasi agama di ruang publik. Kalangan pendukung menyatakan bahwa agama perlu hadir dan mengisi ruang-ruang publik. Kehadiran agama di ruang publik adalah absah karena hal itu merupakan bagian inheren dari kebebasan masyarakat yang dijamin oleh demokrasi. Kehadiran agama juga akan berperan mengontrol ruang publik dan menjadikannya "tidak telanjang".¹⁶ Melarang agama tampil di ruang publik, bagi kelompok pendukung ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, melainkan juga akan meminggirkan agama dari tanggung jawab sosial. Meminggirkan agama dari ruang publik merupakan bias dari sekulerisme yang kerap menempatkan agama hanya pada urusan domestik atau persoalan privat semata.

Sedangkan bagi mereka yang menolak kehadiran agama di ruang publik beralasan agama akan bertentangan dengan demokrasi.

¹⁶ Selengkapnya mengenai hal ini lihat misalnya Richard John Neuhaus, *The Naked Public Square: Religion and Democracy in America* (Grand Rapid: W. B. Eerdmans, 1984); Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar, eds, *Islam di Ruang Publik...*, 22.

Agama hanya akan menjadi batu sandungan bagi terlembagakannya sistem demokrasi. Demokrasi memang memberikan kesempatan kepada semua elemen masyarakat termasuk kelompok agama untuk mengartikulasikan dan menampilkan identitas, tradisi, dan visi agama di ruang publik, tetapi demokrasi memiliki keterbatasan berupa ketidakmampuan dalam menampung aspirasi yang kontra terhadap prinsip demokrasi. Demokrasi tidak dapat menerima anasir-anasir yang kurang demokratis. Sebagaimana dipaparkan di bagian sebelumnya banyak sarjana meragukan kemampuan agama tampil beriringan dengan demokrasi. Agama-agama tertentu yang sering memutlakkan diri sebagai sumber kebenaran paling otoritatif karena bersumber dari Tuhan, dianggap akan menolak budaya demokrasi yang tak lain merupakan kreasi manusia. Tak kurang dari Samuel Huntington yang sering menyatakan bahwa agama tertentu termasuk Islam tidak kompatibel dengan demokrasi.

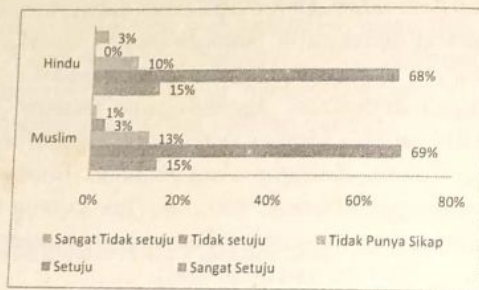
Sebelum menentukan manakah di antara kedua pandangan di atas sebagai pandangan yang mendekati kebenaran, berikut ini dipaparkan hasil survei pandangan komunitas Hindu dan Muslim di Kota Mataram terhadap sistem demokrasi.

Sejumlah pertanyaan penting terkait dengan pandangan masyarakat terhadap demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Dibanding bentuk pemerintah lainnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik untuk sebuah negara seperti kita ini
2. Dalam demokrasi, sulit mengambil keputusan karena demokrasi memunculkan pertentangan-pertentangan
3. Kelompok ekstrim, yaitu kelompok masyarakat yang punya pandangan dan sikap sangat berbeda dari kebanyakan warga negara lainnya, tetap punya hak untuk mengemukakan pendapat yang berbeda
4. Golongan kecil di masyarakat dilarang berdemonstrasi menentang pendapat politik golongan besar (mayoritas)
5. Setiap warga negara harus diperbolehkan ikut serta dalam organisasi politik apa pun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai respons masyarakat terhadap pernyataan-pernyataan di atas sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini.

Grafik 5.5
Pandangan mengenai demokrasi merupakan bentuk pemerintahan terbaik dibanding sistem lainnya



Dari paparan grafik di atas sebagian besar responden baik dari kalangan Muslim maupun Hindu (69% dan 68%) menyatakan setuju terhadap pernyataan "dibanding bentuk pemerintahan lainnya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan terbaik dan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia". Persentase keyakinan masyarakat Muslim dan Hindu di Kota Mataram ini ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan tim peneliti dari PPIM tahun 2001 dan 2002. Dalam survei dengan jumlah sampel lebih dari seribu ini ditemukan angka yang konstan yakni sekitar 70%.¹⁷ Hanya sebagian kecil responden (kurang dari 3%) yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Fakta ini menjadi salah satu bukti bahwa saat ini demokrasi telah diterima oleh semua elemen masyarakat Indonesia termasuk komunitas agama di Mataram.¹⁸

¹⁷ Mujani, *Muslim Demokrat...*, 228

¹⁸ Sebagai bahan perbandingan, berikut dipaparkan hasil World Value Survey di sejumlah negara; Turki (89%), Jepang (88%), Amerika Serikat (88%), Afrika Selatan (85%), Korea Selatan (84%), Brazil (78%). Hasil survey di Indonesia hamper mirip di Filipina (72%) dan Meksiko (71%). Lihat Mujani, *Muslim Demokrat...*, 228-229.

Keyakinan bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik merupakan poin penting bagi munculnya dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹ Dukungan terhadap sistem demokrasi yang berasal dari mayoritas masyarakat suatu Negara akan memberi legitimasi kuat bagi demokrasi untuk tumbuh dan berkembang.²⁰ Dengan dukungan yang kuat dari masyarakat dengan sendirinya demokrasi menjadi terkonsolidasi. Tanpa adanya dukungan atau persetujuan dari masyarakat, adalah mustahil demokrasi dapat berkembang dengan baik.

Poin penting berupa keyakinan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik dibanding bentuk pemerintahan lain dan dirasa cocok untuk Indonesia dapat dipahami sebagai penerimaan terhadap beberapa kekurangan yang ada dalam sistem tersebut. Seperti lazim diketahui bahwa prinsip utama dalam demokrasi adalah suara terbanyak. Untuk mencapai sebuah keputusan sering kali lebih sulit dibanding misalnya dengan sistem monarki atau sistem yang ditetapkan rezim otoriter. Di mana dalam sistem non-demokrasi pengambilan keputusan dapat secara cepat ditentukan oleh pemegang kuasa. Sementara dalam demokrasi diperlukan waktu yang tidak sedikit sehingga semua pihak memperoleh kesepakatan.

Untuk menguji kepercayaan masyarakat komunitas beragama terhadap problematika seperti di atas, survei ini juga mengajukan pertanyaan kritis seperti dalam demokrasi, sulit mengambil keputusan karena demokrasi memunculkan pertentangan-pertentangan. Pertanyaan ini sengaja diajukan mengingat ukuran terhadap keyakinan demokrasi tidak hanya bagi sikap positif terhadap demokrasi, melainkan juga sikap terhadap ukuran-ukuran negatif demokrasi.²¹ Sebaran jawaban responden ternyata menunjukkan

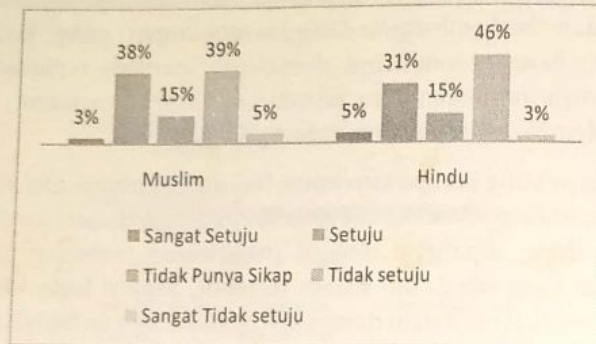
¹⁹ Lihat pada Adam Przeworski (1991), 26.

²⁰ Ibid Adam Przeworski (1991), 26

²¹ *World Value Survey*, pernyataan ini secara konsisten juga ditanyakan di sejumlah Negara. Selengkapnya lihat Mujani, *Muslim Demokrat...*, 228.

konsistensi, meskipun persentasenya tidak sebesar pernyataan pertama. Selengkapnya sebagaimana tampak dalam grafik berikut ini.

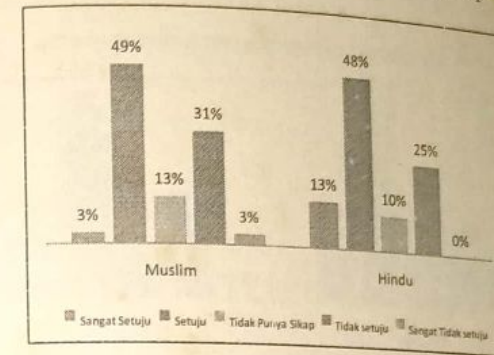
Grafik 5.6.
Dalam demokrasi, sulit mengambil keputusan



Dari grafik ini terlihat sebanyak 38% responden Muslim menyatakan setuju dengan pernyataan dalam demokrasi, sulit mengambil keputusan karena demokrasi memunculkan pertentangan-pertentangan. Sedangkan di komunitas Hindu angkanya sebesar 31%. Adapun responden yang menolak pernyataan ini angkanya jauh lebih tinggi, baik untuk responden Muslim maupun Hindu (masing-masing sebesar 39% dan 46%). Dari data ini dapat dimengerti bahwa sebagian besar masyarakat tetap menerima demokrasi sebagai pilihan terbaik, meskipun untuk pengambilan keputusan bukanlah hal mudah.

Dukungan berikutnya terhadap demokrasi juga terlihat dari tingginya persentase responden yang menyatakan setuju bahwa kelompok ekstrim (yaitu kelompok masyarakat yang punya pandangan dan sikap sangat berbeda dari kebanyakan warga negara lainnya) tetap punya hak untuk mengemukakan pendapat yang berbeda. Selengkapnya sebagai tersaji dalam grafik berikut ini.

Grafik 5.7.
Kelompok ekstrim tetap punya hak untuk berpendapat



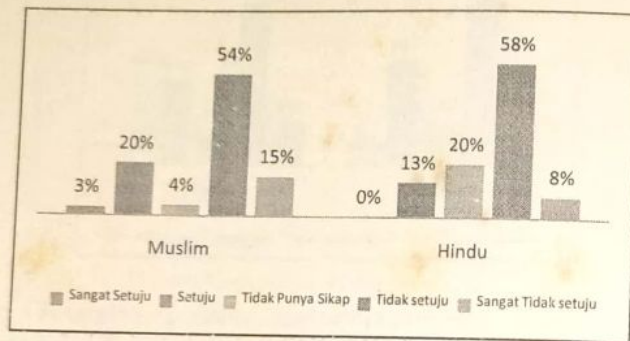
Demokrasi mempersyaratkan adanya toleransi politik. Toleransi terhadap pandangan yang berbeda dari pandangan yang diyakini oleh kelompok mainstream. Kesiapan menenggang perbedaan akan menjadikan semua kelompok masyarakat memiliki keberanian untuk bersuara atau menyampaikan aspirasi tanpa takut adanya ancaman atau tekanan. Sebanyak 49% dan 48% responden Muslim dan Hindu menyatakan setuju kelompok apabila kelompok ekstrim (yaitu kelompok masyarakat yang punya pandangan dan sikap sangat berbeda dari kebanyakan warga negara lainnya) tetap punya hak untuk mengemukakan pendapat yang berbeda. Hanya sebagian kecil responden Muslim (31%) dan responden Hindu (25%) yang menyatakan ketidak-setujuannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat masyarakat Hindu dan Muslim di kota Mataram yang menyatakan dukungan terhadap ukuran negatif demokrasi.

Kecilnya dukungan masyarakat terhadap ukuran negatif demokrasi juga tampak paralel dengan temuan survei berikut ini. Toleransi politik terhadap pandangan kelompok di luar kelompok mainstream juga secara konstan ditemukan pada penolakan responden terhadap pernyataan bahwa golongan kecil (minoritas) di masyarakat dilarang berdemonstrasi menentang pendapat politik golongan besar (mayoritas). Hanya sebesar 20% responden (baik

Muslim maupun Hindu) yang menyatakan setuju bahwa minoritas dilarang menentang pendapat mayoritas.

Grafik 5.8

Minoritas dilarang menentang pandangan mayoritas

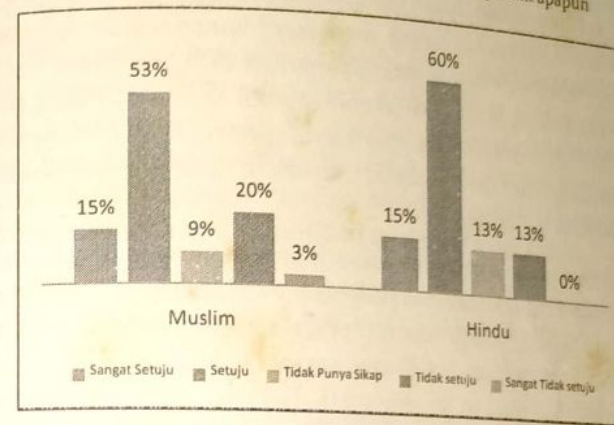


Sebagian besar responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa golongan kecil (minoritas) di masyarakat dilarang berdemonstrasi menentang pendapat politik golongan besar (mayoritas). Persentase ketidaksetujuan mencapai lebih dari 50% di masing-masing komunitas. Bahkan sebagian responden yang menyatakan menyatakan sangat tidak persentasenya mencapai 15%. Data ini semakin memperkuat temuan bahwa dukungan komunitas Muslim dan Hindu di Mataram, terhadap unsur negatif demokrasi sangat kecil. Sikap menghargai kelompok minoritas sangat besar di masyarakat.

Indikator dukungan terhadap demokrasi juga dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk memperbolehkan semua orang bebas dan berhak masuk organisasi politik manapun. Tidak ada larangan atau paksaan keterlibatan seseorang dalam organisasi sosial politik. Seperti tampak dalam grafik berikut ini, sebagian besar responden menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Setiap warga negara harus dibolehkan ikut serta dalam organisasi politik apa pun.

Grafik 5.9

Setiap warga negara bebas dalam berorganisasi politik apapun



Dari grafik di atas terlihat bahwa baik responden dari komunitas Muslim maupun Hindu menyatakan setuju jika setiap warga negara harus dibolehkan ikut serta dalam organisasi politik apa pun. Hanya sebagian kecil di bawah 20% responden yang menyatakan tidak setuju terhadap kebebasan berafiliasi dengan politik apa pun.

Analisa: Dari paparan data di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa komunitas beragama dalam hal ini komunitas Islam dan Hindu memberikan dukungan yang kuat terhadap demokrasi. Dukungan terhadap demokrasi diperlihatkan dari persetujuan mereka terhadap keyakinan bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik bagi negeri ini untuk diimplementasikan sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu dukungan masyarakat terhadap demokrasi juga secara nyata terlihat dalam persetujuan atau dukungan responden terhadap unsur positif demokrasi. Unsur positif itu misalnya kesamaan hak untuk bersuara, berpolitik\atau terlibat dalam organisasi sosial dan politik secara bebas, dan pengakuan keberadaan kelompok minoritas. Tingginya persentase responden yang menyatakan mendukung terhadap terhadap ukuran positif terhadap demokrasi ternyata paralel dengan kecilnya persentase dukungan terhadap unsur negatif demokrasi.

Dengan kondisi seperti di atas, dapat dinyatakan bahwa masyarakat sangat siap dalam melakukan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi ini lah yang memberikan pengaruh positif bagi kedewasaan masyarakat dalam menyikapi kontestasi simbol agama di ruang publik. Sebagaimana dipaparkan di bagian awal bab ini, bahwa munculnya kontestasi simbol-simbol agama di ruang publik sejauh ini tidak menimbulkan gesekan dan ketegangan di masyarakat. Semua pihak secara dewasa dapat menerima hadirnya simbol-simbol agama di kota Mataram.

Kemampuan dan kedewasaan masyarakat menyikapi munculnya kontestasi juga berdampak pada terciptanya suasana kota Mataram yang relatif aman. Dalam sepuluh tahun terakhir, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Mataram berlangsung cukup aman. Kenyataan ini diperoleh dari respons masyarakat yang menyatakan bahwa situasi dan kondisi kota Mataram berlangsung aman. Warga masyarakat merasa aman jika mereka bepergian baik siang maupun malam hari.

Melalui Tabel berikut dapat dilihat bagaimana respons masyarakat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kota Mataram secara umum.

Tabel 5.1
Persepsi warga terhadap kamtibmas

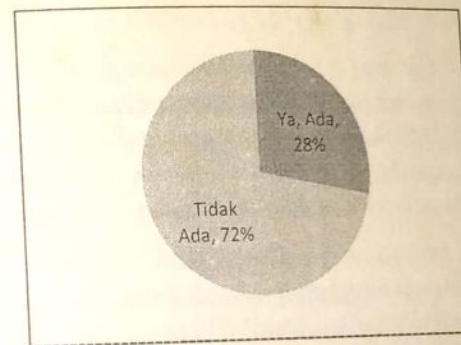
Pernyataan	Sangat aman	Kurang Aman	Cukup Aman	Tidak aman sama sekali	Tidak Tahu
Gambaran umum suasana kota	66%	10%	23%	1%	0%
Kondisi bepergian di malam hari	46%	17%	33%	4%	0%

Tabel di atas merupakan hasil gabungan persentase pendapat responden Muslim dan Hindu terkait kondisi keamanan kota Mataram. Dari tabel di atas, sebanyak 66% responden menyatakan

bahwa mereka merasa sangat aman dan 23% responden menyatakan cukup aman tinggal di kota Mataram. Sedangkan responden yang menyatakan kurang aman sebanyak 10%.

Pada malam hari pun, sebagian besar responden menyatakan aman. Sebanyak 46% responden menyatakan sangat aman dan sebanyak 33% menyatakan cukup aman apabila mereka bepergian di malam hari. Kondisi demikian berlangsung di hampir semua tempat di kota Mataram. Grafik berikut memberi gambaran tentang ada tidaknya tempat yang diidentifikasi sebagai kurang aman.

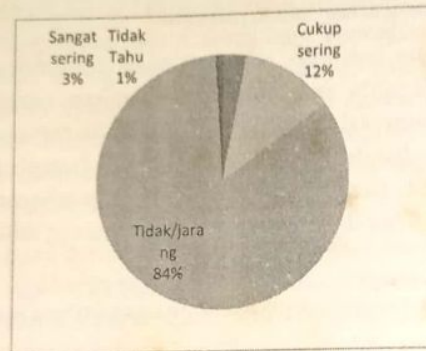
Grafik 5.10
Tempat-tempat yang diidentifikasi sebagai kurang aman



Sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak ada tempat-tempat tertentu di Kota Mataram yang diidentifikasi kurang aman. Sebanyak 72% responden menyatakan bahwa tidak ada tempat yang dirasa kurang aman.

Suasana keamanan yang kondusif sebagaimana tampak dalam grafik di atas memberi kontribusi penting bagi terbangunnya iklim demokrasi di kota Mataram. Kondisi keamanan tentu saja merupakan hasil kerja dari seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah daerah, aparat kepolisian dan tentu saja buah dari budaya kewargaan yang berlangsung di masyarakat. Kemampuan masyarakat mengembangkan budaya kewargaan tersebut pada gilirannya juga memberi sumbangan berarti bagi berkurangnya kerusuhan atau konflik sosial.

Grafik 5.11
Kerusuhan atau Konflik Sosial



Dari grafik di atas terlihat bahwa sebagian besar responden (84%) menyatakan bahwa di Kota Mataram tidak atau jarang terjadi kerusuhan atau konflik sosial. Beberapa konflik komunal memang pernah terjadi seperti di wilayah Mataram, tetapi secara umum konflik-konflik tersebut dapat dikelola dengan relatif baik.

Sejumlah kerusuhan yang melibatkan komunitas Hindu dan Muslim sempat meledak seperti di wilayah Karang Jasi yang mayoritas beragama Hindu dengan warga Muslim Karang Tapen yang mayoritas beragama Islam. Kerusuhan dipicu persoalan kecelakaan lalu lintas. Tapi beruntung keadaan ini tidak sampai berlarut-larut. Pola pemukiman yang terpisah antara pemukiman komunitas Hindu dan Muslim seperti tampak pada pemukiman di Karang Jasi dan Karang Tapen memerlukan penanganan yang ekstra hati-hati sehingga setiap ketegangan tidak merembet menjadi konflik bernuansa etnis atau agama.

Saat penelitian ini berlangsung, ketegangan sempat terjadi antara komunitas Hindu dan Muslim. Ketegangan berlangsung selama beberapa hari. Peristiwa tersebut dipicu oleh perkelahian antara pemuda Muslim dari lingkungan Karang Mas-mas dengan pemuda Hindu dari lingkungan Tohpati. Kedua lingkungan ini letaknya berdekatan.

Akibat perkelahian tersebut, Sulaiman, pemuda Karang mas-mas tewas terkena sabetan pedang oleh pemuda dari lingkungan Tohpati. Korban yang masih duduk di bangku kelas III salah satu SMU di kota Mataram ini sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi sayang nyawanya tak tertolong.²²

Buntut dari kejadian ini, selama beberapa hari lokasi kerusuhan masih mencekam. Pasca kejadian penusukan pemuda Karang Mas-mas tersebut, kedua wilayah dijaga lebih dari 400 personel polisi dari Polresta Mataram yang didukung oleh Polda NTB. Kamis Malam, 20 Desember 2012 konflik kembali pecah, menyusul kerusuhan sebelumnya.²³ Untuk mengantisipasi kerusuhan yang lebih luas, penjagaan oleh aparat kepolisian tetap dilakukan. Hingga awal tahun 2013 sejumlah polisi disiagakan di ujung jalan tempat terjadinya kerusuhan.

Menurut penuturan Sigit, anggota polisi yang telah bertugas di Mataram selama lebih dari 20 tahun menyatakan bahwa situasi konflik komunal masih rawan. Konflik komunal biasanya dipicu oleh perkelahian antar pemuda. Minuman keras dianggap sebagai pemicu utama munculnya perkelahian tersebut.²⁴

Demikianlah, di sela-sela hubungan yang harmonis antara komunitas Hindu dan Muslim di kota Mataram, ketegangan dan konflik bisa saja muncul manakala kedua belah pihak tidak bisa menahan diri. Pertikaian individu yang melibatkan warga Bali dan Lombok dapat saja berkembang menjadi konflik komunal jika tidak segera ditangani secara cepat dan proporsional.

Menyikapi kasus kerusuhan seperti di atas, Ahsanul Khalik, Camat Cakranegara menyatakan bahwa sejumlah langkah dilakukan seperti pengamanan oleh aparat keamanan dan mediasi. Mediasi

²² "Bentrok antar Pemuda, Satu Tewas", Berita *Lombok Post*, 20 Desember 2012.

²³ "Satu rumah warga dibakar, 3 anggota terkena lemparan batu", kata Kapolres Mataram, AKBP Kurnianto Purwoko. Dikutip dari *Lombok Post*, 20 Desember 2012.

²⁴ Wawancara dengan Sigit tanggal 30 Desember 2012.

dilakukan dengan cara mengunjungi tokoh-tokoh dari kedua belah pihak. Kunjungan dilakukan di masing-masing lingkungan. Pertemuan tidak diadakan secara bersamaan dengan mengumpulkan mereka di satu tempat secara bersamaan.²⁵ Jadi yang dilakukan Camat masih sebatas peredaman. Selain itu, beberapa hari pasca kerusuhan, upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan *begibung* (makan bersama) usai salat Jumat.²⁶

Dari berbagai kasus kerusuhan yang terjadi ketepatan dan kecepatan aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan kerusuhan merupakan hal penting proses de-eskalasi konflik. Apabila kondisi di lapangan telah terkuasai dengan baik, maka langkah berikutnya hendaknya juga disiapkan misalnya dengan mengembangkan pola transformasi konflik yang sistematis dan *sustainable*.

Dalam kondisi aman, pemerintah daerah perlu mengembangkan pola komunikasi yang intensif yang melibatkan kelompok-kelompok di masyarakat. Salah satu program pengelolaan konflik adalah dengan meningkatkan budaya kewargaan di kedua komunitas. Langkah ini merupakan pola manajemen konflik dalam jangka panjang. Upaya resolusi konflik tidak berhenti di tingkat penghentian konflik, melainkan ditingkatkan pada upaya-upaya transformasi konflik yang termogram dan berkelanjutan.

²⁵ Hal ini sengaja dilakukan karena suasana pasca konflik yang mengakibatkan satu warga Muslim meninggal ini masih mencekam. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa malah menimbulkan kerusuhan lanjutan. Wawancara dengan Ahsanul Khalik tanggal 29 Desember 2012.

²⁶ Sementara Kapolsek Cakranegara melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan membagikan sembako kepada korban. Radar Lombok hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012.

6

Epilog

Sebagai ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram telah menjadi kota multikultur. Masyarakat yang ada di kota ini merupakan masyarakat plural. Pluralitas etnis, agama dan adat istiadat bukan merupakan hambatan bagi terbentuknya sebuah masyarakat yang maju dan berkeadaban. Pluralitas justru merupakan potensi yang luar biasa, asal semua pihak dapat mengelolanya secara dewasa dan *civilized*. Salah satu upaya menyikapi pluralitas adalah dengan mengembangkan unsur-unsur budaya kewargaan seperti partisipasi aktif, solidaritas, saling percaya, toleransi, norma timbal balik, kesetaraan, dan *social networking* atau tradisi berasosiasi.

Budaya kewargaan yang mewujud dalam sikap dan perilaku anggota masyarakat berkontribusi bagi konsolidasi dan berkembangnya iklim demokrasi yang sehat. Konsolidasi demokrasi yang mantap memungkinkan tercapainya cita ideal kota Mataram sebagaimana terformulasikan dalam motto: Maju, Religius dan Berbudaya.

Berkaitan dengan potret budaya kewargaan dan kontestasi simbol keagamaan di ruang publik, riset ini menemukan banyak fakta menarik. Budaya kewargaan yang berlangsung pada komunitas Hindu dan Muslim berlangsung relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase respons warga terhadap sejumlah unsur budaya kewargaan sebagaimana dipaparkan di atas.

Unsur pertama budaya kewargaan dilihat misalnya dengan mengukur partisipasi warga baik partisipasi kebangsaan maupun partisipasi politik. Terkait partisipasi kebangsaan, hasil survei menunjukkan bahwa identitas kebangsaan lebih tinggi dibanding identitas kedaerahan dan keagamaan. Persentase perasaan sebagai orang Indonesia lebih tinggi dibanding perasaan sebagai orang daerah atau sebagai penganut agama tertentu.

Temuan di atas memberi bukti bahwa dukungan warga terhadap konsep negara bangsa cukup menggembirakan. Untuk partisipasi politik, warga terlibat aktif dalam kegiatan penyampaian aspirasi politik baik konvensional seperti mengikuti pemilihan umum maupun melakukan protes atau menggelar unjuk rasa manakala ada kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang.

Beberapa indikator lain yang menjelaskan tentang tingginya partisipasi kebangsaan misalnya kesediaan warga melakukan hal-hal yang berhubungan dengan upaya memupuk nasionalisme. Beberapa upaya itu antara lain ikut merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, memasang bendera kebangsaan, kesediaan mengikuti wajib militer dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kerja bhakti dan aktif dalam sistem keamanan lingkungan (*siskamling*). Sayangnya, untuk dua aktivitas yang disebut terakhir, persentasenya relatif rendah.

Aspek budaya kewargaan berikutnya yang berlangsung di komunitas Hindu dan Muslim, adalah berkembangnya solidaritas sosial. Solidaritas sosial tidak hanya berlangsung di intra tetapi juga antar agama. Hal ini ditandai dengan kesediaan untuk saling berbagi, menolong, pinjam-meminjam uang kepada saudara atau tetangga, baik yang seagama atau berbeda agama.

Kesediaan untuk membantu saudara dan tetangga yang berbeda agama muncul manakala sebelumnya telah terbangun rasa percaya antar warga (*interpersonal trust*). *Trust* merupakan unsur terpenting budaya kewargaan dan modal utama bagi tumbuhnya demokrasi. Tanpa adanya rasa percaya antar warga dan antar kelompok, sangat sulit dibayangkan demokrasi dapat tumbuh dengan baik. Penelitian ini mendukung sejumlah temuan lain yang menyatakan bahwa aspek kepercayaan merupakan bagian terpenting tumbuhnya demokrasi di suatu wilayah.

Selanjutnya terkait dengan toleransi, baik toleransi politik maupun antar agama, dapat disimpulkan bahwa tingkat toleransi komunitas Muslim dan Hindu di Kota Mataram termasuk tinggi. Menyangkut toleransi politik, dua komunitas mengaku bersedia hidup berdampingan dengan kelompok yang berbeda agama atau keyakinan. Toleransi juga diberikan kepada warga yang memiliki afiliasi politik yang berbeda. Sedangkan menyangkut toleransi agama, sebagian besar warga menyatakan bahwa memeluk agama merupakan hak setiap warga negara. Setiap orang berhak memeluk dan menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya paksaan. Sebagian besar warga menyatakan bahwa setiap agama memiliki kebenaran dan keselamatan. Oleh karena itu tidak boleh satu kelompok menghina atau *menjudge* agama atau keyakinan orang lain sebagai salah atau sesat. Subyek penelitian juga menyatakan bahwa urusan menentukan kebenaran agama sepenuhnya merupakan otoritas Tuhan.

Dari data kuantitatif yang diperdalam dengan wawancara dan observasi dapat dinyatakan bahwa secara umum, pola keberagaman masyarakat Muslim dan Hindu di Mataram terkategori *inklusif*. Inklusivitas ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku subyek penelitian, yang meskipun menyatakan bahwa agama yang dipeluknya sebagai yang paling benar dan menjanjikan keselamatan di akhirat kelak, namun mereka tidak menafikan adanya kebenaran yang dimiliki agama lain. Kondisi demikian menjadi dasar bagi munculnya pengakuan kesetaraan (*ekualitas*) pada setiap warga negara.

Ekualitas atau kesetaraan menjadi salah satu indikator berlangsungnya budaya kewargaan. Sebagian besar subyek penelitian

menyatakan bahwa setiap warga negara adalah sederajat dalam memperoleh perlindungan negara. Setiap warga negara juga memiliki akses yang sama dalam memperoleh pendidikan, penghasilan, perlindungan hukum, dan mengemukakan pendapat. Data menarik dari hasil survei menunjukkan bahwa pernyataan ekualitas ini bahkan diberikan kepada kelompok-kelompok di luar mainstream.

Tingginya persentase dukungan warga terhadap unsur-unsur budaya kewargaan di Mataram, memberi sinyal positif akan adanya penerimaan dan apresiasi terhadap sistem demokrasi. Seperti disebutkan dalam banyak kajian; salah satu wujud penerimaan demokrasi adalah adanya pengakuan bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik dibanding bentuk pemerintahan lainnya.

Dukungan terhadap demokrasi juga terlihat dari rendahnya persetujuan responden terhadap sejumlah pernyataan negatif demokrasi. Warga menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa dalam demokrasi sulit mengambil keputusan. Demikian juga persentase persetujuan warga sangat rendah terhadap pernyataan bahwa dalam iklim demokratis, kondisi politik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat terhambat.

Dari tanggapan subyek penelitian ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi ternyata telah diterima secara baik di komunitas beragama. Penelitian ini, dengan demikian mendukung seperti riset-riset sebelumnya seperti riset yang dilakukan Saiful Mujani dan Tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sebaliknya, penelitian ini menolak klaim sejumlah sarjana yang menyatakan bahwa Islam tidak mendukung budaya demokrasi. Terlalu gegabah menyimpulkan bahwa agama tertentu tidak kompatibel dengan demokrasi tanpa memberikan data-data empiris. Respons positif masyarakat Hindu dan Muslim di Kota Mataram terhadap demokrasi merupakan bukti bahwa demokrasi dapat diterima secara baik oleh komunitas beragama.

Hanya saja, budaya kewargaan yang berkembang pada komunitas Hindu ternyata relatif lebih tinggi dibanding dengan yang ada di komunitas Muslim. Dalam hal toleransi agama misalnya,

persentase persetujuan warga Hindu terhadap beberapa pernyataan berikut terlihat lebih tinggi. Pernyataan-pernyataan itu antara lain kesediaan mengundang dan menghadiri undangan tetangga yang berbeda agama, berbagi makanan, takziah atau melayat apabila ada tetangga yang meninggal dunia. Terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama lain seperti itu, warga Hindu menyatakan lebih sering melakukannya dibanding warga Muslim. Hal yang sama juga ditemukan pada kegiatan-kegiatan seperti meminjam atau meminjamkan uang, memilih pemimpin, mengucapkan selamat hari raya, dan membantu pembangunan tempat ibadah bagi agama lain.

Terdapat dua penjelasan mengapa budaya toleransi keagamaan umat Hindu lebih tinggi dibanding umat Muslim. Pertama, posisi pemeluk Hindu di Mataram sebagai kelompok minoritas. Posisi demikian biasanya menjadikan satu kelompok lebih bersikap mengalah. Terkait hal ini, memang diperlukan studi lanjutan misalnya dengan melihat budaya kewargaan pada komunitas Hindu sebagai kelompok mayoritas seperti di pulau Bali. Kedua, agama Hindu termasuk salah satu agama yang tidak berorientasi pada dakwah atau penyebaran (*un-missionary religion*). Pola transmisi keagamaan sebagian besar berlangsung melalui jalur keturunan atau keluarga.

Dua hal di atas tampaknya memberi dampak positif bagi kontestasi simbol keagamaan di ruang publik yang berlangsung relatif aman.

Mengiringi perkembangan demokrasi, berbagai simbol keagamaan sering muncul di ruang publik di kota Mataram. Simbol-simbol keagamaan tersebut tampil berbagai dalam bentuk yang variatif, mulai yang bersifat fisik dan kasat mata maupun kontestasi di ranah politik birokrasi.

Tampilnya simbol-simbol keagamaan yang bersifat fisik di ruang publik sejauh ini belum mengganggu budaya kewargaan komunitas Hindu maupun Muslim. Masing-masing kelompok sejauh ini menerima kehadiran simbol-simbol tersebut. Bahkan sebagian besar warga menyatakan bahwa keberadaan simbol agama Hindu Bali akan memberi nilai positif bagi berkembangnya pariwisata di

kota Mataram maupun di pulau Lombok. Keberadaan simbol-simbol Hindu Bali tersebut semakin meningkatkan kesan wisatawan yang menyatakan; "Di Bali, Anda tak bisa melihat Lombok, tapi di Lombok Anda bisa melihat keduanya".

Sedangkan terkait kontestasi di ranah politik birokrasi; penguatan identitas etnis dan agama sering menjadikan hambatan bagi berkembangnya birokrasi pemerintahan yang dijalankan berdasar prinsip-prinsip profesionalitas dan manajemen modern. Dalam hal penerimaan pegawai negeri sipil atau penentuan jabatan masih dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan emosional subyektif. Subyektifitas yang dimaksud misalnya didasarkan pada asal daerah, kesamaan agama, atau kesamaan etnis.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel and Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton: Princeton University Press, 1963).
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London and New York: Verso, 1991)
- Appleby, R.S., *The Ambivalence of the Sacred: Religion and Violence, and Reconciliation* (New York: Rowman and Littlefield, 2000).
- Arzaki, Djalaluddin dkk., *Nilai-nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak dalam Pluralisme Bermasyarakat*. (Mataram: Pokja Redam NTB, 2001).
- Bakker, Freek L., "Balinese Hinduism and the Indonesian State: Recent Developments", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153, 1ste Afl.* (1997): 15-41. Published by: KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies <http://www.jstor.org/stable/27864809>. (diakses tanggal 01 Nopember 2011)

- Banchoff, Thomas, *Religious Pluralism, Globalization, and World Politic*, (New York: Oxford University Press, 2008).
- Bertrand, Jacques, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2004).
- Brannen, Julia, *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*(Vermont: Avebury, 1992)
- Buku Saku Kota Mataram Tahun 2011, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram
- Cederroth, Sven, *The Spell of The Ancestors and The Power of Mekkah: A Sasak Community on Lombok* (Goteborg Sweden: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981).
- Coppel, CA., ed. *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*. (London: Routledge, 2005).
- Coward, Harold, *Pluralism: Challenge to World Religions* (New York: Orbis Books, 1985).
- Data BPS Kota Mataram tahun 2010
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin *Arsitektur Rumah Tradisional Bali, Berdasarkan Asta Kosala-Kosali* (Denpasar: Udayana University Press, 2008).
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin, *Arsitektur Rumah Tradisional Bali, Berdasarkan Asta Kosala-Kosali* (Denpasar: Udayana University Press, 2008).
- Endang Kironosasi W, *Stereotipe dan Prasangka dalam Interaksi Antar Kelompok :Studi Komunikasi Antar Budaya Sukubangsa Bali dan Sukubangsa Sasak di Shindu, Kotamadya Mataram Lombok Barat*. (Jakarta : Program Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial, 1996).
- Fallon, Fleur "Conflict, Power and Tourism on Lombok", *Current Issues in Tourism*, Vol. 4, No. 6, (2001); 481-502.
- Fallon, Fleur, "Conflict, Power and Tourism on Lombok", *Current Issues in Tourism*, Vol. 4, No. 6, (2001); 481-502.

- Fukuyama, Francis, *Trust: The Social Capital and Civil Virtues and The Creation of Prosperity* (New York: The FGree Press, 1995).
- Geertz, Clifford, *The Interpretation of Culture* (New York: Basic Book, 1973).
- Handinoto, "Pola Spasial dan Sistim Jalan dari Kota Akranegara dan Probolinggo, Sebuah Perbandingan", *Dimensi Teknik Arsitektur* vol. 27, no. 2, Desember 1999: 21 - 30
- Hardiman, F. Budhi, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- Hasan, Noorhaidi dan Irfan Abubakar, eds, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2011).
- Hefner, Robert W., *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- Heiler, Frederich, "Studi agama sebagai persiapan kerjasama antaragama" dalam *Metodologi Studi Agama*, ed. dan penterjemah Ahmad Norma Permata (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hidayah, Zulyani, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Hisyam, Muhammad dkk., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Aman Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2007).
- Hoyland, Robert G. "Sebeos, the Jews and the Rise of Islam," dalam *Medieval and Modern Perspectives on Muslim-Jewish Relation*, ed. R.L. Netler, (Amsterdam: Harwood Academic Publisher, 1995).
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilization: Remarking of The World Order* (New York: Simon and Schuster, 1997).
- Inglehart, Ronald, "Trust, Well-Being, and Democracy" dalam *Democracy and Trust*. Editor Mark E. Warren (Cambridge:

- Cambridge University Press, 1999).
- Iswarini, Sri Endras, Ulfa Hidayati, dan Yanti Muchtar, *Kebijakan Berbasis Syariah di NTB: Keadilan Gender dan Pluralisme di Persimpangan*, Laporan Penelitian (Jakarta: KAPAL Perempuan, 2010)
- Jamaludin dkk, *Penyusunan Sejarah Kota Mataram*. Laporan Akhir Penelitian (Mataram: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2011).
- Kedourie, Elie, *Democracy and Arab Political Culture* (Portland: Frank Cass, 1994); dan Samuel P Huntington, *The Clash of Civilization: Remarking of The World Order* (New York: Simon and Schuster, 1997).
- Khoirunnisa, *Multikulturalisme dan Politik Identitas: Kontestasi simbol-simbol Islam pada Ruang Publik di Kota Tangerang* (Jakarta: Young Progressive Muslim, 2012).
- Kiefer, *The Tausug: Violence and Law in a Philippine Moslem Society* (New York: Holt Rinehart and Wiston, 1972).
- Kingsley, Jeremy, *Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia*, Ph.D. thesis, (Melbourne: The University of Melbourne, 2010).
- Klingemann, Hans-Dieter, "Mapping Political Support in 1990s: A Global analysis." dalam *Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance*. Ed. Pippa Norris (Oxford: Oxford University Press, 1999).
- Lewis, Bernard, *What Went Wrong? Western Impact and Middle eastern Response* (Oxford: Oxford University Press, 2002).
- Lipset, Seymour Martin, "The Social Requisites of Democracy Revisited.", dalam *American Sociological Review* 59 (1994)
- McGuire, Meredith B., *Religion: The Sosial Context* (Belmont, CA: Wadsworth, 2002).
- Madjid, Nurcholish, "Dialog di antara Ahli Kitab (*ahl al-kitâb*):

- Sebuah Pengantar", dalam George B. Grose dan Benjamin J. Hubbard (editor), *Tiga Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog*, penerj. Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 1998).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mujani, Saiful, *Islam dan Good Governance*, (Jakarta : PPIM IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002).
- _____, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Mulyadi, Lalu, *Pola Kota Cakranegara* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000).
- Mustain dan Mukhlis. "Hubungan Hindu Muslim di Kota Mataram (Kajian Potensi Integrasi dan Konflik dalam Hubungan antar Agama)". Laporan Penelitian Lemlit STAIN Mataram, 2003
- Neuhaus, Richard John *The Naked Publik Square: Religion and Demoracy in America* (Grand Rapid: W. B. Eerdmans, 1984).
- Noer, Kautsar Azhari, "Agama Langit versus Agama Bumi: Sebuah Telaah atas Klasifikasi Agama-agama", *Titik -Temu Jurnal Dialog Peradaban*, Vol.3, No.2 Januari-Juni (2011): 72-96.
- Oxford Dictionary of English*, (Oxford: Oxford University Press, 2003).
- Pangabean, Samsu Rizal, Rudi Harisyah Alam dan Ihsan Ali Fauzi. "The Patterns of Religious Conflict in Indonesia (1990 - 2008)", *Studia Islamika* Vol.17 No. 2, (2010): 233 - 298.
- Panikkar, Raimundo, *Dialog Intra Religius*, terj. oleh Kelompok Studi Filsafat Driyarkara (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Patulny, Roger V., dan Gunnar Lind Haase Swendsen, "Exploring The Social Capital Grid: bonding, bridging, qualitative, quantitative", *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol.27. No.1/2 (2007): 32-57.

- Patulny, Roger V. dan Gunnar Lind Haase Swendsen, "Exploring The Sosial Capital Grid: bonding, bridging, qualitative, quantitative", *International Journal of Sociology and Sosial Policy*, Vol.27. No.1/2 (2007); 32-57.
- Paul R. Brass. *The Production of Hindu Muslim Violence in India*. Seattle: University of Washington Press, 2003.
- Peek, Lori "Becoming Muslim: The Development of a Religious Identity", *Sociology of Religion*, Vol. 66, No. 3 (2005); 215-242 <http://www.jstor.org/stable/4153097>. Diunduh tanggal 12 Februari 2012
- Putnam, Robert D. *Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton: Princenton University Press, 1993).
- al-Qurtuby, Sumanto, "Pluralisme, Dialog dan Peace Building Berbasis Agama di Indonesia" dalam *Merayakan Kebebasan Beragama: Bungai Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009).
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2012 (Mataram: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2012).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.
- Rubin, Uri, *Between Bible and Qur'an. The Children of Israel and The Islamic Self- Image*, (Princeton: The Darwin Press, 1999).
- Sartori, Giovanni, *Parties and Party System: A Framework for Analysis* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).
- al-Shahrestani, Muḥammad Abd al-Karīm, *Al-Milal wa al-Niḥal*, ed. 'Abd al-Azīz Muḥammad al-Wakīl (Beirut: Dār al-Fikr, t.th).
- Shihab, Alwi *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997).
- Sudirman dan Sukma, *Gumi Sasak dalam Sejarah* (Selong: Pemda Lombok Timur, 2009).

- Suprpto, "Penguatan Kearifan Lokal untuk Resolusi Konflik dan Upaya Bina Damai di Pulau Seribu Masjid", *Jurnal Indo-Islamika*, Volume 1, Nomor 1, (2011); 21-40.
- Telle, Kari, "Dharma Power: Searching for Security in Post-New Order Indonesia" dalam *Contemporary Religiosities: Emergent Socialities and the Post-Nation State* Bruce Kapferer, et.all. editors., (New York: Berghanh Books, 2010); 141-156.
- Thomas, R. Murray, *Blending Qualitative & Quantitative Research Methods in Theses and Dissertations* (Thousand Oaks, California: Corwin Press, Inc., 2003)
- Uphoff, Norman, "Understanding Sosial Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation", *Paper* pada Staff seminar, Manholt Institute, Wageningen, 13 September 2000.
- van der Kraan, Alfons, *Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940* (Singapore: Heinemann Educational Bookss Asia, 1980).
- Varhsney, Ashutosh. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India* (New Haven and London: Yale University Press, 2002).
- Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, dan Henry E. Brady, *Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
- Vickers, Adrian, "Hinduism and Islam in Indonesia: Bali and the Pasisir World" *Indonesia*, Vol. 44 (Oct.,1987): 30-58 <http://www.jstor.org/stable/3351220>. Diakses tanggal 05 Oktober 2011.
- Wall, G, "Bali and Lombok: Adjacent islands with contrasting tourist experiences" dalam D.G. Lockhart and D. Drakakis-Smith (eds) *Island Tourism: Trends and Prospects* (London: Pinter Books, 1997); 268-280;
- Wilkens, George R. "Religions Attitudes to The Middle East Peace

Process" dalam *Can Faith Make Peace? Holy Wars and The Resolution of Religious Conflicts*, Philip Brondhead and Damien Keown ed. (London and New York: IB Tauris, 2007).

Zakaria, Fathurahman, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998).

Sumber Internet

http://nasional.kompas.com/read/2012/12/24/20523543/Menteri_Agama.Muslim.Boleh.Ucapkan.Selamat.Natal diakses tanggal 16 Januari 213;

<http://www.antaranews.com/berita/349960/menag-mengucapkan-selamat-natal-halal> dikutip tanggal 16 Januari 2013.

<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/> diakses tanggal 10 Januari 2013.

<http://www.mail-archive.com/hindu-dharma@itb.ac.id/msg02172.html> tertanggal 22 November 2007 (diakses tanggal 22 Desember 2012)

<http://www.ntbterkini.com/2012/03/28/pemerintah-kota-mataram-akhirnya-gelar-mutasi/> (diakses tanggal 29 Maret 2012).

<http://www.ntbterkini.com/2012/03/28/pemerintah-kota-mataram-akhirnya-gelar-mutasi/> (diakses tanggal 29 Maret 2012).

http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?/

Indeks

A

Al-Qur'an, 36, 59, 86, 116, 122
Anak Agung, 47, 122
Anderson, Benedic, 2
asimilasi,
awik-awik
Azra, Azyumardi

B

Banjar Getas, Arya
Batur
Belanda, 49, 50, 79
Bertrand, Jacques, 2
birokrasi pemerintahan, 15, 127, 129, 152
Bonding, 5, 28, 38, 69
Bridging, 5, 29, 38, 69, 98
Budiwanti, Erni

C

Cakranegara, 3, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 79, 81, 86, 119, 120, 130, 131,
145, 146
civic engagement, 6, 11, 12, 19, 21, 82, 83,
101
civil society, 34
Coset, Lewis, 34, 35

D

Damai, 20, 38
Demokrasi, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 69,
71, 72, 73, 82, 83, 88, 108, 115, 116, 129,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 147, 149, 150, 151
Diskriminasi, 13, 27, 28, 131

E

Eksklusif, 37, 88, 90, 91
Eksklusivisme, 89, 94
el-Fadl, Khaled Abou
etnis, 2, 3, 7, 10, 45, 48, 56, 87, 108, 113,
122, 127, 130, 131, 144, 147, 152

F

FKUB, 69, 98, 99

G

Galungan, 59

H

Habermas, Jurgen, 40, 41, 134
harmoni sosial, 4, 5, 7, 19, 20, 26, 81, 82,
105
Harnish, David
hidden tanscript

I

IAIN, 11, 124
Identitas, 1, 2, 8, 9, 38, 39, 93, 116, 117, 133,
134, 135, 148, 152
Integrasi, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 38, 90, 122

J

Jakarta, 97, 116

K

Karangasem, 46, 47, 49, 55
Karmapala,
Katolik, 32, 33, 56, 71, 84, 91, 97
kekerasan sosial,
kerusuhan, 1, 3, 4, 24, 46, 84, 143, 144,
145, 146
Kesenian,
ketegangan, 4, 8, 46, 48, 95, 103, 105, 106,
107, 142, 144, 145
Kingsley, Jeremy

Komunalisme, 27, 107
Kontestasi, 2, 4, 5, 9, 10, 15, 38, 39, 41, 43,
45, 58, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 125,
126, 131, 132, 142, 148, 151, 152
Kuosidian, 7

L

Lalu, 47
LIPi, 6, 12, 20, 96, 150
living tradition,

M

modal sosial, 17, 19, 25, 27, 82, 107
Muhammadiyah, 29, 37, 38, 68, 109
MUI, 11, 93
Mujani, Saiful, 11, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 72,
83, 84, 100, 150
Mujtahid, 50
Multikultur, 2, 10, 45, 54, 56, 88, 147

N

Nahdlatul Ulama, 29, 68
Nahdlatul Wathan, 38, 68, 69
Nimer, Abu
Nyepi, 59, 60, 105

O

ogoh-ogoh, 59, 60, 96, 105
olah raga, 107, 110, 111, 112, 124
Orde Baru, 23, 73, 100, 117
otonomi daerah, 117, 128, 129

P

Pamswakarsa, 121, 122
pantai Senggigi,
Pariwisata, 131, 151
Pasar, 87
pawai takbir,
Pedanda, 11
Pemilu, 9, 17, 26, 67, 68, 69, 83
Perang Topat,
Perda, 123
Pesantren, 98
PHDI, 11, 68, 99, 111, 131
Pilgub,
Pilkada,
pluralisme, 34, 89, 92, 93, 94

Polisi, 75, 145
Primordialisme, 27, 29, 81, 102, 108, 127,
129
puasa Ramadan,
public spaces,
public sphere,
Pulau seribu masjid, 42, 56, 118, 119, 120
Pura, 4, 6, 27, 47, 48, 57, 58, 105, 106, 116,
117, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 133
Putnam, Robert D., 19, 26, 32, 38, 82, 83,
98, 101, 108

R

Rahman, Fazlur
Resiprositas, 5, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 71, 82,
101, 103
ruang publik, 2, 4, 5, 8, 9, 15, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 115, 116, 117, 120, 123, 124, 125,
132, 133, 134, 135, 142, 148, 151
Ruang terbuka hijau, 52

S

Sasak, 3, 10, 45, 48, 49, 50, 54, 60, 87, 113,
130, 131
Semeton,
simbol-simbol agama, 38, 39, 43, 117,
133, 142
STAHN,

T

Trust, 11, 19, 21, 25, 26, 27, 33, 43, 82, 86,
101, 149
Tuan Guru, 11, 78

V

violent conflict, 2

W

Weda, 122

Z

Zakaria, Fathurahman, 4, 42, 46

Tentang Penulis

Suprpto, M.Ag. Lahir di Madiun, 20 Juli 1972. Ia menyelesaikan studi S1 di UIN Maliki Malang, S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan kini menempuh program Doktor di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Agama dan Studi Perdamaian.

Selain pendidikan formal dalam negeri, ia juga aktif mengikuti *short course* dan *training* di luar negeri seperti *Short Course on Community Development and Social Worker* di McGill University of Montreal Canada (2007), *Training on Mediation and Conflict Resolution* di Wageningen University di Belanda (2008) dan pada tahun 2011 diundang ke Jepang untuk menghadiri *Invitation Program for Young Muslim Intellectuals in Southeast Asia* dari The Japan Foundation.

Minat kajiannya berkisar pada persoalan agama, *civil society* dan resolusi konflik. Beberapa penelitian yang telah dihasilkannya antara lain: *Peran Pondok Pesantren terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa* (2005), *Pesantren dan Civil Society* (2006), *Tanak Awu Tragedi: Conflict between Peasant and Government, Pendidikan Multikulturalisme pada Sekolah Keagamaan* (2010).

Selain penelitian mandiri, alumni pondok pesantren di Jawa Timur ini, juga sering terlibat dalam *joint research* dengan perguruan tinggi lain seperti penelitian tentang Barometer Indonesia untuk Konsolidasi Demokrasi, Islam dan Kultur *Good Governance* di Indonesia. Kedua penelitian tersebut merupakan hasil kerjasama dengan PPIM UIN Jakarta dan Ford Foundation.

Selain dipublikasikan di koran, karya-karyanya banyak diterbitkan di Jurnal terakreditasi seperti Jurnal Studia Islamika UIN Jakarta, jurnal Ulumuna-IAIN Mataram, jurnal Analisis IAIN Raden Intan Lampung dan lain-lain.

Di luar kesibukannya sebagai dosen tetap di FDK IAIN Mataram, mantan pembantu dekan bidang akademik, ini juga tercatat sebagai mediator pada Mataram Mediation Center (MMC) dan pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Nusatenggara Center (NC) Mataram.

Heru Sunardi, SH. MH. Lahir di Jakarta tanggal 4 September 1974. Riwayat pendidikannya diperoleh di SDN 12 Cawang Jakarta (SMPN 188 Jakarta) dan SMAN 64 Jakarta. Tahun 1993, ia kemudian pindah ke Mataram dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1998). Sejak Tahun 2000, ia mengabdikan dirinya sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Mataram dan mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Jaminan dan *Civic Education*.

Beberapa tulisannya dimuat di jurnal kampus antara lain; *Proses Peradilan dan Perilaku Yudisial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum* (2004), *Nonpenal Police dalam Upaya Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak: Kajian Aspek Kriminologi* (2005), *Pembiayaan Melalui Bank Syari'ah* (2007), dan sebagainya.

Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan misalnya: *Disfungsi UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta: Studi Tentang Penanggulangan Praktek Duplikasi dan Plagiasi Terhadap Karya Ilmiah di IAIN Mataram* (2010), *Peranan PERUM Pegadaian Mataram Melalui Program Pembiayaan Usaha Mikro dalam Produk Mitra Pegadaian* (2011), *Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang*

Keterbukaan Informasi Publik: Studi Tentang Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan di IAIN Mataram dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (2012).

H. Nazar Naamy, M.Si. Lahir di Lombok Barat, 1 tanggal Februari 1972. Pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama diselesaikan di kampung kelahirannya. Selepas SMA, ia melanjutkan studi Pesantren Salafiyah-Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Usai nyantri di pesantren KH. R. As'ad Syamsul Arifin, ia melanjutkan S2 Sosiologi Pedesaan di Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak Tahun 2000 diangkat menjadi dosen tetap FDK IAIN Mataram dengan mengampu mata kuliah Pengantar Sosiologi dan *Civic Education*.

Untuk mengembangkan karir akademiknya, dosen yang pernah *short course* di McGill University of Montreal Canada ini, menempuh Program Doktor di Universitas Airlangga Surabaya dan Pascasarjana Universitas Merdeka Malang Jurusan Ilmu Sosial. Beberapa tulisannya dimuat di beberapa jurnal kampus, di antaranya: *Strategi Dakwah Melalui Pendekatan Budaya* (2005), *Fenomena Pelacuran dan Strategi Dakwah* (2006), *Mencari Makna Haji Bagi Masyarakat Sasak Dalam Perspektif Sosiologis* (2007), *Membangun Proses Politik Legitimasi* (2010), *Teori Sosial Kritis Dalam Memahami Dinamika Dakwah Islamiyah* (2011), *Otonomi Daerah dan Dinamika Budaya Lokal* (2012) dan lain-lain.

Beberapa penelitian yang pernah ia lakukan antara lain: *Pengaruh Nilai-nilai Agama dan Budaya terhadap Tingkat Pendidikan Perempuan Pedesaan di Pulau Lombok* (2002), *Dakwah Islamiyah Perspektif Pluralisme Beragama* (2004), *Rekonstruksi Strategi Dakwah Dalam Pola Pembinaan Wanita Tuna Susila* (2005), *Dakwah Berspirit Pluralisme Agama: Studi tentang Potensi dan Strategi Dakwah di Tengah Heterogenitas Agama di Kota Mataram* (2012).

CIVIC CULTURE & PERTARUNGAN IDENTITAS

Civic culture yang diindonesiakan sebagai budaya kewargaan merupakan unsur terpenting dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia. *Civic culture* yang merefleksikan kesadaran individu maupun masyarakat sebagai warga negara berperan penting menjaga kohesifitas di tingkat lokal sekaligus memupuk integrasi bangsa secara nasional. Menguatnya *civic culture* di masyarakat memungkinkan berbagai pertentangan dan konflik dapat dikelola secara proporsional sehingga tidak meledak menjadi kerusuhan komunal. *Civic culture* yang tumbuh dengan baik, juga berkontribusi bagi konsolidasi demokrasi. Sehingga berbagai kontestasi simbol keagamaan di ruang publik -yang sejatinya juga merupakan konsekuensi logis atas terbukanya kran demokrasi- dapat berlangsung secara damai dan dinamis.

Buku ini merupakan hasil riset mengenai budaya kewargaan dan kontestasi simbol keagamaan yang berlangsung pada komunitas Hindu dan Muslim di Lombok. Sekalipun setting kasusnya lokal, tetapi sejumlah temuan menarik yang terdapat dalam buku ini sangat relevan untuk membaca relasi sosial dan proses demokrasi di Indonesia.

Sintesis

ISBN: 978-602-17498-3-8

